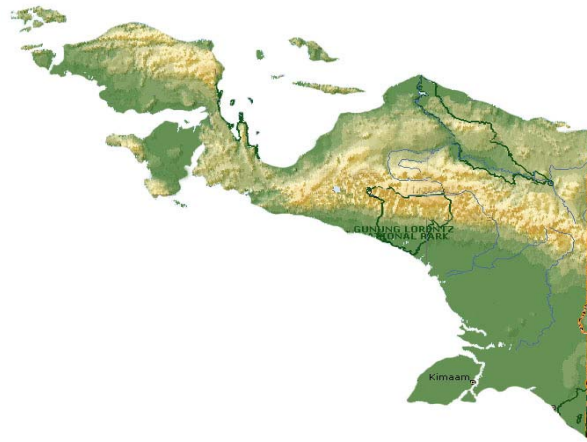


“Makin sulit untuk Saling Percaya”

(Oktober – Desember 2005)



Sekilas Informasi

OLEH

**SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA**

www.hampapua.org

Jayapura

November 2006

Bagian I

Lintasan Peristiwa Hak Asasi Manusia Oktober – Desember 2005

1 Oktober

- ❖ Kasus HIV/AIDS di Papua kini menembus angka 2000-an dan lebih tragis lagi karena umumnya pengidap HIV / AIDS adalah orang asli Papua. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Gubernur DR JP Salossa M.Si. Tak hanya itu, penyakit lainnya yang mendominasi Papua adalah penyakit kulit, malaria, dan ISPA.
- ❖ Hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Statistik Kabupaten Merauke menunjukkan total keluarga miskin yang ada di Kabupaten Merauke dan 3 Kabupaten pemekaran yakni Boven Digoel, Mappi dan Asmat sebanyak 55.678 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut untuk Kabupaten Merauke terdapat keluarga miskin sebanyak 21.722 KK. Kabupaten Boven Digoel sebanyak 6.573 KK, Kabupaten Mappi sebanyak 13.193 KK dan Kabupaten Asmat 14.303 KK.
- ❖ Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) Konsorsium Masyarakat Pengusaha Papua (KMPP) Ir. Adolf A. Asmuruf menilai aksi demo penentangan pembentukan MRP dan penolakan Otonomi Khusus tersebut sebagai suatu hal yang berlebihan. Pasalnya, untuk menilai Otsus di Papua tidak bisa dilihat dari tiga tahun saja. “Kalau Otsus ditolak kita akan mendapat pos dana dari mana” tandasnya. Tentang penolakan terhadap MRP Ir. Adolf A Asmuruf mengatakan itu sangat keliru karena pembentukan MRP akan menjadi payung hukum bagi jalannya Otsus di Papua.
- ❖ Aksi penolakan pembentukan MRP oleh Front Pepera – PB mendapat tanggapan serius dari Ketua Panitia Khusus (Pansus) MRP Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Abdul Hakim Achmad. Menurutnya pembentukan MRP merupakan solusi pemecahan persoalan Papua di era Otonomi khusus.” Terhadap aspirasi masyarakat yang menolak pembentukan MRP apakah merupakan lembaga representatif orang orang asli Papua yang memiliki tugas dan wewenang dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak dasar orang asli Papua adalah solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua selama ini.
- ❖ Setelah melaporkan kasus-kasus pelanggaran Pilkada Kabupaten Raja Ampat di Pengadilan Tinggi Jayapura, Tim sukses ketiga pasangan yang kalah dalam Pilkada di Raja Ampat serta dibantu oleh tim pemantau dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Provinsi Irian Jaya Barat (Korwil K SBSI) mengatakan akan mengajukan persoalan ini ke Presiden Republik Indonesia melalui Mendagri dan KPU pusat. Demikian dikatakan Koordinator pemantau Pemilu dari SBSI Wilayah Provinsi IJB DR (HC) Steven Iwanggin.

3 Oktober

- ❖ Kota Jayapura lumpuh total menyusul aksi mogok yang dilakukan oleh para sopir angkutan Kota untuk menyingkapi kenaikan harga BBM. Para sopir ini menuntut agar pemerintah segera memberlakukan tarif baru akibat kenaikan BBM tersebut. Aksi mogok ini terjadi disemua jurusan, antara lain Abepura-Kotaraja, Abe-Waena, Entrop-Abepura, Entrop Jayapura, Jayapura – Base G dan lainnya.
- ❖ Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2005-2010 diperkirakan bakal digelar sekitar 15-20 November 2005. Hal ini bisa terwujud jika DPRP benar-benar konsisten dengan

suratnya yang dikirimkan kepada KPUD Provinsi Papua pada tanggal 28 September lalu yang isinya bahwa mereka akan menyerahkan nama-nama calon Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 10 Oktober mendatang “ ungkap, Ketua KPUD Papua Ferry Kareth,SH, M.Hum.

- ❖ Sejumlah proyek fisik 2004 yang ada di Kabupaten Biak Numfor belum terealisasi 100 persen. Hal ini berdasarkan penemuan Tim IV DPRD Biak Numfor yang dipimpin Berek Rumarar yang turun lapangan untuk memantau pelaksanaan proyek tahun 2004 di Distrik Numfor Barat dan Distrik Numfor Timur. Padahal menurut Berek Rumarar sesuai dengan laporan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2004 yang diterima DPRD Biak Numfor anggaran sudah terealisasi 100 persen. Proyek yang belum teralisasi yaitu dari Dinas Pendidikan berupa pembangunan gedung sekolah dan juga proyek provinsi berupa pembangunan rumah masyarakat yang belum terealisasi.
- ❖ Massa pendukung Bupati terpilih Kabupaten Supiori Drs.Jules F Warikar dan Julianus Mnusefer S.Si,S.Th yang terdiri dari 50 orang perwakilan dari 3 Distrik yang ada di Kabupaten Supiori melakukan aksi demo damai di Gedung DPRD Supiori. Dalam pernyataan sikap yang bacakan yaitu :
 1. Mendukung DPRD Supiori untuk segera menggelar sidang paripurna istimewa dengan agenda pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2005-2010 sesuai dengan jadwal Gubernur Papua.
 2. memberi dukungan kepada Polres Persiapan Supiori dan Polres Biak Numfor untuk menindak tegas para pelaku perusakan kantor Distrik Supiori Timur.

4 Oktober

- ❖ Pembagian kartu miskin program kompensasi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat miskin di wilayah Kelurahan Waena, Distrik Abepura diprotes oleh warga. Pasalnya pembagian ini dinilai tidak selektif, dimana masyarakat miskin tidak mendapat kartu tersebut.
- ❖ Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo,SH.Msi. mengungkapkan guna mengawasi penggunaan dana bantuan Otonomi Khusus yang diperoleh kabupaten Boven Digoel setiap tahun baik dalam bentuk dana segar maupun dalam bentuk proyek, maka Pemda kabupaten Boven Digoel akan membentuk suatu lembaga yang memantau pelaksanaan bantuan dana Otsus yang diterima daerah itu dalam setiap tahunnya.
- ❖ Kejaksaan Tinggi Merauke akhirnya mengajukan surat ijin penahanan dua mantan pimpinan DPRD Merauke Drs. Petrus M Tiniyap dan Harry Rahail, yang telah ditetapkan oleh kejaksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalagunaan keuangan negara yang terjadi di DPRD Merauke sebesar Rp.4,9 miliar lebih, ke Gubernur Papua.
- ❖ Terkait dengan pemilihan anggota MRP yang akan diambil dari unsur agama, adat dan perempuan untuk Kabupaten Sarmi hanya 8 Distrik, sementara di Kabupaten Jayapura terdiri dari 16 Distrik, maka ditempuh dengan cara apapun kemungkinan dari Sarmi tidak terwakili. Demikian halnya kalau voting. Untuk itu, Bupati Fonataba mengharapkan nantinya ada kompromi “politik”.
- ❖ Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, Drs. TH. Pasaribu, Msi mengatakan, penanganan warga eks Pasar Ampera yang kini bermukim dibelakang Kantor Bank Mandiri Jayapura, akan ditindaklanjuti mengingat keberadaan mereka dinilai mengganggu pelayanan pihak Bank Mandiri.
- ❖ Menyangkut pemberhentian Ev. Yusuf Nisaf sebagai ketua DPRD Kabupaten Jayapura. Gubernur Papua JP Salossa mengaku hingga saat ini pihaknya belum

menerima surat pengajuan pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jayapura sehingga pihaknya tidak campur tangan dalam permasalahan ini.

5 Oktober

- ❖ Sebanyak 104.790 warga di Kabupaten Manokwari yang memiliki hak pilih akan menentukan siapa yang akan menjadi Bupati/ wakil Bupati Manokwari periode 2005-2010. Keempat pasangan kandidat tersebut adalah Herman Orisu-Aliyudin, Yakonias Sorbu-Philatus Rumkorem, Drs. Dominggus Mandacan-Dominggus Bunay MM dan pasangan Yusuf Saway-Winih Mangkuwiyono.
- ❖ Menteri Fredy Numberi yang didampingi Gubernur DR JP Salossa, M.Si memantau langsung penyerahan Subsidi BBM kepada warga miskin di kota Jayapura. Warga miskin meminta agar jumlah bantuan disesuaikan dengan harga barang di Papua. Sebab Rp.300.000 itu belum cukup, Fredi berjanji akan menyampaikan pada presiden agar Papua bisa ditambah jumlahnya.
- ❖ Menjelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Manokwari periode 2005-2010, ada pihak tertentu yang menyebarkan selebaran yang berisi hujatan untuk mengacaukan Kota Manokwari. Selebaran tersebut berisikan surat perintah dan surat wasiat yang berisi Manokwari sebagai pusat Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun hingga kini belum diketahui pengedar selebaran tersebut, hal ini sesuai yang dikatakan oleh Kapolres Manokwari AKBP Drs. Petrus Waine, SH.
- ❖ Satu hari menjelang pelaksanaan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Manokwari periode 2005-2010, Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada kabupaten menggelar Pleno untuk menggantikan Yance Meilisa, S.th.
- ❖ Proses Hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Karena itu, Pemerintah dan DPR segera melakukan amandemen terhadap UU No.31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Hal ini diungkapkan oleh koordinator KontraS Usman Hamid di Jakarta.
- ❖ Pemilihan calon anggota MRP untuk tingkat Distrik Pemilihan IV yang meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, hari ini tuntas. Distrik yang melakukan pemilihan terakhir yaitu Distrik Biak Kota.

6 Oktober

- ❖ Saat pembagian Kartu Miskin di wilayah Kota Jayapura, sedikitnya 200-an dari 2000-an kartu miskin dimusnahkan karena dinilai salah sasaran seperti diungkapkan oleh Kepala BPS Kota Jayapura, Drs. Johanis Lalihatu.
- ❖ Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI George Toisutta berpesan kepada para prajurit, hendaknya jangan takut dengan Hak Asasi Manusi (HAM). Sebab selama prajurit melaksanakan tindakan kemiliteran sesuai dengan prosedur, tidak akan ada pelanggaran HAM.
- ❖ Di Mubraidiba, Distrik Manokwari Utara belasan warga simpatisan Drs. Dominggus Mandacan-Ir. Buiney mendatangi dan mengamuk di TPS, disebabkan karena gambar pasangan Mandacan – Buiney dihilangkan atau digunting dari kertas suara.
- ❖ Terkait dengan belum dilantikanya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom, masyarakat di Kabupaten Keerom mengancam akan memboikot semua tahapan-tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan oleh KPUD Keerom. Hal ini disampaikan ketua KPUD Kabupaten Keerom, Sara Yambeyabdi SE.
- ❖ Dampak kenaikan harga BBM, diperkirakan banyak siswa akan putus sekolah. Menurut Festus Simbiak, M.Pd, pengamat perkembangan pendidikan Universitas Cenderawasih, tahun ajaran 2005-2006 jumlah siswa yang akan melanjutkan

sekolahnya kejejang yang lebih tinggi akan berkurang, bahkan mungkin banyak akan putus sekolah karena ekonomi orang tuanya tidak mampu / lemah.

- ❖ Ramses Wali menyatakan bahwa jika dalam waktu dekat ini MRP belum terbentuk, Pilkada Gubernur akan tetap terlaksana tanpa MRP, maka tugas untuk menyeleksi dan menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilakukan oleh DPRD. Hal ini sesuai dengan PP.6 tahun 2005 pasal 139 ayat 3 yang adalah hasil dari kolaborasi UU No. 21/2001 (Otsus) dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- ❖ Ketua KPUD Provinsi Papua, Ferry Kareth, SH,M.Hum mengungkapkan bahwa, penunjukan caretaker (pejabat) Gubernur Papua tidak bisa dihindari lagi, jika Pilkada mengalami penundaan dari jadwal sebelumnya 10 Oktober atau harus menunggu terbentuknya MRP. Pasalnya berdasarkan jadwal yang telah dibuat KPUD, seharusnya tanggal 6 Oktober hari ini merupakan batas akhir pelaksanaan kampanye para Kandidat, kemudian tiga hari berikutnya adalah hari tenang dan tanggal 10 Oktober hari pencoblosan “Jadi mau tidak mau suka tidak suka pilkada itu akan dilaksanakan tanggal 23 November “.
- ❖ Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura Dr. Ichsan Ansari Ibrahim, MM mengungkapkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Jayapura belum mendapatkan pencairan dana Otonomi Khusus tahap ke II, yang akan dicairkan sekitar 45% lagi. Padahal Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah memberikan laporan pertanggungjawaban untuk pencairan dana Otsus tahap I yang dicairkan September 2005. Dikatakan bahwa secara keseluruhan Kabupaten Jayapura mendapat dana segar otsus sekitar Rp 28 M, pencairan tahap pertama sebesar 40% atau sebesar Rp 11,7 M sudah disalurkan.
- ❖ Kenaikan harga BBM kini berimbas pada kenaikan harga barang pokok yang dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor M.M. Rumboirusi menyatakan pasca kenaikan harga BBM, harga barang di Kabupaten Biak Numfor sudah naik sekitar 30-37 persen.
- ❖ Menunggak pembayaran listrik selama 3 tahun (2002-2005), PLN Jayapura segel listrik di 4 asrama mahasiswa Jayawijaya. Ke-4 asrama itu terdiri dari: asrama Nayak Rp. 4.182.525, asrama Anjungan Wamena di Taman Budaya Waena Rp.13.315.500, Kantor Perwakilan Jayawijaya di Sentani Rp. 1.621.515 dan asrama di jalan Buper Waena Rp.5.560.865. Hal ini disampaikan perwakilan mahasiswa Jayawijaya di Jayapura, Agus Alua.
- ❖ Jumlah penduduk Kabupaten Kaimana yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dinilai cukup tinggi. Dari jumlah keseluruhan penduduk 31.000 jiwa, 5.649 jiwa diantaranya masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan terdapat di Distrik Kaimana kota. “Ujar kepala Distrik Kaimana Abdul Rahman Furuada”.

7 Oktober

- ❖ Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera–PB) kembali mendatangi gedung DPRD. Kedatangan kelompok ini menagih jawaban DPRD terhadap aspirasi pemboikotan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pencabutan UU No.21/2001 tentang Otsus, yang telah disampaikan pada aksi demo 30 September 2005 lalu. Didepan para wakil rakyat, Ketua Front Pepera-PB, Hanz Gebze membacakan pernyataan politik yang antara lain meminta dan mendesak Presiden RI, Menkopolhukam dan Mendagri untuk segera membicarakan atau mempersiapkan “Dialog Nasional” yang luas, demokratis, terbuka, jujur dalam rangka penyelesaian masalah politik Papua, DPR RI diminta untuk segera membentuk pansus, meminta dan mendesak DPRD untuk segera membubarkan Pansus Otsus dan Pansus MRP, DPR RI mencabut UU Otsus dan PP. 54/2004

tentang MRP serta menyatakan bahwa pemerintahan Otsus Papua tidak berlaku lagi di bawah kepemimpinan Dr. JP.Salossa dan kroni-kroni sejak Otsus dikembalikan tanggal 12 Agustus yang lalu.

- ❖ KPUD Kabupaten Fak-Fak digugat di PN Jayapura oleh 2 pasangan Calon Bupati, masing-masing pasangan Cabup Drs. Fraskus Hombore, Msi dan Cawabup Abubakar Saleh Bauw, Sh.Msi dan pasangan Cabup Drs. Musa Kamudi, Msi dengan Cawabup Donatus Nimitkendik terkait dengan hasil perhitungan suara di Kabupaten Fak-Fak.
- ❖ Dalam Pilkada Manokwari, angka Golput cukup tinggi karena di sejumlah TPS banyak surat suara tidak terpakai. Sekretaris KPPS TPS 14 Kelurahan Sanggeng, Otis Kambu menyatakan bahwa tingginya angka surat suara ini yang tidak terpakai disebabkan oleh beberapa hal: [1] masyarakat tidak mendapat kartu pemilih berikut undangan; [2] masyarakat memang tak mau memilih.
- ❖ Sekitar Rp. 98 Miliar dari total dana Otsus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua dialokasikan untuk pembangunan pendidikan, anggaran itu juga akan dialokasikan untuk pembangunan unit sekolah baru baik SD, SMP maupun SMA di sejumlah Kabupaten dan Kota, dan untuk rehabilitasi sejumlah sekolah dan pembangunan KPG (Kolese Pendidikan Guru) di Kabupaten Merauke, Mimika, Nabire dan Sorong yang semuanya telah berjalan.
- ❖ Polres Persiapan Supiori yang melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan *money politics* yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Supiori, berencana akan menambah saksi dalam penyelidikan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan sudah ada calon tersangka yaitu BW yang diduga kuat telah membagikan uang dalam pelaksanaan Pilkada.
- ❖ Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Manokwari dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketuanya Herman Lengan S.Sos, terungkap sejumlah kasus menonjol yang terjadi pada saat pelaksanaan pengumuman suara diantaranya ada laporan penganiayaan terhadap tim sukses pasangan Cabub/ Wabup Yusuf Saway – Winih Mangkuwiyono, pembakaran kertas surat suara serta dugaan mobilisasi massa.
- ❖ Ketua komisi A DPRD Kabupaten Jayapura, Yohanis Eluay mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kunjungan kerjanya, pelaksanaan program pemberdayaan ditingkat Distrik maupun Kampung masih perlu diperbaiki. Terutama menyangkut kesepakatan program dan juga penggunaan dana pemberdayaannya sehingga benar-benar dirasakan masyarakat kampung.
- ❖ HET minyak tanah di Provinsi Irian Jaya Barat Rp.2.700/liter namun di lapangan, ada masyarakat yang jual Rp. 4.000 – 4.500/liter.
- ❖ Meskipun telah menyandang nama sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puncak Jaya, rumah sakit tersebut belum mempunyai dokter spesialis. Hal ini dikatakan Bupati Puncak Jaya Elieser Renmaur di Distrik Ilaga.

8 Oktober

- ❖ Pendistribusian dana kompensasi pengurangan Subsidi BBM di daerah pegunungan, ternyata banyak mengalami kendala, terutama karena sulitnya sarana transportasi. "Persoalan di sini adalah pada proses penyaluran karena lokasi pengambilan dana kompensasi cukup jauh", ungkap Gubernur JP Salossa, M.Si.
- ❖ 400 Kartu Miskin dibatalkan karena salah sasaran, hal ini diungkapkan oleh Kepala BPS Kota Jayapura, Drs.Yohanes Latihatu.
- ❖ Pemilihan calon anggota MRP daerah pemilihan VIII yang meliputi kota Jayapura dan Kabupaten Keroom, diruang rapat Walikota Jayapura berhasil memilih dua calon yaitu: Yacoba Tjo-e, SH mewakili unsur perempuan dan Ferdinand Tuamis mewakili

unsur adat. Yacoba Tjo-e sendiri merupakan utusan dari Distrik Abepura Kota Jayapura dan Ferdinand Tuamis dari utusan Distrik Arso Kabupten Keerom.

- ❖ Anggaran yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Provinsi Irian Jaya Barat sekitar 16 miliar untuk persiapan pelaksanaan Pilkada Gubernur menjadi mubazir. Dana sebesar itu terbuang percuma karena Pilkada Gub/Wagub IJB yang direncanakan 28 Juli tertunda. Ironisnya lagi ratusan ribu lembar surat suara yang telah menghabiskan dana miliaran rupiah direncanakan akan dimusnakan. Hal ini ditegaskan ketua KPU Provinsi IJB, Ny. Regina Sauyai.
- ❖ Ketua Panwas Pilkada Provinsi Papua, Max Mirino mengakui kinerja Panwas belum bekerja efektif karena lambatnya pembentukan Panwas ditingkat Kabupaten/Kota, ketersediaan dana serta fasilitas penunjang.
- ❖ Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Jayapura, Drs. Binton Nainggolan mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jayapura, perkembangan kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan 21,5 persen atau 211 kasus dari data sebelumnya 174 kasus.
- ❖ Dua nama terpilih mewakili masyarakat adat dan perempuan dalam Proses pemilihan anggota MRP daerah pemilihan IX, sejumlah calon MRP dari 24 Distrik di Kabupaten Jayapura dan Sarmi. Dua nama yang terpilih yaitu : Martinus Buaim (mewakili masyarakat adat) dan Dra. Hana Hikoyabi (mewakili perempuan).
- ❖ Pemilihan anggota MRP perwakilan tokoh adat dan tokoh perempuan dari daerah pemilihan XIII, yaitu Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Mimika, yang dilaksanakan di Jayapura, berhasil memilih Alpius Murib yang mewakili unsur Tokoh Adat yang berasal dari Kabupaten Puncak Jaya dan Yupina Magal yang terpilih mewakili unsur perempuan yang berasal dari kabupaten Mimika. Menurut ketua panitia Dapil XIII, Drs.Djafar Muhammad karena sulitnya transportasi pada daerah pemilihan maka kedua Kabupaten sepakat diadakan di Jayapura sebagai daerah yang dianggap netral.

10 Oktober

- ❖ Janji Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) khususnya Pansus Pilkada untuk menyampaikan daftar nama-nama pasangan Calon Gubernur ke KPUD Provinsi Papua 10 Oktober, DPRD belum juga menyerahkan nama-nama tersebut. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris KPUD Provinsi Papua, Drs. H. Hasyim Sangadji.
- ❖ Meski saat ini alokasi dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) sebesar 3,5 miliar untuk 184 SD dan SMP di Kabupaten Biak Numfor sudah turun namun pihak sekolah belum dapat melakukan pencairan karena belum ada sosialisasi tentang penggunaan dana operasional sekolah tersebut. Hal ini dikatakan Kasubdin Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor, Drs. Gimin.
- ❖ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura yang menangani Gugatan Cabup (Calon Bupati) Ny.Yanni dan Cawabub (Calon Wakil Bupati) Elpius Hugi untuk Kabupaten Yahukimo akhirnya memutuskan bahwa komisi pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Yahukimo sebagai termohon dalam kasus ini, secara sah dinyatakan tidak bersalah.
- ❖ Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura yang menangani Gugatan Calon Bupati (Cabub) Thobias Salossa SH,MM dan Calon Wakil Bupati (Cawabub) H.Mustafa W,Sag terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sorong Selatan akhirnya memutuskan bahwa KPUD Kabupaten Sorong sebagai termohon dalam kasus ini secara sah dinyatakan tidak bersalah.
- ❖ Terkait dengan sorotan bahwa KPUD Jayawijaya diduga telah memanipulasi data dan akhirnya merugikan Isabet Kogoya, maka atas persoalan tersebut KPUD Kabupaten Jayawijaya mengatakan bahwa hal yang dituduhkan kepada mereka

sangat tidak beralasan, sebab yang telah dilakukan KPUD telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini dikatakan oleh Ketua KPUD Jayawijaya, Agustinus Rorong dan anggotanya, Pdt.Alexander Maury.

- ❖ Ketua Pansus MRP DPRD Puncak Jaya, Petrus Enumbi menilai pelaksanaan pemilihan anggota MRP untuk daerah pemilihan XIII tidak dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku karena ada beberapa calon anggota yang berasal dari Distrik luar termasuk wakil adat yang terpilih sekarang tidak pernah berdomisili di Puncak Jaya, tetapi tinggal di Waena, Jayapura.

11 Oktober

- ❖ Direktur ICS Papua Budi Setyanto SH mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi tertunda penyerahan nama-nama Calon Gubernur Papua ke KPUD oleh DPRD adalah karena memang di Papua ini rekrutmennya dilakukan oleh DPRD, maka di dalam tahapan yang akan disusun KPUD, harus dicantumkan penyerahan hasil rekrutmen kandidat dari DPRD pada KPUD. Kalau pertimbangannya lebih pada dominasi politik yang ada pada DPRD, maka hal ini akan menghambat proses demokrasi.
- ❖ Family Health International (FHI) di Jayapura bekerjasama KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Provinsi Papua dan Provinsi IJB serta lembaga-lembaga donor dan World Bank yang ada, akan merancang suatu program penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini dikatakan oleh kepala Are Family Health International Papua Dr.Gunawan.
- ❖ Kendati saat ini sudah cukup banyak anak-anak Papua yang berhasil dalam dunia pendidikan, namun ternyata tak sedikit juga yang masih kehilangan haknya, yakni hak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini dikatakan oleh Ny. Ch Alo Raфра mewakili Ketua DWP Setda Provinsi Papua ketika membuka acara penyuluhan kesejahteraan dan perlindungan anak terhadap anggota DWP setda Provinsi Papua.
- ❖ PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jayapura telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke rekening masing-masing sekolah penerima sebanyak 37,3 Miliar dan sisa dana yang berada di rekening Dinas P dan P Provinsi sebesar 6,2 miliar, hal ini dikatakan oleh Manager Operasional BRI Jayapura, Atya Anang.
- ❖ Anggota Komisi II DPRD RI asal Papua, Ben Vintjen Djeharu mengatakan, pembentukan MRP harus diselesaikan secara tuntas tanpa dikaitkan dengan berbagai kepentingan politik. Bahkan Ia justru memperingatkan bila Pilkada dipaksakan tanpa MRP maka akan muncul konflik politik yang baru di Papua.
- ❖ Sikap DPRD yang tidak menepati janjinya untuk menyerahkan nama-nama bakal pasangan calon Gubernur Papua ke KPUD, 10 Oktober. Diakui Ketua DPRD John Ibo, mengingat MRP belum terbentuk dan belum melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyeleksi dan memberikan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur sebagai orang asli Papua atau bukan orang asli Papua sesuai yang diamanatkan dalam UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus maka DPRD tidak dapat menetapkan dan menyerahkan nama-nama pasangan Cagub dan Cawagub tetap kepada KPUD untuk diadakan Pilkada.
- ❖ KPUD Jayawijaya mengancam akan memboikot seluruh proses pelaksanaan Pilkada Gubernur Provinsi Papua di Kabupten Jayawijaya. Ancaman tersebut terkait dengan penahanan Ketua dan pengurus teras KPUD Jayawijaya dengan status tersangka sehubungan dengan kasus Pilkada legislatif tahun 2004 lalu. Hal ini diungkapkan oleh ketua KPUD Jayawijaya Agustinus Rorong.
- ❖ Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang menangani gugatan Calon Bupati Decky Kawab SH.MM berpasangan dengan Calon Wakil Bupati Aziz Bauw,SH.MM

untuk Kabupaten Bintuni akhirnya memutuskan bahwa KPUD Kabupaten Bintuni sebagai termohon dalam kasus ini dinyatakan tidak bersalah.

- ❖ 3 pasangan Calon Bupati Kabupaten Raja Ampat masing-masing, pasangan Daniel Daat – H.Y.Helmi Ihamahu, Drs.Nomensen ST Mambraku – Karel Roney Kardinal, dan Lindert Imbiri – Abdul Rahman, akhirnya kalah dalam sidang Pilkada KPUD Raja Ampat di Pengadilan Tinggi Jayapura. Sebaliknya majelis hakim memutuskan KPUD Raja Ampat tidak bersalah.
- ❖ Sekitar 200-an tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh Puskesmas Kabupaten Biak Numfor, melakukan aksi mogok kerja. Mereka mempertanyakan tentang pencairan dana operasional Puskesmas tahun anggaran 2005 yang sampai saat ini belum cair. Akibat aksi mogok tersebut pelayanan kesehatan di sejumlah Puskesmas lumpuh total.
- ❖ Belum adanya kepastian pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) membuat puluhan massa pendemo yang dipimpin oleh Lasarus Indou mendatangi kantor DPRD IJB untuk menyampaikan aspirasi. Dalam pernyataan sikap antara lain berisikan permintaan kepada DPRD IJB untuk segera menggelar sidang Paripurna dan menetapkan 22 Oktober untuk pelaksanaan Pilkada. Mereka juga meminta KPUD dan Panwas untuk tidak lagi membohongi rakyat. Mereka mengancam apabila Pilkada tidak dilaksanakan tanggal 20 Oktober, agar pimpinan DPRD, Ketua KPUD dan Ketua Panwas mengundurkan diri.
- ❖ Hasil pendataan sementara terhadap keluarga miskin di Kabupaten Jayawijaya yang meliputi 33 Distrik dan 377 Desa oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya, diketahui terdapat 66.805 keluarga miskin. Hal ini dikatakan Kepala BPS, Fajri Amora,SE. Selain di Kabupaten Jayawijaya, BPS juga mengadakan pendataan di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yahukimo. Untuk Kabupaten Tolikara terdapat 15.290 KK dan Kabupaten Yahukimo 28.978 KK yang hidup miskin.

12 Oktober

- ❖ Gubernur DR JP Solossa,M.Si melantik dan mengambil sumpah Jules F. Warikar dan Yulianus Mnusefer sebagai pasangan Bupati terpilih Kabupaten Supiori periode 2005-2010. Acara tersebut digelar dalam Rapat Paripurna terbuka yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Supiori Otto Albert Msen dengan dihadiri 17 anggota DPRD, bertempat di kantor Distrik Supiori Timur.
- ❖ Pelantikan Bupati Supiori oleh Gubernur Papua Dr. JP. Salossa Msi ternyata masih meninggalkan rasa tak puas dari calon kandidat yang terkalahkan seperti Dra.Hulda Ida Imbiri / Wanggober, menurut Hulda proses pelantikan Bupati Kabupaten Supiori yang dilakukan oleh Gubernur cacat hukum dan sangat dipaksakan secara sepihak oleh Pemerintah, mengingat sampai saat ini belum ada penyelesaian secara kongkrit dan menyeluruh terhadap semua pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Bupati terpilih. Sementara itu menurut Wanggober, DPRD Kabupaten Supiori sudah melakukan pembohongan publik di mana DPRD tidak pernah menjadi modiator antara Calon Bupati terpilih dan Calon Bupati yang kalah dalam pelaksanaan Pilkada mengingat banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada.
- ❖ Proses pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terbagi dalam 14 daerah pemilihan (Dapil) di 29 kota/kabupaten di Papua, nampaknya terus berjalan. Sejak 10-11 Oktober 2005, empat Dapil lagi berhasil melakukan pemilihan anggota MRP, khusus untuk wakil adat dan wakil perempuan. Dengan demikian sampai saat ini sudah 8 dari 14 Dapil yang telah selesai melakukan pemilihan, sedangkan 6 lainnya belum membuahkan hasil.

- ❖ Adapun 4 Dapil yang berhasil melakukan pemilihan anggota MRP itu masing-masing: Dapil I terdiri dari Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong, Dapil IV terdiri dari: Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara, Dapil V terdiri dari: Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen serta Dapil III yang terdiri dari : Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama. Hal ini dikatakan Ketua Pokja antar Panpil MRP, Drs.J.Murafer,MM
- ❖ Sementara itu anggota Komisi A DPRD, Yohanes Kunewara menilai proses pemilihan anggota MRP di Dapil X, masing-masing Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke banyak terjadi pelanggaran dan tidak berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, yakni Perdasi no.4 tahun 2005 tentang cara pemilihan anggota MRP.
- ❖ Ketua Pokja Wakil agama Panpil MRP Provinsi, Gotlief Mansi,SH mengatakan proses pemilihan anggota MRP untuk wakil masyarakat agama belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Panpil. Tambahnya, kehadiran wakil agama sangat diharapkan dalam pembentukan MRP."MRP tidak akan terbentuk menjadi suatu lembaga representatif kultural orang asli Papua yang sempurna tanpa keikutsertaan wakil dari masyarakat agama, mengingat tujuan dasar dari pembentukan MRP adalah memperjuangkan dan melindungi hak-hak dasar orang asli Papua pada khususnya dan masyarakat Papua pada umumnya.
- ❖ Ketua Ikatan Pemuda Raja Ampat, Fanie Dimara menyatakan bingung alias tidak mengerti dengan keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menyatakan 3 kandidat calon Bupati Raja Ampat kalah atau ditolak permohonannya kepada KPUD Raja Ampat, sebab menurutnya, jelas-jelas kesalahan dilakukan oleh KPUD Raja Ampat, pemilihan ulang yang dilakukan 3 kali itu sebagai bukti dan harus dipertanyakan ke KPUD.
- ❖ Pesta Budaya Asmat tahun 2005 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Asmat, Drs. F.B Sorring,S.Sos, MM dan Uskup Asmat, Mgr.Aloysius Murwito,OFM, pada 7 Oktober merupakan yang ke 22 sejak dilaksanakan pertama kalinya tahun 1981.
- ❖ Ditetapkannya empat anggota KPUD Kabupaten Jayawijaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen perolehan hasil pemilihan anggota DPRD oleh penyidik Polda Papua mendapat tantangan keras dari ketua KPU Provinsi Papua Ferry Kareth,Sh.M.Hum karena kasus tersebut penanganannya sudah dilakukan Polres Jayawijaya.
- ❖ Sekretaris desa / kampung yang selama ini hanya diberikan honor dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya akan diangkat menjadi Pegawai Negeri tetap, hal ini berdasarkan adanya keputusan dari Mendagri sesuai yang disampaikan asisten I bidang pemerintahan Kabupaten Jayapura, Dra.Thelma Leroux.
- ❖ Komisi C DPRD Nabire, Yecki Pigai, S.Sos, menyesalkan dana anggaran satuan (DAS) APBD tahun 2005 yang dibuat oleh eksekutif, karena sampai dengan akhir September belum juga rampung. Ini menandakan bahwa, kelemahan eksekutif dalam menyusun DAS menjadi RAS, dimana proyek-proyek yang ada pada tahun 2005 senilai Rp.27 miliar itu tidak dapat diselesaikan secara baik hanya dalam 2 bulan, sebab akhir tahun yakni pada 31 Desember sudah tutup tahun anggaran.
- ❖ Meski ditolak habis-habisan berbagai kalangan ternyata niat Pemerintah untuk mengaktifkan Komando Teritorial (Koter), tetap berjalan untuk mencegah, menangkal dan menindak teroris. Hal ini dikatakan Menteri Pertahanan dan Keamanan Prof.Dr Juwono Sudarsono.

13 Oktober

- ❖ Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Irian Jaya Barat kembali melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan Pilkada gubernur-Wakil Gubernur. Walaupun belum ada kepastian kapan akan digelar. Sejumlah persoalan mengemuka dalam Rakor ini, termasuk juga usulan mengenai jadwal Pilkada Gubernur 22 oktober mendatang, KPUD tengah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar mau mengeluarkan dana Rp.28 – 29 Miliar.
- ❖ Menyoal tentang dana pemberdayaan kampung Sereh sebesar Rp.25 Juta, yang tidak jelas pemanfaatannya membuat sejumlah anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan kepala RT dan RW di Kampung Sereh, mendatangi DPRD Kabupaten Jayapura untuk mempertanyakan masalah tersebut. Bahkan terkait masalah tersebut, mereka meminta agar Kepala Kampung dan Kepala Bamuskam diganti.
- ❖ Proses pemilihan anggota MRP di daerah pemilihan (Dapil) XIV Nabire – Paniai yang digelar Kamis (13/10) di kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Nabire diwarnai aksi demo. Mereka menolak adanya pembentukan MRP, menurut salah satu dari massa yang menolak, Ferdinand Tekege bahwa masyarakat menolak dengan tegas menolak pembentukan MRP di Papua karena masyarakat adat sudah mengembalikan otonomi khusus dan MRP pada tanggal 12 Agustus lalu.
- ❖ Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke menggelar lokakarya membangun budaya damai antar etnis untuk tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Merauke dan dilaksanakan 4 hari serta diikuti oleh 11 etnis yang ada di Kabupaten Merauke. Direktur SKP Keuskupan Agung Merauke Pastor Jus Mewengkang MSC mengemukakan, gagasan mewujudkan Papua Tanah Damai dapat dipandang dan sekaligus dapat dipegang semua pihak sebagai visi atau cita-cita bersama dalam membangun masa depan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
- ❖ Setelah 2 mantan pimpinan DPRD Merauke ditetapkan Kejaksaan Negeri Merauke sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalagunaan keuangan negara sebesar 4,9 miliar lebih, maka Kejaksaan Negeri Merauke kembali menetapkan tersangka baru, Fabianus Binjab,SH yang duduk sebagai wakil Ketua III DPRD periode 1999-2004, resmi dinyatakan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Merauke.

14 Oktober

- ❖ Gubernur Papua DR.JP.Salossa,M.M.Si melatik dan mengambil sumpah Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Waropen Drs. Ones J. Ramandey dan Daud Donggori di Waropen. “Saudara harus sadar bahwa saudara dipercayakan oleh bangsa dan negara RI untuk memimpin daerah ini. Karena itu harus menempatkan diri sebagai pengawal merah putih serta taat dan setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia”. Hal tersebut sengaja disampaikan Gubernur Salossa karena daerah itu (Waropen) juga disinyalir terdapat kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
- ❖ Kuasa hukum dari dua pasangan Calon Bupati yang kalah dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Raja Ampat kembali mengajukan peninjauan ke Mahkamah Kontitusi untuk perkara pidana Pilkada melalui Pengadilan Tinggi Jayapura dengan nomor 21/PDT.T/Pilkada/2005/PT.JPR tertanggal 13 Oktober 2005.
- ❖ Front Persatuan Rakyat (Pepera) Papua Barat untuk ketiga kalinya mendatangi DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka ngotot menuntut pembubaran pembentukan MRP yang dianggap merupakan boneka buatan pemerintah RI karena Otsus telah dikembalikan ke Jakarta pada 12 Agustus 2005 lalu.
- ❖ Pernyataan Ketua DPRD kota Jayapura, Drs.Theopilus Bonay,MM, pada pembahasan anggaran belanja tambahan (ABT) 2005 ini, Dewan akan mengusulkan

jatah Rp.1,3 miliar, diklarifikasikan Ketua fraksi Golkar Drs.Yacob Ingratubun. Ia membenarkan adanya pengusulan anggaran sebesar itu, hanya saja peruntukannya bukan untuk pengadaan mobil anggota dewan, tetapi untuk biaya transportasi dewan.

- ❖ Kendati sejak September lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menegaskan bahwa dana kompensasi BBM yang telah ditujukan untuk infrastruktur pedesaan sudah harus disalurkan dalam bulan Oktober, namun rupanya di Papua sampai saat ini belum satupun desa maupun kelurahan kampung yang telah menerima dana kompensasi BBM itu. Hal tersebut diakui Ketua Panitia Penyaluran Kompensasi BBM infrastruktur yang juga adalah kepala Dinas PU Provinsi Papua Ir. Edwin Ratulangi “Kami belum menyalurkan dana tersebut karena semua usulan program dari kelurahan desa atau kampung belum detail” ungkapnya.
- ❖ Keterwakilan komponen adat dan perempuan dalam keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk daerah pemilihan (Danpil) wilayah XI yang meliputi kabupaten Mappi dan Asmat, akhirnya terpilih. Donatus Pombai terpilih dari unsur adat dan Dra. Golda H. Adu dari unsur perempuan.
- ❖ Puskemas Sumberker Biak Numfor, dipalang oleh keluarga Rumaropen. Alasan pemalangan tersebut terkait tuntutan hak ulayat atas tanah seluas 900 m². akibat pemalangan tersebut aktivitas Puskesmas lumpuh total.

15 Oktober

- ❖ Drs. Alberth H Torey MM – Dra.Marice Pesurnay Kaikatuy merupakan Bupati/Wakil Bupati pertama hasil Pilkada 29 Agustus di Provinsi Irian Jaya Barat yang dilantik dalam sidang Paripurna DPRD kabupaten Teluk Wondama, Torey – Marice dilantik oleh Pjt.Gubernur Provinsi IJB Ir. Timbul Pundjianto atas nama Mendagri HM Ma’ruf.
- ❖ Gubernur Provinsi Papua Dr. JP.Solossa secara resmi melantik Drs. Celcius Watae dan Drs. Waghfir Kosasih,SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom periode 2005-2010.
- ❖ Sekretaris Pansus MRP DPRP Ir. Weynand Watori mengatakan walaupun proses pemilihan anggota MRP di beberapa Daerah pemilihan sudah berjalan baik namun karena masih adanya laporan dari masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan yang tidak demokratis maka proses pelantikan anggota MRP perlu diklarifikasi dan tidak perlu terburu-buru. Diakui sampai hari ini, Panwas MRP Provinsi baru mendapatkan satu laporan resmi dari Panwas MRP Distrik Jayapura Selatan terkait pelanggaran pemilihan anggota MRP. Sementara di tingkat Distrik yang tersebar di 14 Dapil dan 29 Kota/Kabupaten se-Propinsi Papua belum memberikan laporan resmi terkait pelanggaran yang terjadi saat pemilihan anggota MRP.
- ❖ Operasi malam yang digelar oleh jajaran Polres Jayapura, berhasil menahan 27 orang diantaranya perempuan 8 orang dan laki-laki 19 orang selain itu aparat juga menyita berbagai jenis minuman keras (Miras) yang terdiri dari bir bintang 22 botol, bir hitam 2 botol, jenever 7 botol, vodka campur 5 botol dan miras kosongan 56 botol, 3 badik, 1 parang dan 1 pisau dapur.
- ❖ Akibat sosialisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperuntukkan bagi siswa SD dan SLTP yang belum dilakukan, membuat PT Pos Indonesia Merauke belum mencairkan dana tersebut. Belum dilakukan sosialisasi itu karena masih adanya tarik ulur antara dua Dinas yakni Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Merauke.
- ❖ Selama periode pertengahan September sampai dengan pertengahan Oktober 2005, RSUD Biak Numfor telah menemukan 6 kasus HIV/AIDS. Penemuan tersebut berdasarkan hasil *screening* terhadap pasien yang dicurigai terinfeksi virus HIV/AIDS.

17 Oktober 2005

- ❖ Ketua DPW PKPI Provinsi Papua Ramses Wally mengatakan ketidakjelasan pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua bukan hanya DPRD yang menghambat tetapi juga Parpol karena lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Lanjut Ramses, "Parpol harusnya menyadari bahwa amanat UU Otsus no.21 tahun 2001, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua, namun ia memandang aneh karena ternyata Parpol malah mencalonkan kandidat yang bukan asli orang Papua".
- ❖ Pihak Kejaksaan Negeri Jayapura menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara kasus dugaan pelecehan seksual oleh Kepala BP3D Drs. Marthinus Howay terhadap beberapa staf wanitanya, belum lengkap.
- ❖ Koordinator Solidaritas Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Mappi di Jayapura, Berth Kainakaimun mengungkapkan bahwa terkait dengan sengketa hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Mappi, sudah ada keputusan sah dari Pengadilan Tinggi Jayapura yang memenangkan pasangan Drs. Aminadab Jumame – Stefan Kaisma pada tanggal 11 Agustus 2005. Namun hasil keputusan PT tersebut, hingga kini belum ditindaklanjuti dengan pelantikan Bupati definitif. Dikatakan bahwa ada upaya-upaya pembodohan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada masyarakat dan memprofokasi masyarakat untuk menolak hasil keputusan pengadilan tinggi.
- ❖ Pernyataan anggota Komisi A DPRD Yohanes Kunewara, yang mengatakan bahwa proses pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di daerah pemilihan (Dapil) X masing-masing Kabupaten Boven Digul dan Kabupaten Merauke dinilai banyak terjadi pelanggaran dan tidak berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, dibantah keras Ketua Panpil Dapil X Ch F Wambrauw. Ia mengatakan kalau pemilihan anggota MRP yang dilakukan di Dapil X sudah sesuai aturan yaitu Perdasu no.4 tahun 2005 tentang tata cara pemilihan anggota MRP.
- ❖ Adanya Fenomena bahwa lembaga agama menolak pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), rupanya membuat pemerintah Papua segera mengambil sikap. Hal itu dibahas dalam suatu rapat tertutup dengan tokoh agama yang dipimpin langsung oleh Gubernur Dr JP Salossa, M.Si. hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Pangdam XVII Trikora Mayjend TNI George Toisutta, Kapolda Papua Irjen Pol D. Soemantyan serta sejumlah instansi terkait Kakesbang J Wimpie Wolla, Panpil MRP Provinsi Papua Tony Rahail, Ketua MUI Provinsi Papua Drs. H. Zubeir Daeng Hussein, wakil dari Katolik Pastor Yan You, Pr dan sejumlah tokoh agama dari Kristen Protestan Pdt. Elfius, S.Th dan Pdt. Ayomi S.Th.
- ❖ Walaupun pemilihan calon anggota MRP daerah pemilihan (Dapil) XIV dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme, artinya bahwa calon MRP di wilayah pemilihan XIV ditunjuk langsung oleh masing-masing Kepala Distrik dan tanpa melalui pemilihan langsung, namun tetap dianggap sudah final, dan akan diadakan pelantikan anggota MRP terpilih. Hal ini diungkapkan salah satu anggota Panwas MRP kabupaten Nabire Marthen.

18 Oktober

- ❖ Pemilihan 4 perwakilan calon anggota MRP dari unsur agama Katolik telah ditetapkan dalam rapat musyawarah perwakilan umat Katolik yang digelar di Jayapura. Musyawarah itu berhasil memilih 8 bakal calon (balon) anggota MRP yang diajukan ke Panitia pemilihan untuk diverifikasi dan dilanjutkan akan ditetapkan menjadi 4 orang sebagai calon dari unsur agama Katolik. Adapun kedelapan orang yang diajukan ke Panpil MRP tingkat Provinsi itu antara lain, Drs. Agus Alua, M.Th,

Vitalis Yumte S.Pd, Dra. Bernadetha Mahuze, Drs. Philip Degey, Yusan Yeblo, Frans Waine, S.Pd, Yosep Hae dan Donatus Tomot.

- ❖ Rencana Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat dan KPUD IJB untuk melaksanakan Pilkada Gubernur tanggal 22 Oktober mendapat tanggapan serius dari Ketua Pansus Pilkada DPRP Provinsi Papua, Yan Ayomi, S.Sos. Menurut Ayomi, proses pembentukan dan pelaksanaan Pilkada di IJB haruslah didasari dengan semangat UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus, “sesuai dengan ketegasan Presiden” jadi dalam waktu dekat ini Provinsi IJB tidak dapat melaksanakan Pilkada.
- ❖ Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Manokwari, menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati kepada DPRD. Dimana hasilnya, pasangan Drs. Dominggus Mandacan – Ir. Dominggus Bonay tampil sebagai pengumpul suara terbanyak mengungguli 3 kandidat lainnya. Penyerahan hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam SK KPUD Manokwari No.6 Tahun 2005, tertanggal 17 Oktober ini dilangsungkan dalam rapat di kantor DPRD Manokwari. Seperti diketahui, hasil pilkada Bupati/Wakil Bupati, yakni, Herman - Ali meraih 8.116 (8,65%), Sorbu - Rumkorem 1.832 (1,95%), D.Mandacan – Bonay 76.238 (81,28%).
- ❖ Hasil survey Transparency International (TI) yang dipublikasikan belum lama ini, Indonesia masuk negara ke 2 terkorup untuk negara di kawasan Asia Tenggara. Dari laporan yang dilansir TI Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya 2,2 atau hanya lebih baik dari IPK Myanmar 1,8. Padahal Myanmar jauh lebih miskin dan terbelakang.
- ❖ Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Papua, Drs. H. Subechi mengatakan, sejak bergulirnya isu pelanggaran HAM di Indonesia terutama HAM berat baik secara individual maupun kelembagaan, muncul kesan di masyarakat Internasional bahwa Indonesia kurang peka terhadap masalah HAM. Kesan masyarakat Internasional itu telah diantisipasi pemerintah Indonesia dengan berbagai langkah pembinaan baik secara hukum maupun kelembagaan yang meliputi, amandemen yang meliputi UUD 1945 (pasal 28a-28i), ketetapan MRP No. XVII/MRP/1988 khusus mengenai HAM, UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi, penghapusan diskriminasi terhadap wanita/perempuan, Keppres No. 50 Tahun 1993 berdirinya Komisi Nasional HAM.
- ❖ Kasus dugaan korupsi senilai 1,2 M oleh terdakwa Hamzah dan Cristina Tarupono masing-masing sebagai pimpinan proyek dan bendahara Proyek Peningkatan Usaha Kesehatan (PUK) tahun 2004 pada Dinas Kesehatan kembali digelar di Pengadilan Negeri Wamena.
- ❖ Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Nabire, Pieter F. Worabay menjelaskan HPH-HPH yang ada di Kabupaten Nabire tidak mensejahterahkan masyarakat setempat, padahal dalam UU No.41 tentang kehutanan dan Undang-Undang Otsus itu sudah cukup jelas diatur tentang adanya dana bina desa yang hingga sekarang belum dibayar.

19 Oktober

- ❖ Kepala Kesatuan Bangsa (Kesbang) Provinsi Papua Wempi Wola mengungkapkan rencana penyerahan nama-nama calon anggota MRP akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada hari Kamis (20/10) atas permintaan Mendagri, baik dari unsur Adat, Agama maupun unsur Perempuan.
- ❖ Sementara itu dalam waktu dekat ini Panpil akan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah maupun pemerintah Pusat tentang dampak hukum yang ditimbulkan dari proses pemilihan anggota MRP khusus untuk wakil adat dan wakil perempuan, dimana tingkat keabsahan proses pemilihan anggota MRP secara

hukum dibereskan Danpil sudah sangat meragukan sekali. Jelas Ketua Pokja Wakil agama Godlief Mansi,SH.

- ❖ Menyingkapi masa jabatan Gubernur Provinsi Papua Dr. JP Salossa M.Si yang berakhir pada tanggal 23 November 2005, Dr. John Manangsang salah satu anggota Farksi Pembaharuan DPR Papua, berharap agar Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang hingga saat ini belum dilakukan agar segera dilakukan. Ia menilai pelaksanaan sidang LKPJ ini sebenarnya sudah terlambat dan terkesan kurang disingkapi.
- ❖ Mantan Wakil Ketua III DPRD Merauke, Febianus Binjab, SH akhirnya diperiksa kembali dengan status tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan keuangan negara yang terjadi di DPRD Merauke tahun 2004 lalu.
- ❖ Kalau Cagub IJB Yorrys Raweyai pesimis Pilkada Gubernur IJB dapat dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2005, pandangan berbeda dikemukakan Cagub Bram Atururi, menurutnya Pilkada harus dilaksanakan 22 Oktober karena ini merupakan kesempatan terakhir terkait dengan kesibukan warga masyarakat menyambut Idul Fitri.
- ❖ Sama seperti pernyataan-pernyataan yang dikemukakan disaat masih menjabat Pjt Gubernur IJB, Bram pun tak setuju bila Pilkada harus menunggu terbentuknya MRP. Menurutnya masalah politik pembentukan MRP inilah yang mengakibatkan Pilkada IJB mundur dan sampai saat ini belum jelas kapan dilaksanakan. “MRP menurut sepengetahuan saya, sampai kapanpun akan menjadi perdebatan yang sangat seru di Provinsi Irian Jaya Barat. Menurut pandangan saya, MRP ini bukan segala-galanya”.
- ❖ Komisioner Hak Kesehatan dan lingkungan, Komnas HAM Pusat, Anshari Thayib minta agar Pemerintah Provinsi Papua serius menangani masalah kesehatan di Papua. Di tempat yang sama, Ketua Divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frist Ramadey,S.Sos mengatakan kebijakan Pemerintah Daerah telah memberikan perhatian terhadap sektor kesehatan dan dipandang perlu ditindaklanjuti.
- ❖ Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Bagus Sukaswara W mengatakan, masih tingginya kasus Tuber Culose (TBC) di Papua disebabkan para pasien dalam melakukan pengobatan tidak teratur.
- ❖ Puluhan masyarakat Sarmi yang berdomisili di kota Jayapura dan sekitarnya yang berjumlah 20 orang mendatangi kantor Gubernur Provinsi Papua melakukan aksi menentang kepemimpinan Bupati terpilih Drs. Eduard Fonataba MM. Massa yang mengatasnamakan diri sebagai Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sarmi yang di koordinir oleh Isak Samuel Kapelele. Sementara itu, aksi demo tersebut ditentang keras oleh Ketua Dewan Adat daerah Kabupaten Sarmi Pdt. Konrad Kreeuw,S.Th, “ sesuai dengan hasil rapat Pleno Dewan Adat Sarmi maka secara hukum Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sarmi – Membramo yang terbentuk tahun 1997 dan dipimpin oleh Zakarias Sakreway yang berkedudukan di Jayapura dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi. Sementara itu tentang tuduhan yang dikeluarkan dalam aksi demo tentang terjadi tindakan korupsi oleh Bupati Sarmi maka Pemda Sarmi akan mengadakan tuntutan balik ke pengadilan.

20 Oktober

- ❖ Gubernur enggan berkomentar terhadap komentar sejumlah anggota DPRD di media karena LKPJ tersebut sudah diserahkan eksekutif kepada legislatif sejak 4 bulan lalu, jadi aneh kalau anggota DPRD sendiri tidak tahu. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Pansus LKPJ, Indrus Kalwani.

- ❖ Sekjen MUI Provinsi Papua Dr. H. Basri Umar MS. Mengungkapkan bahwa unsur dari agama Islam menyisahkan penempatan jumlah kuota yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 8 dan pasal 23 ayat 5 Perda nomor 4 tahun 2005 dan mengusulkan ke Panpil MRP agar dari unsur Islam ditambah menjadi 7 nama calon anggota MRP.
- ❖ Rencana Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) Provinsi Papua menyerahkan nama-nama calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ditantang keras Sekretaris Pansus MRP Ir. Weynand Watori. Watori mengingatkan Kesbang agar tidak tergesa-gesa mau menyerahkan nama-nama anggota MRP kepada Pemerintah Pusat karena proses pemilihan tidak berjalan sesuai aturan menurut masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan dari masyarakat sehingga ini dapat menciptakan konflik.
- ❖ Salah satu Tokoh agama Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Pdt. Ellion Numbery, S.Th mengungkapkan “bahwa kuota anggota MRP untuk Agama dari perwakilan Kristen Protestan yang hanya 8 orang dirasa perlu ditinjau ulang karena mengingat denominasi gereja yang bernaung di bawah Gereja Protestan cukup banyak demikian juga umatnya, misalnya jumlah gereja/jemaat untuk GPdI saja mencapai 505 jemaat dengan jumlah umat 56.000 ribu, belum lagi gereja atau dominasi lainnya”, terangnya.
- ❖ Terkait dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf yang mengatakan bila sampai 20 Oktober 2005 anggota MRP belum dilantik, maka Pilkada Papua dan IJB bisa dilakukan. Hal ini mendapat tanggapan dari praktisi hukum Uncen Bambang Sugiono SH, MH. Bambang mengatakan, bahwa hal ini sangat menyalahi aturan terutama amanat UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Peraturan Daerah Provinsi No.04 tahun 2005 tentang tata cara pemilihan anggota MRP.
- ❖ Ketua Pengadilan Tinggi Papua (PT) Jayapura, I Gusti Ngurah Suparka, SH mengatakan, keputusan mengenai kasus gugatan beberapa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terhadap KPUD Kabupaten Mappi yang membuktikan bahwa KPUD Kabupaten Mappi tidak bersalah. Oleh karena itu, “Putusan PT Jayapura No.10/PDT/PILKADA/2005/PT.JPR yang diputuskan 11 Agustus 2005 adalah bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum sehingga harus dieksekusi”.
- ❖ Dana operasional setiap Puskesmas sebesar Rp.50 juta, dipertanyakan. Pasalnya dana yang seharusnya dikucurkan ke masing-masing Puskesmas itu, hingga saat ini baru sekitar Rp 7 juta yang disalurkan, padahal anggaran 2005 sudah hampir berakhir. Hal itu diungkapkan, Ketua Komisi B DPRD kota Jayapura, Elli Karuri, SE.
- ❖ Bupati Biak Numfor yang juga Ketua KPAD Biak, ADrianus Kafiar SE, mengatakan penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Biak Numfor sudah masuk pada taraf yang mengkhawatirkan. Parahnya lagi menurut Adrianus hampir sebagian besar kasus-kasus HIV/AIDS yang diketemukan di Kabupaten Biak Numfor dialami oleh masyarakat yang berada di pedesaan. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penyebaran penyakit tersebut membuat masyarakat kurang memahami upaya atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan.
- ❖ Sekitar 70 orang massa yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Perempuan Tolikara mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) guna meminta Pansus MRP untuk menindaklanjuti dan membatalkan hasil pemilihan anggota MRP di daerah pemilihan (Dapil) VI masing-masing Kabupaten Tolikara dan

Jayawijaya yang dinilai tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni Perda No.4 tahun 2005.

- ❖ Meski pemilihan calon anggota MRP di daerah pemilihan (Dapil) XIV sudah dinyatakan final, namun Ketua DPRD Nabire Daniel Butu menilai bahwa dua orang yang terpilih itu, yakni: Eddy Tebay yang mewakili unsur Adat dan Marion Gobay yang mewakili unsur Perempuan, dinilai sama sekali tidak dilakukan sesuai dengan tahapan pemilihan yang termuat dalam Perdas. Bahkan Daniel Butu dengan tegas mengatakan, terpilihnya kedua orang tersebut sama sekali bukan atas nama masyarakat yang ada di Dapil XIV tetapi hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, atau kepentingan kelompok oportunistik.

DAPIL	NAMA CALON TERPILIH
Dapil I	1. Dominggus Sani 2. Frida Tabita KIASim,SH
Dapil II	1. Drs. Salmon Kambuaya 2. Ani Sabani
Dapil III	1. Septer .H. Serimbe 2. Ruth A.Kurubuy
Dapil IV	1. Ir. Frans Wopakrik 2. Dra. Mientje Rumbiak
Dapil V	1. Yoseph Simonapendi 2. Marice J. Oropa
Dapil VI	1. Odolof Kogoya 2. Sarinda Pagawak
Dapil VII	1. Engeberthus Kasibmabin 2. Orpa Yohane
Dapil VIII	1. Ferdiand Tuamis 2. Yakoba Tjo-e
Dapil IX	1. Martinus Buaim 2. Dra.Hana S.Hikoyabi
Dapil X	1. Kasimirus Gebze 2. Martha Olap
Dapil XI	1. Donatus Pombai 2. Dra. Olga Adu
Dapil XII	-
Dapil XIII	1. Alpius Murib 2. Yopina Magal
Dapil XIV	1. Eddy Tebay S.Sos 2. Marion Gobay

- Belum termasuk Calon dari keagamaan.
- Sumber sekretariat Panpil Anggota MRP Provinsi Papua.

21 Oktober

- ❖ Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bapedalda Provinsi Papua, Ir. Michael Mantiri, MSi mengatakan cagar alam Cycloop sudah memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena pemukiman liar, penambangan liar, penebangan liar, pendangkalan akibat erosi dan sedimentasi, gulma dan

pembuangan limbah cair domestik tanpa kontrol dan penyakit menular melalui media air merupakan sejumlah kondisi yang terjadi di daerah cycloop.

- ❖ Kendati Presiden memberikan *deadline* waktu pembagian dana kompesasi BBM kepada rakyat miskin harus berakhir bulan Oktober, namun penyaluran dana miskin di Papua baru mencapai 6,71 persen. BPS Papua minta dispensasi waktu sampai Desember mengingat begitu banyak kendala yang dihadapi dilapangan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPS Provinsi Papua, Ir.Djarot Soetanto,MM.
- ❖ Melihat kondisi yang terkesan memaksakan pembentukan MRP sehingga asal terbentuk, John Manansang yang juga Ketua DPD Partai PNBK Provinsi Papua mengusulkan supaya untuk kali pertama status MRP hanya sementara. Hal ini dimaksudkan agar anggota MRP yang sementara ini dapat meluruskan dan memberikan penafsiran terhadap UU Otsus tahun 2001 bagi Papua, termasuk Perdatus secara baik dan benar.
- ❖ Wakil Gubernur Drh. Constan Karma sangat menyayangkan karena masih banyak pejabat publik yang tidak peduli dengan penyebaran HIV/AIDS di Papua. Bahaya penyebaran HIV/AIDS di Jayapura sudah sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun oleh KPA Provinsi Papua jumlah kasus HIV/AIDS di Papua telah mencapai 2134 kasus. “ Bila dibandingkan prevalensi Nasional yang mencapai 1,83 persen kasus HIV/AIDS di Papua perseratus ribu penduduk ada 28 persen kasus HIV/AIDS. Kita di Papua yang tertinggi. KPA juga memprediksikan bahwa kasus HIV/AIDS di Papua telah mencapai 11.000 ribu kasus namun belum terdeteksi.kita harap prediksi ini tidak benar jika benar akan menjadi bencana sosial” ungkapnya.

22 Oktober

- ❖ Usulan “Majelis Rakyat Papua (MRP) sementara” seperti yang dilontarkan Ketua DPD Partai PNBK Provinsi Papua Dr John Manangsang, sebagai alternatif solusi pembentukan MRP yang terkesan *deadlock*, ditanggapi Gubernur Provinsi Papua Dr. JP Salossa M.Si. Menurut Solossa, karena pembentukan MRP telah sesuai dengan prosedur aturan yang ada dengan demikian, MRP sekarang ini tidak ada sistem MRP sementara”.
- ❖ Penetapan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) tinggal penetapan yang tidak ada realisasinya di lapangan. Untuk yang kesekian kalinya KPUD Provinsi Irian Jaya Barat harus bertepuk sebelah tangan. Usulan lembaga penyelenggara Pilkada ini yang menetapkan pemilihan Gubernur/ Wagub pada tanggal 22 Oktober kembali gagal karena tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Pilkada IJB pertama direncanakan tanggal 27 Juni, kemudian 28 Juli dan tertunda sampai sekarang.
- ❖ LP3BH Manokwari mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit dan memeriksa penggunaan dana milik rakyat Papua untuk pembiayaan pembentukan MRP (Majelis Rakyat Papua) baik yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua dan Kabupaten /kota maupun instansi lainnya. Sebab menurut Direktur LP3BH, Yan Christian Warinussy dalam pernyataan persnya Manokwari pos, ada informasi menunjukkan, persetujuan DPRP dialokasikan dana mendekati Rp.70 M untuk pembentukan MRP. Menurutnya dana sekian besar mengundang kecurigaan karena sangat berpotensi menjadi lahan korupsi besar-besaran.
- ❖ Pengiriman wanita asal Manado ke Sorong selama ini secara illegal seperti tersembunyi dengan rapih. Palsanya diduga kuat instansi terkait ikut melindungi

padahal cukup banyak wanita Manado yang dipekerjakan di bar dan café masih di bawah umur.

24 Oktober

- ❖ Tertundanya agenda Nasional yakni Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2005-2010 yang sampai saat ini belum jelas, mendapat perhatian dari Gubernur Dr. JP Salossa, M.Si. “Saya juga tidak paham dengan sikap DPRP yang tidak jelas itu”. Ia minta agar semua pihak meletakkan persoalan ini pada kepentingan daerah, bukan untuk kepentingan siapapun atau golongan manapun. Kalau toh DPRP hendak menunda Pilkada, Gubernur mempersilakan namun, hendaknya DPRP harus menyampaikannya dalam sikap resmi atau keputusan resmi.
- ❖ Forum Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat (FPMM) Papua suksesi bakal calon (balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, S.IP – Drs. Muhammad Musa’ad, M.Si dideklarasikan di Honai Adat Sekretariat bersama, Abepura. Acara pendeklarasian ini dihadiri oleh sekitar 100 warga masyarakat, mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam FPMM Papua.
- ❖ KPUD Provinsi Irian Jaya Barat dinilai telah membingungkan masyarakat atas penetapan jadwal Pilkada, namun kemudian tak terlaksana karena tidak disetujui Pemerintah Pusat. Terutama lagi dengan pernyataan-pernyataan Ketua KPUD, Ny.Regina Suayai yang seolah-olah mengatakan KPUD merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan jadwal Pilkada. Penilaian ini dilontarkan Amos H May selaku Ketua Tim Sukses Yorrys Raweyai – HM Killian, ia bahkan mendesak agar Ny.Regina Suayai mundur dari jabatan sebagai Ketua KPUD IJB serta Sudarman mundur sebagai sekretaris KPUD IJB.
- ❖ Sejumlah proyek di instansi Provinsi Papua ternyata tidak berjalan baik di daerah bahkan ada yang tidak terealisasi sama sekali. Hal tersebut diungkapkan anggota komisi B DPRP Provinsi Papua, Jubelina Watopa Wona. Masalah tersebut antara lain adalah proyek pengelolaan Taman Burung / Taman Angrek (TBTA) di Biak Numfor yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan anggaran sekitar Rp.800 juta. Diturunkan proyek ini tidak berjalan dengan baik, terlihat banyak burung yang mati karena kekurangan pakan ternak. Selain itu honor karyawan sebanyak 34 orang yang bekerja di TBTA sudah 4 bulan terakhir ini belum terbayar.
- ❖ Eksekutif Yayasan Bina Mandiri Utama (Yabimu), Ambrosius Degey, SH mengungkapkan, bahwa pola alokasi anggaran APBD di Kabupaten Nabire dinilai ada kesenjangan yang cukup signifikan. Bahkan dari total dana APBD 2004, dari total dana APBD tahun 2004 sebesar Rp 375 miliar, untuk program pembangunan yang menyentuh masyarakat hanya dianggarkan 55 miliar, sedangkan untuk belanja rutin menyerap dana hingga Rp 225 miliar dan belanja taktis Bupati mencapai Rp 75 miliar .
- ❖ Melihat kondisi dan situasi yang dialami perempuan Papua, dimana masih banyak yang mengalami tindakan-tindakan diskriminasi, menimbulkan inspirasi dari aliansi demokrasi Papua (ALDP) untuk membuat film dokumenter dengan menampilkan 4 tokoh perempuan (Mama Yusan Yeblo, Mama Alama Mampiooper, Mama Yosepha Alamong dan Mama Beatrix Koibur Rumbino (Alm), yang diberi judul “Kitorang Pu Mama”. Secara umum ada 3 hal pokok yang ditonjolkan dalam film ini yaitu: ketidakadilan adat terhadap perempuan, kekerasan negara terhadap perempuan dan keserakahan kapitalis terhadap perempuan.

25 Oktober

- ❖ Tak puas dengan penanganan kasus-kasus narkoba dan korupsi selama ini, sekitar 40 massa yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Papua Anti Korupsi (Komppak) melakukan unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Negeri Jayapura. Dalam demo yang dipimpin Robert Seseray mendesak agar kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura segera melakukan proses hukum terhadap kasus-kasus korupsi dan kasus narkoba, yang kesannya selama ini dibiarkan, dan menindak tegas jaksa dan hakim yang terlibat suap. Dalam aksi selanjutnya di Pengadilan Tinggi Negeri Jayapura, Ketua PN Jayapura mengatakan bahwa ada empat kasus illegal logging yang saat ini belum diputuskan setelah ketua lama dimutasikan termasuk kasus – kasus lainnya.
- ❖ “Pernyataan-pernyataan Gubernur JP Salossa bahwa molornya jadwal Pilkada diakibatkan oleh banyaknya kepentingan anggota DPRD tanpa memperhatikan kepentingan daerah, sesungguhnya tidak tepat mengingat baik Pansus Pilkada Gubernur yang ada di DPRD maupun Pimpinan DPRD adalah tim suksesnya pasangan bakal calon Gubernur Provinsi Papua Jp.Salossa dan Paskalis Kosay”, jadi sebaiknya jangan salahkan DPRD secara kelembagaan. Hal ini diungkapkan seorang anggota Komisi E- DPRD Dr.John Manangsang.
- ❖ Sementara itu secara terpisah Sekretaris Pansus Pilkada DPRD, Drs. Danang Jaya mengatakan tertundanya jadwal pelaksanaan Pilkada karena menunggu terbentuknya MRP.
- ❖ Mejelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura, akhirnya memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Yapen Waropen tidak terbukti bersalah dalam sidang gugatan yang diajukan calon Bupati Kabupaten Yapen Waropen Marianus Worabai dan calon wakil Bupati Drs.Baharuddin Pohan.
- ❖ Pengucuran dana program pengembangan kecamatan (PKK) ke masing kecamatan (Distrik), mulai dipertanyakan. Pasalnya, anggaran 2005 ini tinggal dua bulan lagi, sementara dana PKK fase ke tiga belum dikucurkan. Kepala Distrik Abepura, Drs.Benhur Tommy Mano,MM saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum tahu kapan dana PKK sebesar 1 miliar yang akan diterima pihaknya itu dikucurkan.
- ❖ Jatah Dana Otsus untuk pemerintah kota Jayapura sebesar Rp.27,1 miliar hingga kini belum semua dikucurkan, sementara anggaran 2005 tinggal 2 bulan lagi. Walikota Jayapura, Drs. MR Kambu, M.Si mengaku tidak mengerti kenapa dana Otsus triwulan ketiga belum cair semuanya, “Yang baru dikucurkan sebesar Rp.10,18 miliar (37,6%), sisanya sekitar 16,8 miliar belum dikucurkan. Pengaruhnya cukup besar terhadap penyelesaian program pembangunan yang dibiayai oleh dana Otsus”.
- ❖ Guna meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit, Pemda Provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp.100 miliar. Direktur RSUD Jayapura, Dr Paulina Watopa membenarkan hal tersebut. Dari jumlah tersebut dialokasikan sejumlah kegiatan antara untuk pembiayaan operasional pelayanan rumah sakit sebesar Rp.40 miliar, untuk operasional 3 Puskesmas sebesar Rp.1,5 miliar, untuk RSUD Abepura dan RSJ (rumah sakit jiwa) sebesar Rp 25 miliar serta sejumlah kegiatan fisik lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk alat proteksi HIV/AIDS.
- ❖ Sekitar 100–an lebih masyarakat adat Hokoi Tembu Nendali/Netar, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura mendatangi kantor Gubernur meminta Gubernur Papua segera mengembalikan tanah adat milik mereka seluas 42 hektar yang dinilai sudah digunakan Pemerintah Daerah selama 21 tahun, tetapi tidak pernah ada biaya ganti rugi.

26 Oktober

- ❖ Panwas Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua menanggapi serius banyak pendirian sekretariat maupun posko bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan maju dalam Pilkada Provinsi Papua. Anggota Panwas Pilkada Provinsi Papua Muslim,SH,MM menuturkan pendirian sekretariat/posko tim sukses dari kelima pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sangat rawan konflik di kalangan masyarakat bawah yang kecewa jika pasangan bakal calon yang diajukan tidak lolos. Karena yang sementara ini belum ditetapkan sebagai calon tetap, katanya.
- ❖ Kapolres Manokwari AKBP Drs. Petrus Waine,SH membenarkan kalau jajarannya telah menerima pengaduan dari Yan Christian Warinussy,SH selaku kuasa hukum Bupati/ Wakil Bupati terpilih Kabupaten Teluk Bintuni Drg. Alfons Manibuy – Akuba Kaitam terkait beredarnya selebaran yang diindikasikan telah mencemarkan nama baik Drg. Alfons Manibuy.
- ❖ Mendagri M Ma'ruf telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat, Ir.Timbul Pujianto yang intinya sudah memberikan lampu hijau tentang Pilkada Provinsi IJB, menurut sumber yang dipercaya setelah dikonfirmasi hanya saja surat konfirmasi tersebut Mendagri tidak menyebutkan atau menetapkan tanggal yang pasti tentang pelaksanaan Pilkada Gubernur/Wagub di Provinsi Irian Jaya Barat.
- ❖ Ketua Pelaksana Yayasan Solidaritas Perempuan Papua di Biak, Helena Muabuay,SH mengatakan proses perekrutan calon anggota yang dimulai dari tingkat kampung sampai ke tingkat daerah pemilihan khusus di Dapil IV yang meliputi kabupaten Biak Numfor dan kabupaten Supiori tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang tertuang dalam Perdasi nomor 4 tahun 2005.
- ❖ Gubernur JP Salossa, M.Si memastikan pelaksanaan pelantikan anggota MRP akan dilaksanakan pada 29 Oktober 2005. Signal yang sama juga diungkapkan Ketua Panpil Anthon Rahail, SE.

27 Oktober

- ❖ Ketua KPUD Papua, Ferry Kareth, SH, M.Hum meminta agar DPRP menyampaikan sikap resmi kepada KPUD terkait rencana penundaan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua. Pemberitahuan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur dan diteruskan kepada Presiden.
- ❖ Sesuai dengan surat Mendagri nomor 120.82/2717/SJ, tertanggal 24 Oktober 2005 yang ditujukan kepada pejabat Gubernur Irian Jaya Barat (IJB) dan ketua DPRD IJB, Mendagri meminta agar pelaksanaan Pilkada di IJB di jadwalkan pada Minggu ke-4 atau ke-5 November 2005.
- ❖ Ratusan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi melakukan aksi demo di kantor DPRD IJB, meminta Ketua KPUD IJB diganti antar waktu karena jadwal Pilkada Gubernur IJB yang tidak jelas.
- ❖ Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jayapura, Demianus Yantewo mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak guru di sejumlah Distrik tidak melaksanakan tugasnya namun tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri.
- ❖ Tidak jelasnya penanganan kasus dugaan korupsi Bupati Jayawijaya Drs. David Agustinus Hubi membuat 16 orang perwakilan Tim Mahasiswa dan Rakyat Peduli Pembangunan Kabupaten Jayawijaya mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Dalam kesempatan itu Agus Alua selaku jurubicara menyampaikan pernyataan sikap mengenai penanganan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Jayawijaya untuk segera ditindaklanjuti karena disinyalir ada pihak-pihak yang bermain dalam kasus tersebut.

28 Oktober

- ❖ Rencana pelantikan anggota MRP yang sudah matang, kini molor lagi. Jika sebelumnya direncanakan hari Sabtu 29 Oktober 2005, dipastikan molor. Hal ini dibenarkan Sekretaris MRP Drs. Ibrahim IS Badaruddin, M.Si.
- ❖ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur sudah tidak lama lagi. Hanya saja, masih banyak masyarakat yang tidak terdata dengan baik sebagai pemilik tetap. Terkait dengan itu, Gubernur Provinsi Papua Dr. JP Salossa, M.Si kembali mengingatkan segenap aparat pemerintah supaya benar-benar memperhatikan jumlah pemilih ini.
- ❖ Operasi gabungan yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua bersama pihak kepolisian, berhasil menyita beberapa satwa yang dilindungi negara dari beberapa penjual dan pemilik di Kota Jayapura.
- ❖ Dr. John Manansang dari anggota Fraksi Pembaharuan DPRP tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Ketua Pansmus yang hanya mengatakan memberikan catatan atau rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Papua. Tapi sebenarnya harus memperoleh kejelasan dari Gubernur kalau memang dinilai apa yang tidak jelas, Ia menambahkan banyak persoalan yang terkait dengan Otsus perlu dijelaskan. Seperti jawaban pemerintah dan DPRP sendiri atas ketidakpuasan masyarakat adat dalam hal ini (Dewan Adat Papua) yang saat ini belum jelas.
- ❖ Laporan hasil kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang dibacakan oleh Damianus Yantewo menyebutkan bahwa saat kasus *illegal logging* belum mencapai titik penyelesaian yang jelas. Kayu-kayu di hutan Jayapura ini kembali dieksplotasikan oleh kelompok-kelompok tertentu. Beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan diantaranya adalah masuknya 50 unit chainsaw di Distrik Kaureh yang belum jelas masalahnya.
- ❖ Untuk ke empat kalinya, Front Pepera PB kembali melakukan aksi demo untuk menuntut pemubaran MRP, karena dianggap sebagai boneka bentukan rekayasa buatan Pemerintah. Dalam orasinya, para pendemo menilai bahwa hak-hak penduduk asli Papua dimanipulasi oleh pemerintah, melalui Pemerintah Otsus ini, sehingga demokrasi tidak berjalan sepenuhnya.
- ❖ DPR RI akhirnya mengesahkan UU APBN 2006 dan menaikkan gaji PNS, TNI / Polri 15 persen, sedangkan pejabat 5 persen.
- ❖ Gubernur Provinsi Papua, Dr. JP Salossa melantik pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yahukimo, Ones Pahabol, SE.MM dan Ir. Daniel Rendeng.
- ❖ Kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan bakal mempengaruhi angka pengangguran. Bahkan diprediksikan dalam tiga bulan ke depan ini, angka pengangguran di kota Jayapura akan mengalami kenaikan. Hingga saat ini terdapat sekitar 19.000 pencari kerja yang ada di kota Jayapura. Mereka itu mulai dari yang berijasah SMP, SMA / SMK, diploma, S1 dan S2.
- ❖ Salah satu anggota KNPI Cabang Merauke, pada upacara HUT Sumpah Pemuda 28 Oktober 2005 yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Merauke menyatakan sikap mendukung rencana Pemerintah dan DPRD Merauke untuk menjadikan Merauke menjadi Provinsi Papua Selatan pada tahun 2007.

29 Oktober 2005

- ❖ Ternyata dana pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak sedikit jumlahnya. Sebab total dana yang dihabiskan untuk pembentukan MRP sebanyak 76 miliar. Peruntukan dana itu mulai dari tahapan Sosialisasi, TOT, proses perekrutan dan pelantikan Panitia Pemilihan (Panpil) dan panitia pengawas (Panwas) MRP mulai dari tingkat Provinsi / Kota / Kabupaten / Distrik / Kampung, sampai pada proses

pelaksanaan pemilihan anggota yang akan dilaksanakan dan difasilitasi langsung oleh Badan Keasatuan Bangsa (Kesbang) Provinsi Papua. Terkait itu sekretaris Pansus MRP DPR Papua, Ir.Weynand Watory meminta Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengaudit penggunaan dana pembentukan MRP tersebut. “Meningkat penggunaan dana pembentukan MRP yang difasilitasi dan dikelola langsung oleh Kesbang Provinsi Papua berindikasi kuat telah terjadi penyalahgunaan”.

- ❖ Masyarakat di Kota Nabire mendesak DPRP segera melantik Panwas Distrik se-Papua, karena belum dilantiknya Panwas Distrik akan memberikan ruang gerak tim sukses dari ke lima bakal calon Gub/Wagub Provinsi Papua untuk mempengaruhi masa baik secara terbuka maupun terselubung.
- ❖ Berbagai pernyataan yang dilontarkan Sekretaris Pansus MRP Ir. Weynand Watory bahwa anggota yang terpilih perlu diklarifikasikan ulang karena menurutnya tidak sesuai dengan mekanisme rupanya membuat prihatin anggota MRP terpilih. Salmon Kambuaya mengaku sangat dilecehkan dengan pernyataan Watory tersebut dan menilai bahwa pernyataan tersebut sarat dengan kepentingan politik lain selama ini, pemilihan MRP sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur, ujarnya.
- ❖ Sementara itu Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Socratez Sofyan Yoman, sangat sependapat dengan apa yang dikatakan Ir. Weynand Watory yang menyatakan bahwa MRP yang terbentuk adalah suatu pembohongan dan hasil rekayasa terhadap umat Tuhan di Tanah Papua. “Pernyataan ini sangat benar, karena MRP adalah perwakilan kultural orang asli Papua, sehingga proses dan mekanisme pencalonan serta pemilihan diserahkan penuh kepada orang asli Papua sendiri. Tidak perlu ada intervensi dan tekanan–tekanan dari pihak Pemerintah terutama dari intelejen Indonesia melalui KESBANG.
- ❖ Merasa tidak puas dengan kebijakan Direktur RSUD Dok II Jayapura mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), sekitar 100 orang perawat dan pegawai RSUD Dok II melakukan demo di depan kantor sekretariat RSUD Dok II.
- ❖ Ribuan warga di Jayawijaya adakan pawai damai yang melibatkan semua unsur Agama, untuk menyambut dan memeriahkan festival Wamena 2005.

31 Oktober

- ❖ Setelah menunggu hampir 4 tahun lamanya, akhirnya lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) resmi terbentuk seiring dengan dilantiknya 42 orang anggotanya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) H. Mohammad Ma'ruf, SE di Sasana Krida.
- ❖ Ratusan massa yang mengaku dari Koalisi Rakyat Bersatu (Korapabatu) melakukan aksi demo. Mereka meminta DPRP menjawab pengembalian Otsus pada tanggal 12 Agustus lalu yang hingga kini belum ada jawabannya dan juga mereka dengan tegas menolak pembentukan MRP sebagai tindak lanjut dari Otsus dan PP MRP No.54 tahun 2004. selain menolak MRP dan Otsus mereka menuntut pemerintah pusat melalui kedatangan Mendagri ini agar dibuka suatu dialog bagi masyarakat Papua.
- ❖ Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Tom Beanal mengatakan, bahwa proses pembentukan MRP yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua, hanya untuk satu kepentingan dan satu tujuan, yaitu meloloskan JP Salossa sebagai Gubernur Papua Periode 2005-2010. “Sesuai aturan sebenarnya MRP yang merupakan jiwa dari Otsus itu, sudah harus terbentuk paling lambat 6 bulan dari pengesahan Undang-Undang No.21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Tanah Papua ini, namun apa yang terjadi, hanya dananya habis dipakai oleh para penguasa daerah ini, sementara aturan tinggal aturan, karena tidak dijalankan sama sekali”.
- ❖ Mendagri H.Muhammad Ma'ruf mengatakan sesuai undang-undang, lembaga yang diakui resmi sebagai lembaga budaya orang Papua adalah MRP sehingga MRP-lah

yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan terhadap hak-hak asli orang Papua. "Jadi Dewan Adat Papua (DAP) tidak masuk dalam struktur itu, sebab sesuai UU hak MRP yang diakui sebagai lembaga representatif kultural (budaya/adat) orang asli Papua," jelasnya.

- ❖ Walau KPUD IJB belum mau menyebutkan tanggal pelaksanaan Pilkada Gubernur/Wagub Provinsi Irian Jaya Barat, namun sudah berhembus informasi Pilkada akan dilaksanakan pada Minggu ke empat, tepatnya, hari Sabtu 26 November 2005. tapi Ketua KPUD IJB, Lukas Burung tak mengiyakan. Ia hanya mengatakan, mengenai jadwal itu sedang akan diusulkan kembali ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Mendagri.
- ❖ Mendagri Ma'ruf mengatakan, dirinya banyak memperoleh informasi tentang adanya dugaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten / Kota di Provinsi Papua. Namun ia enggan menyebutkan secara rinci. Mendagri justru mengatakan bahwa Gubernurlah yang banyak tahu di Kabupaten mana saja penyalahgunaan dana pembangunan itu terjadi.
- ❖ Sebanyak 40 massa yang seyogyanya akan melakukan demo menolak MRP di kantor Gubernur, dibubarkan polisi saat berkumpul di pertigaan Bis Tir Pos, Sentani, pukul 8.00 WIT, pemebubaran massa tersebut terkait surat izin untuk menggelar demo tidak sesuai dengan ketentuan.
- ❖ Ketua KPUD Kabupaten Jayapura menyesalkan sikap Panwas Pilkada yang hingga saat ini belum ada tindakan tegas menyangkut pemasangan baliho dan spanduk yang memuat potret bakal calon Gubernur yang marak di kota Sentani.
- ❖ Sebanyak 40-an kepala desa (Kades) se-Kabupaten Biak Numfor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Biak Numfor mendatangi kantor DPRD Biak Numfor untuk membicarakan beberapa masalah, yaitu: mengenai Pilkada Gubernur / Wagub Papua dan persoalan daerah antara lain masalah pesangon kepada 85 kepala desa yang akan mengakhiri jabatannya, LKPJ Bupati, pembelian KM.Yapwairon yang dinilai telah mengandung unsur politik.
- ❖ Puluhan warga Manokwari yang menamakan diri Forum Peduli MRP melakukan demo di Kantor DPRD Manokwari, mereka ini secara tegas mengatakan penolakan terhadap MRP yang dilantik di Jayapura. Massa juga mempertanyakan dana pemilihan anggota MRP Dapil II (Manokwari, Sorong Selatan) yang mencapai 1 miliar. Dana tersebut dinilai terlalu besar bila dibandingkan dengan proses pemilihan yang hanya berlangsung sehari.

1 November

- ❖ Tudingan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Tom Beanal bahwa pembentukan dan pelantikan Majelis Rakyat Papua (MRP) hanya bertujuan untuk meloloskan Dr. JP Salossa, M.Si sebagai Gubernur Provinsi Papua, periode 2005 – 2010 ditanggapi oleh JP Salossa. Ia menegaskan bahwa, sama sekali tidak ada kepentingannya soal pelantikan MRP itu. Sebab, pelantikan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan mekanisme dan untuk kepentingan masyarakat Papua secara keseluruhan, bukan untuk kepentingannya.
- ❖ Kasus flu burung ternyata mulai masuk Papua, khususnya di Manokwari. Hal ini diketahui berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap laporan masyarakat. Virus flu burung ini diduga dibawa oleh ayam adu yang dibawa pemiliknya masuk dari Makasar melalui bandara.
- ❖ Hingga September 2005 ini, masih 10 kasus narkoba yang terjadi di Tanah Papua. Sementara tahun sebelumnya atau 2004 sebanyak 16 kasus dan 2003 sebanyak 17 kasus. Hal ini sebagaimana tertuang dalam data milik Badan Narkotika Papua (BNP). Wakil Ketua BNP Brigjen Pol. FA. Purwoko menjelaskan, peredaran Narkoba

di Papua lebih banyak melalui laut dan di bandara karena lebih muda dan tidak diawasi secara ketat.

- ❖ Gubernur Provinsi Papua, Dr. JP Salossa, M.Si meminta supaya pemberdayaan perempuan terus digalakkan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, baik itu di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gereja dan lembaga-lembaga perempuan yang memang dibentuk untuk memberdayakan kaum perempuan. Hal itu dikatakan Gubernur pada saat membawakan materi pada acara Rapat Kerja (Raker) I Solidaritas Perempuan Papua di Jayapura.

5 November

- ❖ Jadwal penyampaian LKPJ Gubernur yang sudah ditetapkan Panmus DPRP (8 November 2005) akan dibatalkan, mengingat hal itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"kata Ketua Fraksi Gabungan DPRP Ir.Weynand Watori. "Sesuai UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus pasal 8, DPRP mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur atau yang disebut Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur selama lima tahun masa kepemimpinannya bukan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), sehingga sangat keliru jika DPRP menyetujui rencana penyampaian LKPJ oleh Gubernur yang mengacu pada UU No.32 tahun 2004".
- ❖ Kepala Distrik Urunum Guay, Drs. Chris O Muguri mengancam akan menyegel sebanyak 4.300 m³ kayu milik HPH PT.Youlim Sari yang berada di Distrik Urunum Guay. Alasannya, karena penyerahan dana kompensasi hak ulayat masyarakat dinilai tidak beres, karena tidak dihadiri oleh Uspika (Unsur Pimpinan Kecamatan/Distrik).

7 November

- ❖ 21 orang Gerakan Separatis Papua (GSP) menyerahkan diri ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi lewat Muspika Sarmi, Kompi Satgas Rajawali dan Pos Tim Intelrem 172/PWY Sarmi. 2 diantaranya merupakan pentolan (tokoh) GSP/B yang selama ini menjadi target pencarian dan penangkapan pihak TNI, yakni Albertus Catue (Komandan Batalyon GSP/B) dan Manuel Saweri (Wakil Komandan Batalyon GSP/B) Pantai Timur. Menurut ketengan Danrem 172/PWY Kolonel Inf. Asis Wanto, dua pentolan GSP/B tersebut pernah melakukan aksi penyerangan terhadap pos TNI di daerah Takar Pantai Timur 2002 yang menyebabkan 4 anggota TNI dari Kopasus gugur dan membawa kabur beberapa senjata dan juga melakukan hal serupa tahun 2002 yakni melakukan penyerangan terhadap pos TNI dari Satgas Kostrad 415 di daerah Bonggo.
- ❖ 8 orang Gerakan Separatis Papua (GSP) yang menyerahkan diri pada 1 November antara lain, Manuel Saweri (Wadanyon GSP pantai timur (35 th) dari desa Nengke Takar Pantai Timur, Piter Dewemanser (21 th), Tadius Firtar (22 th), Theodorus Wrefar (31 th), Habel Firtar (21), Kostan Wafum (26), Yakobus Dewemanser (25) dan Melki Wrefar (28). Ke delapan orang ini berasal dari desa Nengke Takar Pantai Timur.
- ❖ 12 orang Gerakan Separatis Papua (GSP) yang menyerahkan diri pada 2 November 2005 antara lain, Albertus Catue (Danyon GSP/B) Marvic wilayah Pantai Barat (34), Yakomias Sawenay (31), Melyanus Wenda (31), Piter Sawenay (47), Melaky Warbrar (22), Yusri Warbrar (21), Mikail Oroway (21), Lukas Oroway (24), Yahya Wabrar (25), Kenai Yapo (23), Leo Sawenay (25) dan Mimin Sawenay (27). Mereka berasal dari desa Aruswar Pantai Barat.
- ❖ Proses tender pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit yang dibiayai dana APBD yang dilakukan langsung Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dinilai tidak

transparan dan terkesan tender Aspal (Asli tapi palsu) karena proyek ini dibiayai dana APBN 2005 bukan APBD Provinsi Papua, kata salah satu pengusaha lokal Papua Syamsudhin Mandja.

- ❖ Wakil Walikota Jayapura, H. Sudjarwo, BE mengatakan, maraknya VCD porno dalam masyarakat yang sering menjadi produk yang disukai oleh sebagian besar masyarakat, ternyata salah satu penyebab meningkatnya penyakit HIV/AIDS di kota Jayapura.
- ❖ Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Abner. J. Kambuaya mengatakan, sektor wisata jika dikembangkan dengan baik akan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Hanya saja, pengembangan wisata ini masih terbentur pada hak-hak ulayat masyarakat.
- ❖ Ketua Komisi D DPRD kabupaten Jayapura, Achmad Paito, mengungkapkan bahwa keberadaan tenaga guru bantu yang ada di Kabupaten Jayapura perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Jayapura. “Dari hasil survei kami di sekolah-sekolah, tenaga guru bantu ini lebih berdedikasi dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah-sekolah”, ungkapnya.
- ❖ Ketua Panwas Pilkada IJB, Rudy Maturbongs Msi menilai bahwa pemasangan spanduk ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dari pasangan Calon Gubernur – Calon Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat merupakan kampanye terselubung, tetapi pihaknya tidak bisa melarang karena tidak mempunyai dasar hukum, sebab saat ini dalam tahap ketidakpastian.

8 November

- ❖ Dalam proses pemilihan Ketua MRP berhasil memilih unsur pimpinan masing-masing, Ketua, DR Agus Alua, M.Th (dari unsur agama dengan memperoleh 27 suara); Wakil Ketua I, Ir. Frans Wopakrik, M.Sc (dari unsur adat dengan memperoleh 14 suara) serta Wakil Ketua II, Dra.Hana Hikoyabi (dari unsur perempuan 1 suara).

9 November

- ❖ Pelantikan unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sesuai jadwal kerja MRP akan dilakukan Rabu (9/11) ternyata ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tertundanya unsur pimpinan MRP ini, rupanya masih terbentur soal administrasi SK pelantikan. Hal ini dibenarkan Wakil Ketua I MRP, Ir.Frans Wospakrik, M.Sc. Dikatakannya proses pelantikan unsur pimpinan MRP terpilih itu sudah harus dilakukan oleh Gubernur tetapi kenyataannya tidak bisa, sebenarnya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku pelantikan pimpinan MRP definitif dilakukan Gubernur, sementara administratifnya harus ditandatangani Mendagri.
- ❖ Sementara itu Gubernur Papua, Dr. JP Salossa M.Si mengungkapkan bahwa, saat ini pihaknya masih mencari dasar hukum siapa pejabat yang harus melantik pimpinan MRP tersebut. Apa cukup dengan SK Gubernur atau harus dengan SK Mendagri. Tapi dalam UU No.45 tahun 2005 tentang pembentukan MRP, di situ disebutkan yang melantik adalah Gubernur atas nama Mendagri. Ini berarti SK itu tidak dikeluarkan oleh Gubernur tapi pejabat lain.
- ❖ DPRP mengaku tidak bisa menyerahkan nama-nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ke MRP untuk memberi pertimbangan soal persyaratan orang asli Papua, mengingat sampai saat ini proses pembenahan internal kelembagaan MRP masih terus dilakukan, termasuk menunggu proses pelantikan Ketua MRP. Tegas Ketua DPRP Drs. John Ibo.
- ❖ Merasa aspirasinya tidak ditanggapi pemerintah baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Pemerintah Kota Jayapura serta Pemerintah Provinsi Papua, keluarga besar Suku Yauwe menduduki kantor-kantor Dinas milik Pemda. Penyebab

masyarakat suku Yauwe menduduki kantor dinas Pemkot karena hak ulayat tanah yang di pakai Pemkot dan Pemkab sampai saat ini belum dibayar. Hal ini disampaikan sesepuh Adat Keluarga Besar suku Yauwe, Pieter Yauwe.

- ❖ Kantor Badan Statistik (BPS) Kabupaten Biak Numfor sampai saat ini telah menarik 200-an kartu kompensasi BBM dari warga masyarakat yang dinyatakan tidak berhak mendapatkan kartu tersebut. Kartu kompensasi BBM yang ditarik tersebut, ditarik dari Distrik Biak kota dan Distrik Samofa. Hal ini dikatakan Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor, Abdul Muin Arif S.Sos.
- ❖ Untuk kedua kalinya Gubernur JP Salossa M.Si melantik pejabat Bupati Mappi Drs. Allo Rafra SH (Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi) berdasarkan SK Mendagri Tanggal 25 Oktober 2005 nomor 131/I-962/2005, hingga terbentuk Bupati deventif. Jika sebelumnya Pejabat Bupati yang dilantik adalah Ir.H.E Mackbon,M.Si (Kepala Dinas Kependudukan dan Pemukiman Provinsi).
- ❖ Inti dari otonomi khusus (Otsus) adalah pemberdayaan dan perlindungan bagi Rakyat Papua dalam bingkai NKRI, baik hak politik, pengolahan sumber daya alam dan mengeluarkan pendapat. Demikian disampaikan Gubernur JP Salossa M.Si pada acara sosialisasi kompensasi BBM di aula Dinas P dan P di Kabupaten Nabire.
- ❖ Ditegaskan lagi, bahwa dengan adanya Otsus maka tahun anggaran 2005 diperoleh dana Rp 1,4 triliun dan informasi yang diperoleh pada tahun depan (2006) dana yang disediakan sebesar Rp 2,5 triliun. Sedangkan dana pembangunan infrastruktur untuk tahun depan adalah Rp.280 miliar. Tentunya dengan dana ini memberikan kekuatan bagi daerah untuk membangun Papua, kata Salossa. “Dengan demikian saya yakin dan percaya pada 5-10 tahun mendatang, akan ada perubahan yang signifikan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta perekonomian, “ kata Salossa.
- ❖ Forum Lintas Parpol (FLP) Kabupaten Mimika menilai Ketua KPUD Provinsi Papua, Ferry Kareth,SH M.Hum ‘memperkeruh’ persoalan KPUD tersebut. Oleh karena itu mereka dengan tegas menolak penggantian antar waktu (PAW) yang rekrutmennya sementara dilakukan oleh Bupati Mimika. Hal itu ditegaskan oleh Ketua FLP Kabupaten Mimika Yosep Yopi Kilangin.
- ❖ Alasan dasar penolakan Forum Lintas Parpol (FLP) itu antara lain. Pertama, ketidakjelasan tentang alasan mendasar Surat Bupati Mimika Nomor : 271 / 509, tanggal 18 Oktober 2005 tentang permintaan rekrutmen calon KPUD Kabupaten Mimika, yang ditunjukan kepada Ketua KPUD Provinsi Papua merupakan suatu intervensi kepada lembaga KPUD. Kedua, proses PAW terhadap seluruh anggota KPU Kabupaten Mimika merupakan keputusan sepihak tanpa melalui mekanisme KPU dan perundang-undangan yang berlaku.
- ❖ Forum Peduli MRP (Majelis Rakyat Papua) bersama dengan puluhan ibu-ibu yang dikoordinir Yance Kambu, kembali menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Manokwari memprotes proses pembentukan MRP. Kali ini tututan yang disampaikan bukan saja mempersalahkan mekanisme pemilihan anggota MRP, tapi lebih khusus lagi menyoroti terpilihnya Ny. Ani Sabami sebagai Wakil Perempuan dari daerah pemilihan (Dapil II) yang meliputi Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong Selatan.
- ❖ Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Papua terhadap 5 anggota KPUD Jayawijaya beberapa waktu lalu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen perolehan surat suara atas nama Elisabeth Kogoya dari Partai PDS, sampai saat ini tidak jelas proses pemeriksaannya. Hal ini diungkapkan salah seorang anggota KPUD Jayawijaya Alexander Mauri. Menurutnya akibat ketidakjelasan pemeriksaan yang dilakukan Polda Papua

mengakibatkan proses birokrasi di KPUD Jayawijaya menjelang Pilkada Gubernur berjalan tidak jelas.

10 November

- ❖ Gubernur Provinsi Papua, DR JP Salossa M.Si atas nama Menteri Dalam Negeri Melantik tiga unsur pimpinan MRP, yakni : Drs. Agus Alue Alua, M.Th (Ketua), Ir. Frans Alexander Wospakrik, M.Sc (Waket I), dan Dra. Hana Salomina Hikoyabi (Waket II) berdasarkan SK Mendagri Nomor :220-991 Tahun 2005 tentang pengesahan pengangkatan MRP Masa Jabatan Tahun 2005-2010.
- ❖ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan surat izin kepada Kapolri untuk melakukan tindakan penahanan pada dua bupati yang tersangkut tindak pidana korupsi. Mereka adalah Bupati Jayawijaya Drs. David Agustin Hubi yang terkait penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Jayawijaya 2003-2004 dan Bupati Morowali Andi Muhammad dalam kasus penyalahgunaan anggaran dana pemekaran Kabupaten Morowali dari APBD tahun 2003-2004.
- ❖ Bertepatan dengan Hari Pahlawan dan empat tahun meninggalnya Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), Theys H Eluay, 10 November 2001 yang lalu. Front Parlemen Jalanan Rakyat Papua (FPJRP) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kampus Uncen Abepura. Demo damai yang direncanakan akan menuju ke DPRP untuk menyampaikan beberapa tuntutan politik terpaksa dibubarkan pihak kepolisian.
- ❖ Dalam pernyataan yang dibacakan oleh Jefrison A. Pagawak itu para pendemo tersebut mendesak :
 - a. Pemerintah Belanda untuk membuka fakta sejarah seluas-luasnya dalam tindakan politiknya tanpa mempertimbangkan hubungan diplomatik kedua negara, antara Indonesia dan Belanda.
 - b. Parlemen Belanda agar segera mengundang undangan kajian terhadap sejarah Bangsa Papua Barat. Buka dialog Internasional bagi Rakyat Papua Barat yang demokratis dan bermatahat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan melibatkan seluruh komponen rakyat sipil serta negara-negara yang bersangkutan yaitu Indonesia, Amerika dan Belanda atas status politik Papua Barat yang telah dimanipulasi lewat PEPERA 1969.
 - c. Menuntut pembebasan Tapol/Napol asal Papua Barat tanpa syarat.
 - d. Menuntut pemberian kebebasan yang seluas-luasnya bagi rakyat Papua Barat untuk berorganisasi, menyampaikan sikap politiknya, tanpa adanya politik represif negara secara legal maupun ilegal.
- ❖ Menyingkapi isu akan diumumkannya hasil survey (seminar) Pepera oleh Prof Luck Lefer (dari Institut Den Haag) pada tanggal 15 November 2005 mendatang, maka Jajaran Muspida Provinsi Papua menggelar rapat di Gedung Negara, Jayapura. Rapat ini membahas soal kondisi keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) serta upaya – upaya mengantisipasi yang harus dilakukan terkait akan diumumkannya survey PEPERA. Pertemuan ini lebih pada penekanan agar setiap daerah dapat mengambil langkah-langkah terhadap kemungkinan potensi yang akan terjadi tersebut. Dalam kesempatan ini juga Dr. JP Solossa menyinggung soal banyaknya demo-demo yang marak belakangan ini untuk menuntut keluar dari NKRI. Terhadap aksi seperti ini, Solossa menilai apa yang diperjuangkan itu tidak lagi murni untuk kepentingan rakyat melainkan kepentingannya sendiri, jadi seperti sudah menjadi suatu profesi untuk mendapatkan uang”. Ungkapnya.
- ❖ Dalam Sidang Paripurna LKPJ dan LKPAMJ Gubernur, Fraksi Gabungan dalam pemandangannya dilaporkan Dr. John Manangsang menyoroti dasar hukum pelaksanaan penyampaian LKPJ dan LKPAMJ dalam nota pengantar itu dinilai

sangat bertentangan dengan UU No. 21 tahun 2001, juga secara garis besar menilai bahwa pemerintah daerah belum secara maksimal melaksanakan implementasi Otonomis Khusus secara murni dan konsekuen serta belum berjalan sesuai dengan semangat UU.No.21 Tahun 2001.

- ❖ Isu gender muncul karena terjadi ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin dalam memperoleh manfaat, akses, partisipasi dan kontrol dari kebijakan atau program, sehingga pencapaiannya tidak setara. Hal ini dikatakan peneliti dari Pusat Studi Wanita (PSW) Uncen, Dra. Suriani Subakti M.Si, dalam menyampaikannya materinya pada kegiatan pelatihan gender dan sosialisasi bahan ajaran responsif gender.
- ❖ Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Ka Bakesbang dan Linmas) Kabupaten Manokwari, Elya Murafer S.Sos membantah pernyataan Forum Peduli MRP yang menyebutkan bahwa Kesbang dan Linmas lah yang menentukan keanggotaan MRP dari wakil tokoh adat dan perempuan Daerah Pemilihan (Dapil) II Manokwari – Sorong Selatan. Padahal menurut, Murafer, proses pemilihan anggota MRP ini dilakukan sesuai mekanisme, yakni dari tingkat kampung, Distrik dan Kabupaten.
- ❖ Dalam pers releasenya yang disampaikan oleh anggota KPU Provinsi Papua Yohanes Bonay,SH, Golda Aronggear,SH, dan Pdt.S.Rumbairusi, S.Th menyatakan kaget dengan adanya radiogram yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Provinsi Papua. Yohannes Bonay menegaskan, belum pernah ada rapat pleno di KPU Provinsi Papua yang memutuskan pergantian seluruh anggota KPU Mimika. Sebab, pergantian antar waktu setiap anggota KPU ada mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003.
- ❖ Diduga merugikan negara, Mantan Anggota DPRD Merauke periode 1999-2004, Agusta KS yang juga mantan Ketua DPC Partai Katolik Demokrat, akhirnya disidangkan. Jaksa Penuntut Umum, I Wayan Sutarjana,SH membacakan dakwaannya, Terdakwa didakwa dengan pasal berlapis yakni Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dalam UU No.2 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP.
- ❖ Menyingkapi pernyataan Forum Lintas Parpol (FLP) Kabupaten Mimika yang menilai bahwa pemerintah telah mengintervensi kinerja KPUD Provinsi Papua dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota KPUD Mimika, dinilai oleh Ketua KPUD Provinsi Papua Ferry Kareth,SH.M.Hum sebagai pernyataan yang sangat keliru dan tidak mendasar. “KPUD adalah lembaga independent yang kinerjanya tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah maupun partai politik, sehingga jika dikatakan kalau lembaga KPU kinerjanya telah diintervensi oleh pemerintah daerah itu tidak benar dan tidak mendasar”.

11 November

- ❖ Keluarnya izin penahanan Bupati Kabupaten Jayawijaya, Drs. David Agustin Hubi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Jayawijaya 2003-2004. Mendapat dukungan dari Gubernur Provinsi Papua, Dr. JP Salossa, M.Si. “ saya tidak akan melindungi bawahan yang memang melakukan pelanggaran” ungkapnya. Hal ini juga didukung oleh Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di Jayapura “ saya minta supaya Polda Papua dapat mengambil tindakan cepat untuk menangkap tersangka pada bulan ini juga supaya segera diadili di Pengadilan”, ujar Melkias yang didampingi Ketua Peduli Masyarakat Jayawijaya, Agus Alua. Dijelaskan, jika Bupati sudah ditangkap dan ditahan Gubernur Papua harus segera menunjuk Caretaker Bupati Jayawijaya agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan normal kembali.

- ❖ Sementara itu terkait dengan dikeluarkannya surat izin dari Presiden SBY kepada Polri untuk melakukan tindakan penahanan kepada Bupati Jayawijaya Drs. David A.Hubi, tidak membuat Bupati Hubi gentar. Hubi justru mengatakan akan tetap menghargai setiap proses hukum yang dijalaninya. Selaku orang nomor satu di Kabupaten Jayawijaya dan sebagai pimpinan publik ia berpendapat bahwa, semua pemberitaan itu bertujuan untuk menyerang dirinya secara sepihak yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan. Dikatakan, apa yang terjadi selama ini adalah kasus penyelewengan dana APBD 2003-2004 yang melibatkan SD, pimpinan PT. Prismadani dan NI, pimpinan PT.Air Mark Indonesia yang saat ini sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan.
- ❖ Gubernur Provinsi Papua, Dr. JP Salossa, M.Si menghimbau agar setiap Bupati dan Walikota benar-benar memberikan perhatian terhadap pengembangan sektor pendidikan dengan memberikan perhatian yang serius terhadap bantuan pendidikan atau beasiswa kepada siswa / mahasiswa yang tidak mampu. Hal itu perlu dilakukan karena masalah pendidikan masih banyak dikeluhkan.
- ❖ Untuk lebih meningkatkan pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya, khususnya daerah pedesaan. Bupati Jayawijaya Drs. David Hubi menyerahkan Dana Bantuan Pemberdayaan Desa (Bandes) 2005 sebesar Rp.3,16 miliar kepada 377 desa.
- ❖ Sementara itu Kepala BPMD Jayawijaya Agustinus Wantik selaku instansi teknik mengatakan Dana Bandes 2005 diserahkan kepada setiap desa 8 juta yang dibagi dalam beberapa kategori penggunaan, diantaranya Rp.2 juta untuk menunjang kegiatan operasional kegiatan pemerintahan desa dan lembaga pemasyarakatan, Rp.1 juta untuk menunjang kegiatan PKK, Rp 1 juta untuk pembinaan pemuda dan remaja dan Rp. 4 juta untuk usaha kelompok produktif.
- ❖ Ketua Komisi D DPRD Nabire Vehuda Gobay didampingi sekretaris komisi D Frist Agapa, A.Md Pt mengatakan, bahwa pengalokasian dana BOS (Bantuan Operasi Sekolah) tidak tepat sasaran. "Ada dana yang sudah disalurkan oleh BRI ke rekening-rekening masing-masing sekolah namun dalam pengembalian dana BOS tersebut ada oknum kepala sekolah yang mengambilnya tanpa melibatkan bendahara atau komite sekolah sehingga dana tersebut tidak jelas pemakaiannya, selain itu DPRD juga menemukan ada manipulasi data serta sekolah yang tidak beroperasi atau tutup masih mendapatkan dana BOS sementara sekolah yang masih beroperasi ada yang belum mendapatkan dana BOS'.
- ❖ Banyaknya keluarga mampu yang menerima Bantuan Tunai Langsung (BTL), disingkapi oleh Kapolda Papua dengan mengeluarkan surat maklumat bernomor No.Pol: B/M/1871/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang sangsi pidana terhadap surat keterangan palsu keluarga miskin.

12 November

- ❖ Kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua terus bertambah. Tercatat, hingga triwulan yang III, akhir 30 September 2005 jumlah HIV/AIDS sudah 2.134 kasus. Dari jumlah sebanyak itu, positif HIV 1.202 kasus dan AIDS 932 kasus. Parahnya lagi, sudah tercatat 34 ibu rumah tangga yang terinfeksi penyakit mematikan ini. Ibu rumah tangga ini juga menularkan penyakit tersebut kepada anaknya sejak anak tersebut masih berada didalam kandungan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua, Dr. Tigor Silaban, M.KM.
- ❖ Penyaluran Kartu Askes Miskin di wilayah kota Jayapura, dikeluhkan di lapangan. Pasalnya, diduga diperjualbelikan oleh sejumlah petugas yang menyalurkan kartu tersebut dengan meminta uang kepada masyarakat sebelum memberikan kartu itu. Hal tersebut dibenarkan Kepala Cabang PT. Askes Jayapura, Dra. Iriani

Sandiganeng,MM. dikatakan uang yang diminta setiap kartu miskin itu bervariasi, mulai dari Rp. 20.000-Rp. 50.000. “Saya mendengar langsung dari masyarakat secara langsung saat mengadu kepada kami bahwa petugas yang membagikan kartu itu meminta uang kepada mereka (masyarakat miskin)”.

- ❖ Sistem pelayanan kesehatan di sejumlah Puskesmas yang ada di Kota Jayapura, kini dikeluhkan. Seorang warga Kelurahan Yabansai bernama Riki menuturkan, akhir-akhir ini dirinya berobat di salah satu Puskesmas di Distrik Abepura, namun yang dikeluhkan adalah seringnya petugas terlambat datang. Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Drs.Max Madang, ketika dikonfirmasi mengakui adanya sejumlah puskesmas yang mengalami permasalahan dalam melayani masyarakat. Dikatakan permasalahan tersebut kemungkinan besar dipicu oleh permasalahan internal (didalam puskesmas) sendiri yaitu antara pimpinan puskesmas dan bawahannya.
- ❖ Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, sejak tahun 1997 hingga 2005 sudah terdapat 22 orang Ibu rumah tangga yang positif terinfeksi virus HIV/AIDS. Jumlah tersebut menurut Kepala Dinas Kesehatan, Drs. Sefnath Korwa MS, merupakan urutan pertama dalam kategori pekerjaan dan lebih besar dari jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang hanya berjumlah 19 orang. Ditambahkan juga jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Biak Numfor per 31 Oktober 2005 sebanyak 133 kasus. Dari jumlah tersebut untuk kelompok umur kasus HIV/AIDS terbesar terdapat pada usia produktif yaitu 21 sampai 29 tahun dengan jumlah kasus 67,” ungkap Sefnath Korwa.
- ❖ Wakil Bupati, Ir. Tunggul Simbolon, MA selaku Wakil Ketua KPAD Kabupaten Jayapura mengakui bahwa generasi muda khususnya remaja yang tergolong dalam usia produktif, sangat rentan terhadap penularan HIV/AIDS. Oleh karena itu upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS ini diharapkan tidak hanya melibatkan remaja sebagai sasaran penyuluhan, melainkan terlibat aktif dalam penanggulangan. Terkait dengan program kerjasama dengan Unicef yang menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai pilot project untuk penanggulangan HIV/AIDS di kalangan remaja melalui program Dance 4 life atau tarian kehidupan.
- ❖ Mendagri dalam surat keputusan nomor 120.82-1009 Tahun 2005, tertanggal 11 November menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pengumuman suara Pilkada Gubernur – Wagub Provinsi Irian Jaya Barat. Dalam SK yang salinannya ditembuskan ke Presiden, Pjt Gubernur IJB, Ketua DPRD, Ketua KPUD IJB, Mendagri menyetujui pelaksanaan pengumuman suara dapat dilaksanakan pada Senin 28 November 2005 dan ditetapkan sebagai hari libur resmi di IJB.
- ❖ Gara –gara menikah lagi tanpa sepengetahuan Istri sahnya, seorang suami berinisial DGS (30) dilaporkan istrinya ke polisi. Siti (29) sang istri datang jauh-jauh dari Jawa ke Merauke mengadukan suaminya tersebut.

14 November

- ❖ Jajaran Polda Papua yang selama ini menangani kasus Bupati Jayawijaya Drs.David.Hubi menyatakan siap menindaklanjuti surat penahanan yang telah dikeluarkan Presiden terkait dugaan penyalahgunaan dana APBD 2003-2004. hal ini dikatakan Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. D. Sumantyan HS,SH.
- ❖ Suatu kejadian luar biasa (KLB) kini dilaporkan terjadi di Desa Terpones Distrik Betap, yang terletak diperbatasan antara Kabupaten Jayapura dan Sarmi. Dari 34 orang yang terserang penyakit, empat orang diantaranya telah meninggal dunia. Hanya saja hingga saat ini belum diketahui mereka meninggal karena jenis penyakit apa, namun pihak kesehatan telah menurunkan tim ke lapangan bekerja sama

dengan pihak LSM dan gereja. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Dr.Tigor Silaban,M.KM.

- ❖ Direktur Politekes Kesehatan (Poltekes) Jayapura, Jan Piet Rumaikewi SKM,MM mengungkapkan, guna meningkatkan mutu dan pemberdayaan masyarakat pedalaman Papua, maka Poltekes Jayapura mulai tahun ini dan ke depannya akan mengutamakan 80% putra-putri Papua asal pedalaman untuk direkrut dan dididik menjadi tenaga kesehatan siap pakai.
- ❖ Ratusan warga masyarakat Pegunungan Bintang se-Kabupaten Jayapura pendukung Yusuf Nisaf (Ketua DPRD Kabupaten Jayapura) menggelar aksi demo damai ke kantor Gubernur Dok II Jayapura. Mereka meminta kepada Gubernur DR JP Salossa,M.Si agar segera mencabut SK proses pemberhentian Yustuf Nisaf dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jayapura.
- ❖ Merasa tidak puas dengan kepemimpinan kepala desanya, sekitar 30 orang warga Desa Yobdi, Distrik Biak Utara, mendatangi kantor Bupati Biak Numfor untuk menuntut kepala desa mereka segera diganti. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa persoalan yang diangkat oleh warga yang mengakibatkan munculnya tuntutan untuk menurunkan kepala desa, persoalan tersebut adalah masalah jatah beras Raskin dari bulan Juli yang belum dibagikan,dana penanaman bibit pohon pinang dan penyalahgunaan dana bantuan desa. Sementara itu menurut Kepala Distrik Biak Utara Y.M.Paru mengatakan untuk dana bantuan desa dan dana penanaman bibit pinang sampai saat ini memang belum turun.

15 November

- ❖ Terkait dengan dikeluarkannya hasil penelitian Prof. P.J. Drooglever tentang hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tanggal 1 Mei 1969 di Amsterdam, Uitgeverij Boom, Den Haag. Para Pemimin Agama di Papua mengeluarkan seruan agar semua pihak dapat bersikap, santun, arif dan bijaksana dalam menanggapi pembeberan fakta sejarah yang boleh jadi tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang selama ini dan hendaknya merujuk pada hasil kajian ilmiah yang dikeluarkan oleh Institut Kesejahteraan Belanda. Seruan ini ditandatangani oleh Pdt. Hermann Saud, Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Uskup Leo Laba Ladjar OFM, Ketua Umum PGGP dan Uskup Jayapura, Drs. H. Zubeir D. Hussein Ketua MUI Papua, Pandita Arya Bodhi Jasmani, Sekretaris Majelis Budahayana Indonesia Provinsi Papua dan Drs. I Wayan Sura MM, Ketua Hindu Dharma Indonesia Provinsi Papua.
- ❖ Dua Pengamat Politik dari FISIP Universitas Cenderwasih Drs. Beatus Tambaip,MA dan Drs. Henk Bleskadit,M.Si menilai peluncuran hasil penelitian Prof. P.J. Drooglever tentang hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tanggal 1 Mei 1969 di Den Haag tidak bisa diterjemahkan dalam satu sisi saja, karena lebih banyak mengandung kajian ilmiah di kalangan akademis yang perlu disingkapi secara dewasa.
- ❖ Kondisi Terminal Pasar Youtefa Kotaraja, dikeluhkan oleh masyarakat dan supir angkutan umum. Pasaunya, teminal itu sering tergenang air. Hal itu disebabkan kondisi terminal sudah mulai rusak dan tidak rata sehingga sering tergenang air ketika hujan turun.
- ❖ Meski dalam pemandangan umum akhir fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS), Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan fraksi gabungan menolak laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua 2000-2004 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPAMJ) 2001-2005, namun akhirnya DPRP menerima LKPAMJ Gubernur dalam sidang paripurna.
- ❖ Aksi demo masyarakat pegunungan tengah di Kabupaten/ Kota Jayapura di kantor Gubernur untuk meminta pencabutan SK Proses pemberhentian Yusuf Nisaf,

mendapat tanggapan dari Bupati Jayapura Habel M Suwae, “Jadi masyarakat ke Kantor Gubernur terkait dengan proses pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, saya pikir salah alamat. Maka saya mengharapkan agar masyarakat dapat memahami aturan dan tidak mudah diprovokasi untuk dimanfaatkan kepentingan tertentu”.

- ❖ Kepala Kampung Kwase Distrik Nimboran, Wellem Buaim, membantah adanya pelanggaran dalam penggunaan dana bantuan BBM infrastruktur di desanya. Menyusul pernyataan ketua tim Pansus BBM DPRD Kabupaten Jayapura, Yohanes Eluay, yang menyatakan adanya ditemukan berbagai pelanggaran dalam penggunaan dana bantuan BBM untuk infrastruktur pedesaan tersebut.” Tim Pansus tidak pernah sampai ke kampung kami, hanya sampai di pendopo Distrik saja, bagaimana bisa tau kondisi di kampung Kwase” ujarnya.
- ❖ Direktur Eksekutif ICS Papua berpandangan bahwa surat keputusan Mendagri No. 120.82 – 1009 Tahun 2005 tertanggal 11 November 2005 yang memberikan persetujuan kepada KPUD IJB untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur IJB pada Senin 28 November 2005 itu sangat bertentangan dengan PP No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua pasal 73 yang dikeluarkan Presiden pada tanggal 23 Desember 2004 dan PP No.6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP Pilkada) pasal 141 ayat (1) yang dikeluarkan Presiden pada 11 Februari 2005. “Jadi jelas, apa yang dilakukan Mendagri ini sebagai suatu hal yang menghinai komitmen Presiden RI dan dianggap sebagai suatu tindakan pelecehan terhadap MRP”, ungkapnya.
- ❖ Ratusan warga yang menamakan diri Komite Persiapan Pembentukan Front Pepera Papua Barat berorasi di kantor DPRD Nabire. Dalam orasinya, penanggung jawab Komite Persiapan Pembentukan Front Pepera Papua Barat, Gunawan Hanebora mengatakan bahwa saat Pepera 15 Agustus 1969 lalu, tidak melibatkan orang Papua dan Pepera dilakukan karena kepentingan ekonomi pemerintah RI, buktinya perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap PT. Freepot pada tahun 1967 sebelum Pepera.

16 November

- ❖ Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyerahkan nama-nama 5 pasangan bakal calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua beserta berkas-berkas administrasinya ke Majelis Rakyat Papua (MRP). Pnyerahan itu dilakukan dalam suatu rapat pleno MRP disekterariat Hotel Numbay.
- ❖ Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Jerry Haurissa,SE.MM mengatakan rencana pemerintah akan merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya bagi tenaga honorer, hanya saja tidak semua guru honor di Provinsi Papua yang jumlahnya mencapai 400-500 an orang bisa diangkat semuanya.
- ❖ Permasalahan di Papua, harus segera diselesaikan oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti ketika menangani masalah kasus Aceh. Tuntutan ini disuarakan oleh beberapa elemen masyarakat Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat. “Dialog dengan bangsa Papua Barat adalah cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan di Papua, “ kata Ketua Umum Front Pepera Barat Hanz Gebze, di kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum).
- ❖ Guna mencegah penyebaran HIV/AIDS, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPAD) Kota Jayapura, melakukan sosialisai bagi pihak perhimpunan bar, hotel dan restoran. “Sebab selama ini penyebaran utama virus tersebut melalui transaksi seksual, yang dilakukan oleh kalangan beresiko tinggi seperti para pekerja seks komersial (PSK),” kata Ketua Harian KPAD Kota Jayapura, H. Sudjarwo,BE.

- ❖ Ketua Panitia Pemilihan Anggota MRP Kota/Kabupaten Jayapura-Kerook, Drs. A Margono, SH.MM mengatakan, dana operasional dan honor panitia pemilihan (Panpil) dan Panitia Pengawas (Panwas) Distrik Jayapura Selatan telah diserahkan ke pihak Panpil Distrik Japsel. Hal itu dikatakan terkait adanya keluhan dari beberapa Panpil dan Panwas MRP di Distrik itu yang belum menerima honorinya.
- ❖ Berbagai upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus digalakkan Pemerintah Provinsi. Khususnya di bidang perikanan dan kelautan, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan pengembangan terhadap budidaya perikanan khususnya air tawar. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Ir. Astiler Mahardja.
- ❖ Terkait dengan telah diterbitkan dan dikeluarkannya surat keputusan Mendagri No.120.82-1009 tertanggal 11 November 2005 tentang pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi IJB yang akan dilaksanakan pada 28 November 2005. Ketua MRP Drs. Agus Alue Alua mengatakan hal itu sangat bertentangan dengan UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan Peraturan Pemerintah (PP) No.54 Tahun 2004 tentang MRP.
- ❖ Direktur Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Papua (LP3A-Papua) Selfi Sanggenafa menilai, meski Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No.7 tahun 1984, dan dilanjutkannya UU No.23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, namun semuanya itu belum menjamin perempuan akan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan, lanjutnya, kekerasan yang dialami perempuan masa kini cenderung meningkat dalam berbagai bentuk baik fisik, psikis, seksual maupun dalam penyelantaran keluarga atau rumah tangga. Selain itu pada umumnya kelompok-kelompok HAM juga kurang menaruh perhatian bahkan enggan mengajukan pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam agenda kerja mereka.

17 November

- ❖ Ketua MRP, Drs. Agus Alue Alua, M.Th mengatakan, MRP tidak punya kewenangan mengugurkan atau mencoret pasangan yang dinilai bukan asli Papua, sebab tugas MRP hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan tidak untuk mengugurkan pasangan bakal calon baik Gubernur maupun Wakil Gubernur. Hal itu sebagaimana yang diamanatkan dalam UU.No.21 Tahun 2001 tentang Otsus maupun PP No.54 Tahun 2004 tentang MRP. Bahwa salah satu tugas MRP adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal persyaratan orang asli Papua. “Jadi setelah kami seleksi semuanya sesuai dengan amanat UU Otsus dan PP MRP kami akan kembalikan ke DPRP”, tegasnya.
- ❖ Kepala BKKBN Provinsi Papua, Drs. Josua Singamui mengatakan, keluarga pra sejahtera (miskin) di Provinsi Papua cukup memprihatinkan. Hingga saat ini, jumlahnya sekitar 177.066 KK (Kepala Keluarga), jumlah ini belum termasuk keluarga sejahtera (KS) I, KS.II dan KS III. Keluarga yang dikategorikan miskin ini dapat dilihat dari dua alasan. Pertama alasan ekonomi, yakni berapa kali mereka dapat makan sehari, tingkat pekerjaan, tingkat pendidikan dalam keluarga, pendapatan dan kategori lainnya. Kedua bukan alasan ekonomi, dilihat dari tempat tinggal mereka, bentuk rumahnya seperti apa, berlantai apa.
- ❖ Warga Nimbokrang minta perhatian Pemda terhadap sejumlah permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang masih dirasakan masyarakat, terutama menyangkut pendidikan dan penyediaan air bersih. Selain mengharapkan dibangun satu sekolah menengah atas atau kejuruan di wilayah Distrik Nimbokrang,

masyarakat juga mengeluhkan masih sulitnya sarana transportasi bagi anak – anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi di distrik tersebut.

- ❖ Ribuan massa melakukan aksi demo damai di DPRD Irian Jaya Barat, mereka menolak pembangunan Masjid Raya dan *Islamic Centre* di Manokwari. Ketua Badan Pekerja Antar Gereja Pdt. I.S. Rumbiak S.Th membacakan pernyataan sikap umat Kristiani Manokwari antara lain:
 1. Menolak pembangunan mesjid raya dan Islamic Centre dan meminta pemerintah untuk membubarkan panitia pembangunan mesjid raya dan Islami Center.
 2. Mendesak DPRD IJB dan Pemerintah kabupaten Manokwari untuk segera membuat dan menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang Manokwari sebagai Kota Injil.
 3. Meminta kepada pihak DPRD IJB dan Manokwari untuk segera menyelenggarakan dialog antar umat beragama untuk membangun persepsi yang sama tentang kota Injil Manokwari dan Papua sebagai zona damai.
- ❖ Solidaritas Mahasiswa dan masyarakat Kristen Papua melakukan aksi demo di sekeretariat MRP menolak rencana pembangunan mesjid raya dan Islamic Center di kota Injil Manokwari. Dalam oransinya mereka menilai pemerintah tidak mampu untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan kehidupan umat beragama dan seakan menunjukkan keberpihakkannya. Pemerintah juga dinilai tidak mampu untuk menangkap dan mengusut pelaku yang melakukan tindakan anarkis dimana menutup tempat ibadah secara sepihak.

18 November

- ❖ Berdasarkan kriteria orang asli Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) secara kelembagaan dengan terpaksa menyatakan bahwa dua Bakal Calon Wakil Gubernur (Balon Wagub) bukan orang asli Papua. Mereka adalah DR Kamarudin Watubun, SH dan Drs. Mohammad Musa'ad Msi. Dari rapat MRP secara aklamasi seluruh anggota MRP menyatakan bahwa Komaruddin Watubun yang ketua PDIP Papua itu, bukan orang asli Papua. Sementara untuk Drs.Mohammad Musa'ad M.Si dari penentuan persyaratan orang asli Papua dilakukan dan diputuskan lewat voting. Dimana 28 anggota setuju Drs. Mohammad Musa'ad M.Si bukan orang asli Papua dan 8 anggota tidak setuju Musa'ad bukan orang asli Papua dan 5 anggota walkout dari ruang sidang dan 1 abstein.
- ❖ Dari sumber MRP, ada tiga point yang dijadikan dasar MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Tiga point tersebut antara lain, orang tersebut akan dikatakan asli Papua jika berasal dari rumpun ras Melanesia. Berikutnya orang tersebut mempunyai garis keturunan ayah orang asli Papua (Garis Partinilear). Kemudian mempunyai garis kultural dimana orang tersebut mempunyai bahasa daerah, suku asli Papua, mempunyai kampung dan tau adat istiadat serta kebudayaan dimana dia berasal.
- ❖ Salah satu anggota MRP H. Ahmad Arobi Aituarauw,SE,Msi yang juga salah satu Tokoh Adat dari Kabupaten Fak-Fak mengaku cukup kecewa atas sikap yang diambil oleh rekan-rekannya di MRP. Bahkan merasa dilecehkan sebagai orang Papua. “ Musa'ad adalah orang Papua sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Otsus No.21 Tahun 2001, kami dari etnis Bomberai, namun tidak diakui saudara dari suku Papua lain. Ini yang tidak benar lagi, artinya satu suku dengan satu suku yang lain di Papua rupanya sudah tidak saling menghargai, dan ini persoalan,”ujarnya.
- ❖ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akhirnya menunda rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus dari pegawai honorer. Semula, dijadwalkan antara September-November ini. Selanjutnya diundur hingga

April 2006. Seorang pejabat di Kementerian PAN menyebutkan, penundaan disebabkan data tenaga honorer yang diusulkan daerah pada Menpan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak memenuhi syarat untuk masuk database tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS pada periode 2006-2009." Banyak pejabat kepegawaian daerah yang memberikan keterangan tidak benar, terutama usia dan masa kerja," katanya.

- ❖ Penandatanganan MoU kerjasama Pemerintah Provinsi Papua dengan organisasi buruh Internasional (ILO) dilaksanakan di gedung negara. Dalam penandatanganan MoU itu, Pemprov Papua diwakili Asisten III setda provinsi Papua Drs. Djabar Abdul Kadir atas nama Gubernur Papua, sedangkan dari pihak ILO dilaksanakan langsung Direktur ILO perwakilan Indonesia Mr. Allan Bultom. Abdul Kadir dalam sambutannya mengatakan pembangunan di Papua dalam berbagai aspek belum maksimal dilaksanakan, kita berharap melalui kerjasama pemerintah dengan ILO perhatian terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dapat diatasi serta kesempatan kerja dapat diperluas,"harapnya.
- ❖ Dikeluarkannya surat keputusan Mendagri No.120 – 82 – 1009 tentang pelaksanaan Pilkada Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat yang direncanakan akan dilaksanakan pada 28 November 2005, mendapat kecaman keras dari DPRP. Pasalnya keputusan Mendagri tersebut tidak sesuai dengan amanat UU.No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Ketua DPRP Drs.John Ibo,MM mengatakan, jika pemerintah pusat tetap memberikan izin terhadap pelaksanaan Pilkada Provinsi Papua, DPRP Papua telah menetapkan sikap untuk melakukan sidang paripurna istimewa untuk mengembalikan UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus terhadap pemerintah pusat.
- ❖ Pengamat pendidikan dari Universitas Cenderawasih Drs. Leonard Sagisolo,M.Pd mengatakan, tingkat pendidikan di wilayah pedalaman Papua masih memprihatinkan. Pasalnya, sekolah-sekolah yang ada di daerah pedalaman ini hanya memiliki beberapa guru saja, bahkan dikhabarkan ada sekolah yang hanya ada satu atau dua guru saja. " Perlu ada ketegasan dari Pemerintah Provinsi Papua terhadap masalah pendidikan di daerah ini. Bagaimana bicara soal Sumber Daya Manusia (SDM) kalau itu hanya ada di kota, lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di pedalaman. Jangankan pedalaman di kampung-kampungpun yang masih bisa dijangkau dengan transportasi saja banyak guru yang lari dari tugasnya," ujarnya.
- ❖ Ketua DPRD Irian Jaya Barat, Jimmy Demianus Ijie mengaku tidak habis pikir dengan sikap elit-elit politik di Provinsi Papua yang masih terus merongrong pelaksanaan Pilkada Gubernur-Wagub IJB yang direncanakan digelar 28 November 2005 mendatang. "Ini sudah kelihatan belangnya, dengan sikap begini memperlihatkan niat-niat tidak baik dari saudara-saudara kita disana terhadap provinsi ini. Kalau niatnya baik untuk kepentingan rakyat mengapa kita tidak secara sungguh-sungguh memperlihatkan keberpihakkan kita," ujar Jimmy. Karena itu untuk menanggapi hasil Pleno MRP (Majelis Rakyat Papua) yang menolak Pilkada IJB, maka DPRD IJB menjadwalkan akan menggelar rapat paripurna untuk menentukan sikap.

19 November

- ❖ Massa pendukung Drs. Muhammad Musa'ad mengadakan unjuk rasa ke KPU Papua untuk menuntut agar MRP mencabut keputusan yang tak mengakui Musa'ad orang asli Papua. Demo ini berakhir rusuh akibat bentrok dengan aparat. Dari kerusuhan tersebut, sedikitnya 11 polisi dan 15 warga sipil dan 1 wartawan terluka.

- ❖ Lukas Enembe (Bakal Calon Gubernur Papua) menuding jika keputusan MRP tidak mengakui Drs.Mohammad Musa'ad sebagai orang asli Papua sebagai hal yang inkonstitusional. Menurut Enembe, MRP telah menerjemahkan UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara sepotong-sepotong. Dan buntut dari itu, ia menilai bahwa ke depan Papua tidak akan bisa damai sebab anak yang lahir dari kawin silang asli Papua dan lahir di Papua, tidak diakui hak hidupnya sebagai orang asli Papua.
- ❖ Wakil Presiden RI Drs.H.M.Yusuf Kalla mengatakan, sesuai dengan tekad dan komitmen awal pemerintah pusat bahwa terkait dengan upaya-upaya penyelesaian semua persoalan-persoalan di Provinsi Papua dilakukan secara damai dan bermartabat dengan mengacu pada semangat implementasi UU.No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dengan demikian pelaksanaan Pilkada yang semula dijadwalkan pada tanggal 28 November 2005 harus mengalami penundaan meskipun pelaksanaannya telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri, Mohammad Ma'ruf.
- ❖ Ketua Panwas Pilkada Gubernur Kabupaten Nabire, Eddy C Wabes,SH menilai pembagian dana dari alokasi APBD kabupaten senilai Rp 1 miliar, namun yang dijatah ke Panwas hanya Rp 150 juta, sementara KPUD dialokasikan senilai Rp 850 juta. "Dana ini kami menilai sangat tidak berimbang, karena Panwas juga memiliki tanggungjawab pekerjaan yang tidak sedikit yang tentunya membutuhkan dana yang besar".

21 November

- ❖ Komaruddin Watubun, SH menilai MRP sudah tidak bersikap objektif terhadap UU dan aturan yang sudah ada. MRP tidak berhak melakukan pencoretan calon jika Perdasus belum ada. "Setahu saya MRP itu adalah lembaga kultural, sehingga harus ada batasan-batasannya dalam melakukan tugasnya, namun sikap yang mereka ambil itu adalah eksekusi (keputusan) yang sifatnya politik dan ini tidak benar".
- ❖ Terkait dengan demo massa pendukung Musa'ad di KPU yang berbuntut rusuh, lima tersangka ditahan di Rutan Polres Jayapura guna kepentingan penyidikan dan penyelidikan. Kelima tersangka yang diamankan itu antara lain, Letius Kogoya (30), Marshel Gobay (24), Kaninogo Jigibalom (28), Kori Kogoya (24) dan Muhammad Umar Reliubun. Kapolres Jayapura AKBP Drs. Paulus Waterpauw mengatakan kelima tersangka ini dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan, subsidi pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pasal 214 tentang melawan petugas secara bersama-sama.
- ❖ Setelah beberapa waktu lalu melakukan demo terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR), sekitar 60 perawat (pegawai) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura kembali melakukan demo. Mereka menyoroti penerapan manajemen rumah sakit yang tidak transparan, tertutup dan tidak dilaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik.
- ❖ Menyingkapi persoalan ekonomi tradisional yang mulai tergusur oleh pembangunan yang tidak tertata dengan baik, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Menggelar acara sosialisasi pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam sosialisasi itu terungkap, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan penataan ruang, supaya pasar-pasar tradisional yang merupakan peninggalan leluhur tidak tergusur oleh pembangunan toko-toko yang serba mewah. Sebab, pasar tradisional ini tidak hanya merupakan salah satu peninggalan budaya, namun juga terkait langsung dengan ekonomi kerakyatan yang tentunya perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

- ❖ “HIV/AIDS sudah mulai menyerang orang yang tidak terkait langsung dengan perilaku yang rawan penyebaran HIV/AIDS, seperti ibu rumah tangga. Namun kemungkinan penularan ini bisa terjadi akibat perilaku keluarga khususnya kalangan suami yang membawa penyakit tersebut dari luar,” tutur Wakil Bupati Ir Tunggul TH Simbolon.
- ❖ Menurut Kabag Keuangan Kabupaten Jayapura Drs.Ichan Anshari Ibrahim, MM alokasi dana kabupaten Jayapura sebesar Rp 28 miliar, pada tahap I lalu telah dicairkan sebesar Rp 11.735.000.000, sehingga sisa dana yang belum dicairkan Provinsi ke Kabupaten sampai saat ini sebesar Rp 16.565.000.000. mengingat batas waktu tahun anggaran 2005 yang tinggal satu bulan lagi, maka kami mengharapkan dana sisa itu dapat dicairkan 100 % karena ini menyangkut hak masyarakat.

22 November

- ❖ MRP resmi menyerahkan hasil pertimbangan dan persetujuan terhadap persyaratan orang asli Papua bagi pasangan bakal calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ke pihak DPRP. Dalam penyerahan itu juga disertakan satu lembar rekomendasi. Penyerahan tersebut berlangsung dalam suasana tenang yang dihadiri para pimpinan DPRP, Ketua-Ketua Fraksi dan Tim Pansus Pilkada yang berlangsung di ruang Panmus DPRP.
- ❖ Ketua MRP Drs. Agus Alue Alua, M.Th. tidak keberatan dengan rencana pasangan Balon Gubernur/Wakil Gubernur Papua 2005-2010, Lukas Enembe, SIP/ Drs. Mohammad Musa’ad M.Si untuk menggugat Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait keputusannya yang tidak menyetujui Mohammad Musa’ad sebagai orang asli Papua. “MRP datang dari kampung-kampung dan agama-agama yang dominan dan tidak ada anggota yang memiliki spesialis hukum. Jadi, kami tidak akan menanggapi upaya gugatan hukum yang akan dilakukan pasangan Lukas dan Musa’ad, juga tidak menolaknya. Sebab gugatan hukum itu sepenuhnya akan kami serahkan pada Panwas.”
- ❖ Pelaksanaan Pilkada Provinsi Papua yang mestinya sudah dilaksanakan pada 10 Oktober lalu, kian kabur. Bahkan hingga saat ini KPUD Provinsi Papua belum bisa memastikan kapan pelaksanaan Pilkada Provinsi Papua itu dilaksanakan. Ketua KPUD Provinsi Papua Ferry Kareth SH.M.Hum menyatakan bahwa belum adanya jadwal pasti tersebut erat kaitannya dengan situasi politik saat ini khususnya sikap lembaga MRP dan DPRP yang terlibat langsung selama ini. Yang aneh adalah kendati Pilkada Papua sudah jelas-jelas ditunda, toh tidak ada ijin resmi dari Presiden; padahal aturannya sesuai UU 32/2004 dan PP nomor 6 bahwa untuk menunda Pilkada Gubernur harus ada ijin dari Presiden.
- ❖ Merasa aspirasinya tidak ditanggapi pihak manajemen RSUD Dok II, puluhan pegawai (perawat) RSUD Dok II menggelar aksi demo di depan RSUD Dok. Mereka datang dengan membawa tiga spanduk dan 8 lembar pamflet. Yang pada intinya mereka meminta Direktur RSUD Dok II Dr Paulina Watopa dan cs-nya diganti dan minta transparansi pengolahan keuangan RSUD Dok II.
- ❖ Ketua Harian Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) yang juga Wakil Walikota Jayapura, H Sudjarwo, BE mengatakan, kesadaran masyarakat (kelompok resiko) tentang pentingnya pemakaian kondom masih relatif kurang. Padahal pemakaian kondom tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus HIV/AIDS.
- ❖ Hari ini, masa jabatan Salossa-Karma berakhir namun karena belum ada jadwal pelantikan Caretaker, keduanya masih menjalankan tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur seperti biasanya.

- ❖ Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota, Drs. I Wayan Sura memperkirakan sekitar 1000 pekerja seks jalanan (PSJ) beroperasi di sejumlah wilayah di kota Jayapura. Kondisi ini sangat memprihatinkan sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. “Kota Jayapura sendiri menduduki peringkat ketiga terbesar pengidap HIV/AIDS di Papua; sementara penyebabnya lebih banyak melalui seks. Keberadaan PSJ ini tentunya akan membuat kasus HIV/AIDS semakin bertambah jika tidak ditangani”.

23 November

- ❖ Pengamat politik Universitas Cenderawasih, Drs. Beatus Tambaip, MA mengatakan, “Pelaksanaan Pilkada Gubernur ini tidak bisa dipaksakan KPUD dan siapa saja. Sebab penundaan itu dilakukan bukan karena kepentingan tertentu atau karena disengaja, namun kita lihat saja kondisi politik yang terjadi di Papua sehingga menjadikan pelaksanaan Pilkada tertunda.
- ❖ Kendati masa jabatan Gubernur Papua Drs. JP. Salossa M.Si dan Wagub Drh Constant Karma telah berakhir, namun masa jabatan keduanya masih diperpanjang lagi. Perpanjangan masa jabatan Salossa-Karma ini sesuai dengan Radiogram Mendagri nomor 120/2964/SJ yang dikirim kepada Sekda Provinsi Papua Drs.H.Andi Baso Basaleng sekitar pukul 02.00 WIT.
- ❖ Dalam empat bulan terakhir ini, setidaknya 15 orang warga kampung Yoka yang kesemuanya berusia di bawah 50 tahun, Distrik Abepura meninggal dunia. Dari hasil penelitian yang dilakukan mereka meninggal dunia karena penyakit paru-paru yang disebabkan karena mengkomsumsi minuman yang mengandung alkohol. Hal ini dikatakan Pdt. Y.J. Done, S.Th, seorang pelayan di Jemaat Ebenhaezer Yoka.
- ❖ Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Ev. Yustus Nisaf mengatakan bahwa proses pemberhentian dirinya dari jabatan Ketua DPRD adalah inkonstitusional, sebab dalam proses pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan tahapan-tahapan yang tercantum dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. “Proses pemberhentian itu juga telah melanggar tata tertib dewan yaitu pasal 65 ayat 1 hingga 4, karena tahapan tata tertib ini juga belum dilalui dan apabila hari ini atau besok keputusan Gubernur tentang pemberhentian itu turun, maka saya akan melakukan proses hukum atau menggugat Gubernur Cq Biro Hukum, Bupati Jayapura, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jayapura melalui Pengadilan Tata Usaha Negara”.
- ❖ Dalam kunjungan PKK Kabupaten Keerom ke Distrik Senggi dalam kegiatan pengobatan massal ditemui selain penyakit malaria dan penyakit kulit yang mendominasi juga ada penyakit yang diduga gizi buruk yang menyerang anak-anak. Menurut keterangan petugas medis setempat, kondisi bayi seperti ini (gizi buruk), juga terdapat di beberapa kampung seperti Kampung Yabanda yang berbatasan langsung dengan negara PNG ini. Bahkan jumlah mereka sangat banyak. Hal ini dibenarkan oleh Dr Rony Situmorang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom.
- ❖ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Mimika yang mendapat kursi di lembaga legislatif dan telah dilantik November tahun 2004, sampai kini masih belum jelas bahkan memprihatinkan. Hal ini dikemukakan pimpinan sementara DPRD Mimika Drs. Maimun Madia. “Saat ini yang aktif penuh tinggal 50 persen, sementara 25 persen hadir semau gue, dan 25 persen lagi tanpa berita “.
- ❖ Dana yang telah disalurkan oleh Panwas Provinsi ke Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Gubernur Kabupaten Yahukimo sebanyak Rp.164 juta namun dana itu sangat kurang. Hal ini dikemukakan Ketua Panwas Yahukimo Siptanus Wandik. “Masalah ini menjadi dilema buat kami, disatu sisi kami dituntut untuk melaksanakan tugas dengan baik, sisi lainnya kami tidak didukung dengan dana yang memadai”, ujarnya.

- ❖ KPUD Irian Jaya Barat tetap siap dengan pelaksanaan Pilkada 28 November. Kesiapan ini terlihat di KPUD Kabupaten Manokwari; bahkan sebagian surat suara serta logistik Pilkada lainnya sebagian telah didistribusikan ke Distrik Kebar. Ketua KPUD IJB Ny. Regina Sauyai mengatakan, jajarannya harus siap. Kalau itupun ditunda harus ada alasan yang jelas dan akurat. “Sudah ada keputusan dari Mendagri mengenai pelaksanaan Pilkada di IJB, mengapa Pemerintah Pusat masih ragu-ragu”.
- ❖ Ratusan masyarakat Kimaam yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kimaam, melakukan aksi demo damai ke Kejaksaan Negeri Merauke untuk mempertanyakan dan mendesak proses penanganan kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi yang menewaskan 2 orang dan 2 mengalami luka berat dan tiga luka ringan warga sipil di lapangan Maskura Kimaam tahun 2001 lalu.
- ❖ Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke Pastor Jus Mewengkang, MSC dalam orasinya mengatakan kasus Kimaam berdarah di lapangan Maskura terjadi saat masyarakat akan menyampaikan aspirasi mereka atas akumulasi kekecewaan mereka atas terjadinya pencurian ikan yang marak, yang saat itu disambut dengan tembakan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan beberapa orang luka berat. “Kasus ini berlarut-larut dan kami sampaikan kepada Komnas HAM tahun 2002 tapi masih mandek dan hingga sekarang kami undang mereka tapi masih mengalami kejanggalan”.

24 November

- ❖ Akibat sampai sekarang ini belum ada kejelasan yang pasti tentang kapan pelaksanaan Pilkada di Papua, KPUD Papua terpaksa membutuhkan tambahan dana lagi, khususnya untuk badan penyelenggara Pilkada. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris KPUD Provinsi Papua Drs.H.Hasyim Sangadji.
- ❖ Setelah diduga ada mafia yang memberikan ijin penyambungan los pasar, maka kali ini sejumlah meja milik Pemkot diduga telah diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Menggapi hal itu, Kepala Dinas Pasar Kota Azur Wail P.SE,MM mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan berupaya mengungkap permasalahan itu.
- ❖ Gubernur Provinsi Papua, Dr. JP Salossa,M.Si dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Sekda, Drs. WD Ochambair mengatakan, kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara bersinambungan perlu diperhatikan. “Meningkatnya derajat kesehatan sangat berkaitan erat dengan sektor lain sebagai suatu permasalahan. Namun dalam sektor kesehatan sendiri juga ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan derajat tersebut” kata Gubernur pada acara rapat evaluasi dan koordinasi PP No. 28 Tahun 2003.
- ❖ Ketua Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Jayapura, HM Ali Hasanudin mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya mulai melakukan penertiban terhadap balihoo dan posko-posko pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada di tingkat Distrik. “Posko atau kantor sekretariat pasangan calon tersebut menurut aturan tidak boleh ada di Distrik-Distrik, hanya di Provinsi maupun kota/kabupaten saja”.
- ❖ Kejuaraan sepakbola antar pemuda yang digelar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Kabupaten Supiori saat ini dinilai oleh Panitia Pengawas Pilkada Supiori sebagai kegiatan yang berbau kampanye alias kampanye terselubung. Pasalnya, saat dilakukan pembukaan kejuaraan sepakbola di Korido Distrik Supiori Selatan tanggal 19 November 2005, Panwas Supiori menemukan adanya teriakan

yel-yel untuk mendukung pasangan calon Gubernur / Wakil Gubernur Papua Dr. JP Salossa, M.Si / Paskalis Kosay. Hal ini dikatakan Panwasda Kabupaten Supiori Yotam Wakum SH.

- ❖ 55 KK warga Kampung Haryao Moso, Distrik Muara Tami sampai saat ini belum menerima kartu miskin. Padahal dari 55 KK yang tinggal di kampung ini adalah putra daerah dan sangat layak menerima kartu miskin tersebut. Salah seorang Tokoh masyarakat dari Distrik Muara Tami, John Sawaki mengatakan, disamping tidak mendapatkan kartu miskin, kondisi masyarakat di sana yang jumlahnya sekitar 300 jiwa cukup memprihatinkan. "Mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan lainnya. Di sana tidak ada sekolah dan jumlah anak putus sekolah mencapai ratusan anak," terangnya.

25 November

- ❖ Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla mengatakan, sesuai UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus dan Majelis Rakyat Papua (MRP), payung hukum pemekaran IJB akan disiapkan Ketua DPR Papua, Gubernur Papua dan Ketua MRP diselesaikan paling lambat akhir Desember 2005. Dengan demikian, Pilkada IJB baru dapat dilaksanakan awal 2006 setelah proses pemekaran selesai.
- ❖ Sementara itu, Ketua DPRD IJB Jimmy Demianus Ijie optimis pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat akan segera usai sesuai jadwal yang disepakati bersama. Jimmy mengharapkan Pemerintah Pusat mengawal proses pemekaran. "Cuma tiga surat itu yang diperlukan. Artinya kalau sampai jadwal waktu yang telah ditentukan masalahnya tidak selesai Pemerintah Pusat harus dengan jiwa besar mengijikan kami untuk melanjutkan proses Pilkada".
- ❖ Sekretaris DPD PSI Provinsi Papua, Surya Ibrahim BS, mengatakan, pihaknya tetap tidak akan mengganti bakal calon (balon) Wakil Gubernur, Drs. Muhammad Musa'ad, M.Si, meskipun dalam surat yang dikirim Pansus DPRP meminta pergantian. PSI merupakan salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Lintas Nusantara pendukung pasangan Gubernur dan Wagub Lukas Enembe, S.IP dan Drs. Muhammad Musa'ad M.Si.
- ❖ Guna mencegah penyebaran HIV/AIDS yang kini sudah cukup memprihatinkan di kota Jayapura, Pemkot bersama pihak terkait lainnya seperti DPRD, LSM seperti YPLHC, YHI, Global Fund, para tokoh agama telah menyusun atau membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai tata cara penanggulangan HIV/AIDS.
- ❖ Jumlah pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura terus meningkat. Dari laporan Dinas kesehatan Provinsi Papua, sampai saat ini angka kumulatif HIV/AIDS tercatat 2.134 kasus, yakni 1.202 kasus HIV dan 932 kasus AIDS, sementara untuk Kabupaten Jayapura tercatat sebanyak 104 kasus, yakni 60 kasus HIV dan 44 kasus AIDS. "Kemungkinan kasus ini akan terus meningkat sebagai konsekwensi dari lambatnya penanganan pada awal kasus ini ditemukan pertama di Papua," Ungkap Bupati Jayapura saat membuka pameran HIV/AIDS di Jayapura.
- ❖ Ancaman Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Yustus Nisaf untuk mem-PTUN-kan Gubernur Cq Biro Hukum, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Jayapura dan Bupati Jayapura terkait SK pemberhentian dirinya yang dianggap institusional, ternyata tidak membuat gentar Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae, S.Sos.MM. "silakan saja kalau memang dia mau. Kita sudah jalankan proses itu sesuai dengan aturan yang ada, kalau memang dinilai ada yang menyalahi hukum, silakan saja proses hukum," tegas Bupati.
- ❖ Belasan Kepala Kampung, sekretaris dan aparat kampung mendatangi kantor KPUD Kabupaten Manokwari di jalan Merdeka, mereka datang beramai-ramai untuk

menanyakan dana operasional pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat. Tampaknya, para aparat kampung ini belum mengetahui informasi bahwa Pilkada Provinsi Irian Jaya Barat kembali ditunda.

26 November

- ❖ Sampai 24 November 2005, Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Jayapura telah menyalurkan (mentransfer) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 46,69 miliar ke masing-masing penerima dana tersebut dan tinggal sisa dana yang belum tersalur sebesar Rp 846 juta,” kata Ayatna Anang, Manager Operasional BRI Jayapura.
- ❖ Kepala Dinas Kesejahteraan Kota Jayapura, Drs I Wayan Sura MM, mengatakan, banyak perilaku penyimpangan di masyarakat, khususnya dikalangan remaja seperti, pemakaian narkoba, seks bebas, mabuk-mabukan, umumnya disebabkan oleh berbagai tindak kekerasan yang sering dialaminya. “Tindak kekerasan itu, biasanya didapat dari perlakuan yang tidak wajar dari orang tuanya, saudara-saudaranya sekeluarga, bahkan tindak kekerasan yang bisa bersifat dikucilkan dari dalam keluarganya, sehingga ia berusaha mencari alternatif penyelesaian persoalan yang dihadapinya diliingkungan luar keluarganya. Hal ini disampaikan di sela-sela acara sosialisasi undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- ❖ Kendati tugas guru sering disebut sangat mulia, namun seing kali pujian dan sanjungan itu tidak sesuai dengan kenyataan hidup guru sehari-hari, khususnya menyangkut kesejahteraan. “Sampai sekarang pemerintah pusat masih kurang memperhatikan guru di daerah,” ungkap Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kota Jayapura Malikidin Soltief, SE.
- ❖ Menyangkut berbagai tindak kekerasan yang selama ini terjadi pada guru. Soltief meminta agar segera dibuat satu aturan yang melindungi profesi guru. “Sekarang ini memang pusat sedang menyusun Perda tentang guru tetapi kami di daerah belum tahu seperti apa isi atau Draft dari Perda itu,” katanya.
- ❖ Kepala BKKBN Provinsi Papua, Drs. Josua Singamui mengatakan, kehidupan remaja di daerah ini terancam HIV/AIDS dan Narkoba. Oleh karena itu, setiap siswa diharapkan bisa memahami dengan baik tentang bagaimana cara memelihara kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) mengingat tingginya kasus HIV/AIDS di Papua, termasuk tentang bahaya Narkotika dan obat-obatan (Narkoba) yang juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi remaja tersebut. Hal ini dikatakan dihadapan 65 siswa SMA 2 Sentani, saat memberikan sosialisasi KRR.
- ❖ Untuk mengantisipasi kegiatan 1 Desember, Korem 173 Praja Vira Braja mengantisipasi 3 lokasi yang dianggap rawan yaitu Puncak Jaya, Paniai dan Biak Barat. Hal ini dikatakan oleh Danrem Kol. Inf. Erfi Triassunu.
- ❖ Karena dinyatakan melakukan *illegal logging* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, seorang pengusaha kayu bernama Ekan Al Hamid (51), dituntut penjara 1 tahun.
- ❖ Selain tuntutan pidana 1 tahun itu, Bos dari CV Agora Indah itu juga dituntut denda Rp.1 juta dan kurungan 2 bulan. Tuntutan itu diajukan Jaksa Penuntut Umum Antonio MA,SH diwakili Yafet Ruben Bonay,SH di Pengadilan Negeri Merauke. Selain itu Jaksa Penuntut Umum menetapkan barang bukti disita untuk Negara.

28 November

- ❖ Koalisi Papua Baru secara resmi mendaftarkan Alex Hesegem,SE ke Pansus DPRP, untuk menggantikan bakal calon (balon) Wagub DR(HC) Komaruddin Watubun,SH yang dinilai oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) bukan asli Papua.

- ❖ Terkait dengan kegiatan 1 Desember yang disebut sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, tidak ada pengamanan khusus dari Polda Papua. “Kami hanya melakukan peningkatan kewaspadaan dengan peningkatan intensitas patroli, meningkatkan kesiapsiagaan petugas disemua jajaran,” ungkap Kabid Humas Polda Papua AKBP Drs. Kartono Wangsadasastra.
- ❖ Sementara itu Sekretaris Front Persatuan Perjuangan Papua Barat (Front Pepera PB) Selpius Bobii mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan aksi yang berlebihan pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Papua Barat tanggal 1 Desember 2005 nanti. Hanya saja, dirinya tidak bisa membantah kalau pihaknya akan tetap menggelar peringatan dalam bentuk ibadah. “Sebenarnya yang berhak memberikan komentar adalah pihak Presidium Dewan Papua (PDP), namun saya katakan tidak ada kegiatan yang namanya upacara di lapangan ataupun yang namanya menaikkan bendera Bintang Kejora,” terangnya.
- ❖ Akhirnya surat izin penahanan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Bupati Jayawijaya Drs. David A.Hubi yang diduga melakukan penyalahgunaan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2003-2004, diterima pihak Polda Papua. Hal ini dibenarkan Kabid Humas Polda Papua, AKBP Drs. Kartono Wangsadasastra.
- ❖ Meski belum ada kasus yang ditemui, namun wilayah Papua dinyatakan sebagai daerah yang rawan terhadap polio yang menyerang anak-anak di bawah umur 5 tahun. Hal itu disebabkan masih banyak anak-anak Balita di Papua yang belum memperoleh vaksin polio. Hal itu seperti diungkapkan Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr Bagus Sukaswara W.
- ❖ Asisten Deputi VI Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan Supeno mengatakan, kemiskinan merupakan masalah yang harus ditanggulangi, mengingat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia masih banyak. Pada tahun 2004 penduduk miskin berjumlah 36,1 juta jiwa atau 16,6 persen dari seluruh jumlah penduduk. Banyak hal yang mempengaruhi masyarakat miskin seperti belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin, seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, tanah, sumber daya alam, air bersih dan sanitasi, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan publik dan proses pembangunan.
- ❖ Akibat penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), ratusan massa yang terdiri dari tokoh agama, politik, cendekiawan, pemuda dan tokoh perempuan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi IJB. Pengunjuk rasa ini meminta penjelasan dari Ketua DPRD IJB, Demianus Ijie, mengapa delegasi dari IJB begitu saja menerima kesepakatan antara Wapres dan elit politik Provinsi Papua.

29 November

- ❖ Satgas Papua menjamin tidak akan ada pengibaran bendera Bintang Kejora dalam peringatan 1 Desember 2005. Hal ini ditegaskan Alex Baransano, Wakil I Bidang Komando Satgas Papua, yang juga Komandan Satgas Papua Port Numbay.
- ❖ Terkait dengan pelaksanaan peringatan 1 Desember 2005, Kapoda Papua Irjen Pol Drs. Doddy Sumantyan HS,SH dan Gubernur Papua, JP Salossa, M.Si minta, agar masyarakat tetap tenang dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya. “Tahun lalu memang ada kegiatan yang perlu diwaspadai yang dilakukan oleh sebagian kelompok kecil masyarakat. Kami berharap untuk tahun ini, kegiatan seperti tahun lalu tidak perlu dilaksanakan lagi, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Oleh sebab itu apa yang sudah kami himbau lewat media

massa agar masyarakat tetap tenang dan melaksanakan aktivitasnya seperti biasa, harus sama-sama kita wujudkan,”ungkap Kapolda.

- ❖ Ditanya tentang rencana adanya kegiatan ibadah yang akan dilakukan oleh kelompok masyarakat pada 1 Desember, Kapolda menegaskan bahwa ibadah itu tidak dilarang tapi jangan dicampuri dengan kepentingan lain.
- ❖ Ketua Koalisi Lintas Nusantara Ev. Yop Kogoya mengatakan, meskipun Koalisi telah mempersiapkan Balon pengganti, namun disisi lain Koalisi juga sangat menyayangkan hasil keputusan MRP yang dinilai tidak tegas dalam memberikan keputusan terhadap status persyaratan orang asli Papua bagi Drs. Mohamad Musa'ad, M.Si.
- ❖ Meskipun surat izin penahanan Bupati Jayawijaya, Drs. David A Hubi sudah sampai di Polda Papua, namun tampaknya Kapolda masih memberikan angin segar bagi Hubi untuk melaksanakan kegiatannya sebagai Bupati. “Beliau sekarang statusnya masih sebagai pimpinan daerah dan ada kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan. Proses jalan terus. Izin dari presiden ini tentu akan kami tindaklanjuti, hanya kita sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh David Hubi. Sepanjang itu mengurus kegiatan masyarakat, kita berikan kesempatan. Nanti pada saatnya tentu akan ada langkah-langkah kepolisian sesuai dengan pengembangan penyidikan,” tegas Kapolda Papua Irjen. Pol. Drs. D. Sumantyan HS, SH.
- ❖ Sebanyak enam Raperdasi dari 14 Raperdasi yang diajukan Pemerintah Provinsi Papua, batal ditetapkan sebagai Perdasi. Keenam Raperdasi yang batal ditetapkan sebagai Perdasi itu masing-masing Raperdasi pendidikan, kesehatan, struktur organisasi dan kelembagaan Sekretariat Provinsi Papua, pemberdayaan ekonomi masyarakat, larangan masuknya hewan liar seperti anjing, kera dan sebangsanya, kependudukan dan penyertaan modal PT. Papua Gracia. Hal ini disayangkan Sekretaris Pansus/Perdasi DPRP, Yohanes Kumewara. Dikatakan ditundanya enam Raperdasi menjadi Perdasi tentunya akan berdampak pada kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengingat dengan mengacu pada Perdasi, pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
- ❖ Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura dengan persetujuan DPRD Kota Jayapura telah mengeluarkan surat larangan dan menutup pembangunan pasar di daerah perbatasan RI-PNG yaitu tepatnya di antara Distrik Muara Tami Jayapura dan Wutung PNG, namun rupanya pasar tersebut tetap dibangun.
- ❖ Guna menjaga kerukunan antar umat beragama khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura dan menghindari terjadinya konflik antar agama seperti hal yang terjadi pada beberapa daerah yang berada di daerah Indonesia. Kantor Departemen Agama Kabupaten Jayapura menggelar pertemuan konsultasi/silahturami pimpinan lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama se-Kabupaten Jayapura. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Jayapura ini, juga dihadiri Kakandepag Kabupaten Jayapura Ferdinand Makadada, Dandim 1701/Jayapura Letkol GHB Victor Tobing dan Kapolres Jayapura AKBP Jacob Kalembang. Selain diikuti oleh para tokoh dan pimpinan lembaga agama, kegiatan dialog juga diikuti oleh wakil-wakil dari akademisi teologia yang ada di Kabupaten Jayapura.
- ❖ Ancaman Yustus Nisaf untuk mem-PTUN-kan Gubernur, Bupati Jayapura dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Jayapura ternyata bukan gertak sambal semata. Pasalnya, begitu, surat pemberhentian dirinya telah ditetapkan oleh Gubernur Papua dan telah diterima oleh dewan, Yustus Mengaku langsung mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, “Saya melalui pengacara saya memang sudah mendaftarkan gugatan terhadap keputusan Gubernur tentang pemberhentian saya sebagai ketua dewan ke PTUN Jayapura”.

- ❖ Jelang 1 Desember Polres Jayapura lakukan berbagai operasi “Sesuai dengan perintah dari Kapolda tentang di berlakukannya Operasi Mambruk II maka kami menindaklanjuti dengan melakukan berbagai macam operasi seperti operasi kendaraan, miras dan juga sajam agar situasi terakhir yang bisa dibilang aman dan terkendali bisa tetap dipertahamkan sampai moment tersebut selesai dan moment lainnya,” jelas Kapolres Jayapura AKBP Jacob Kalembang.
- ❖ Wakil Ketua II Dewan Adat Biak, Jan D Kbarek meminta seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor dan Provinsi Papua tidak terprovokasi dengan ajakan oknum-oknum yang sengaja mengisukan atau membesar-besarkan 1 Desember sebagai hari keramat bagi Papua.
- ❖ Puluhan senjata tajam berupa kampak, busur, tombak, parang panjang, celurit dan badik berhasil disita aparat Kepolisian Polres Merauke dalam operasi mengantisipasi segala kemungkinan pasca pengumuman hasil penelitian Pepera dan operasi Mambruk. Hal ini dibenarkan Kapolres Merauke AKBP Drs. Wirawibawa, SH.
- ❖ Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Irian Jaya Barat bersama tokoh masyarakat sepakat untuk membentuk tim kecil guna mengawal penyusunan Draft perancangan peraturan penggantian undang-undang (Perpu) yang disusun Pemprov Papua sebagai payung hukum Provinsi IJB. Tim kecil ini diharapkan akan mengawasi setiap rancangan pasal yang nantinya akan dimasukkan dalam Perpu. Jangan sampai pasal-pasal dalam Perpu merugikan IJB.
- ❖ Polri tidak mengijikan acara syukuran peringatan kemerdekaan Papua Barat 1 Desember di wilayah hukum Polres Nabire, jika kegiatan tersebut diadakan di halaman terbuka, demikian ditegaskan Kapolres Nabire AKBP Urs Wahgio Raharjo.

1 Desember

- ❖ Pada perayaan 1 Desember, Filep Karma mengibarkan bendera Bintang Kejora di Lembaga Permasayarakatan Abepura.
- ❖ Dalam perayaan 1 Desember (HUT Kemerdekaan Papua Barat) ratusan massa melakukan aksi demo yang diikuti dengan pemblokiran jalan raya Abepura-Sentani. Dalam orasi politik yang dibacakan oleh koordinator Front Pembela Jalanan Papua Barat Jefri Pagawak mengatakan, rakyat Papua dengan semua elemen perjuangan pembebasan Papua Barat mendesak Pemerintah Republik Indonesia (RI), Pemerintah Belanda, Pemerintah Amerika Serikat dan PBB untuk segera mengadakan dialog Internasional dengan rakyat Papua Barat untuk meninjau kembali proses peralihan Papua Barat ke dalam NKRI.
- ❖ Mereka juga menuntut supaya tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) dibebaskan sesuai dengan remisi yang telah diberikan oleh presiden kepada tahanan tersebut. Tuntutan politik dalam perayaan tersebut pada dasarnya menuntut kemerdekaan dan menolak berada di bingkai NKRI.
- ❖ Sementara itu peringatan 1 Desember dalam bentuk Ibadah juga dirayakan di pemakaman Almarhum Theys Hiyo Eluay. Ibadah pemakaman ini berjalan lancar, aman dan khidmat, dihadiri oleh Kepala Pemerintahan Dewan Adat Papua, Sefnat Ohee, Mediator Presidium Dewan Adat Papua, Willy Mandowen, Ketua Dewan Adat Mamta Forkorus Yoboisembut, dan beberapa tokoh masyarakat dari daerah dan tokoh perempuan.
- ❖ Kapolda Papua melalui Direktur Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polda Papua, Kombes Pol. Drs. M. Situmorang mengatakan Bupati Jayawijaya Drs. David.A. Hubi resmi ditahan di Polda sejak Rabu (30/11).
- ❖ Ketua MRP Agus Alua mengungkapkan, usulan pemekaran Provinsi Papua menjadi lima provinsi oleh Gubernur JP. Solossa, M.Si hanyalah sebatas wacana yang perlu

dihargai. Yang diutamakan saat ini yaitu memprioritaskan pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) dengan memberikan payung hukum yang jelas.

- ❖ Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, James Modouw mengatakan, dari 2,5 juta jiwa penduduk di Provinsi Papua 36 persen atau sekitar 400.000 merupakan masyarakat yang buta huruf.

2 Desember

- ❖ Ketua Koalisi Papua Sejahtera Drs. Budi Baldus Waromi menilai Radiogram Mendagri tentang perpanjangan jabatan Gubernur/Wagub, Dr. JP Salossa dan Drh. Constan Karma sangat bertentangan dengan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 35 ayat 4 dan dicurigai sarat kolusi.
- ❖ Kepala Keamanan Lembaga Pemasarakatan Abepura, K. Rumbairusi, Bc IP menjelaskan, kemarahan Filep Karma dan mengibarkan Bintang Kejora LP Abepura, diakibatkan rasa kecewannya akibat tidak dikasih lihat tentang surat perpanjangan penahanan terhadap dirinya yang katanya dari MA.
- ❖ Kabid Humas Polda Papua, AKBP Drs. Kartono Wangsadasastra mengatakan, meski Drs. David A. Hubi adalah seorang Bupati, namun dalam melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, pihak Polda Papua tidak membeda-bedakan dengan tahanan lainnya.
- ❖ Penahanan terhadap Bupati Jayawijaya Drs. David. A. Hubi oleh Polda, ditentang keras massa yang pro Hubi di Wamena. Mereka menggelar aksi demo di kantor DPRD Jayawijaya, dalam orasinya massa menentang penahanan Bupati Hubi yang dilakukan Polda Papua. Kalau Hubi ditahan mereka juga minta agar para pejabat lain di Jayawijaya yang ikut terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana APBD 2003 – 2004, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan pejabat lainnya juga ditahan.
- ❖ Panglima TNI EDriartono Sutarto menjelaskan faktor lain yang bisa mempengaruhi kebutuhan untuk mendirikan devisi baru itu adalah tingkat ancaman keamanan di suatu daerah. Saat ini, masih menurut Panglima, kondisi keamanan di Papua masih sangat kondusif dan kekuatan aparat keamanan yang ditempatkan di sana sudah mencukupi.
- ❖ Kendati Gubernur Papua, DR JP Solossa M.Si menegaskan bahwa akhir bulan Desember ini payung hukum pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) telah ditetapkan, namun sampai saat ini konsep Provinsi IJB belum juga sampai ke Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal itu diungkapkan Ketua MRP Drs. Agus Alua.
- ❖ Pasar perbatasan RI – PNG yang buka sejak beberapa bulan lalu, disepakati untuk ditutup. Hal itu diputuskan dalam rapat koordinasi antara DPRD Kota Jayapura dengan komponen terkait.
- ❖ Kepala Badan Palnologi Kehutanan DR Yetti Rusli M.Si mengungkapkan, kondisi sumber daya hutan di Indonesia tidak terkecuali di Papua berada pada tingkat yang sangat memprihatinkan, bahkan jauh berbeda dengan awal 1970-an. Dimana telah jauh menurun baik kualitas maupun kuantitasnya serta bukan lagi merupakan salah satu penopang ekonomi yang kuat.
- ❖ Stok obat spesialistik yang biasanya digunakan di ruang operasi dan ICU kini dalam keadaan kosong di RSUD Biak Numfor. Direktur RSUD Biak Numfor Dr. Isak Pairunan mengungkapkan “Obat spesialistik ini sudah agak lama tidak berada di rumah sakit. Karena pembelian obat spesialistik ini harus dibeli melalui bantuan pemerintah daerah lewat APBD”.
- ❖ Peristiwa tertembaknya warga sipil bernama Liborius Oka (33) salah seorang karyawan PT. Korindo oleh oknum anggota TNI dari satgas Yonif 643/WNS yang akhirnya menewaskan korban di BTN Korindo Asiki, Distrik Jair, Boven Digoel mendapat reaksi keras Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua. Direktur LBH Papua

Paskalis Letsoin SH mengungkapkan, berdasarkan hasil temuan di lapangan dan kesaksian beberapa orang, termasuk istri korban, terungkap bahwa ditembaknya korban oleh oknum TNI itu bukan karena korban berusaha merebut senjatanya. Sebaliknya karena adanya dugaan masalah perselingkuhan yang terjadi antara seorang perempuan dan oknum satgas tersebut. Pernyataan pihak LBH ini bertolak belakang dengan pernyataan pihak Kodam XVII Trikora.

- ❖ Puluhan guru-guru Pegawai Negeri maupun honorer yang mengajar di sekolah-sekolah yayasan di Manokwari melakukan aksi demo ke kantor Bupati Manokwari. Mereka mempertanyakan dana insentif guru yang belum dibayar hingga saat ini. Bahkan jumlahnya ada perbedaan dengan sekolah di yayasan lain.
- ❖ Terdakwa kasus *illegal longing* Mr. Tie yang marak diberitakan sebagai cukong kayu asal Malaysia dan sempat dijadikan sebagai (DPO) Daftar Orang Hilang oleh Mabes Polri, kini bisa hidup bebas. Pada sidang di Pengadilan Negeri Manokwari, Mr. Tie hanya divonis 6 bulan penjara. Putusan Majelis Hakim ini jauh dari tuntutan Jaksa Panuntut Umum (JPU), menuntut Mr. Tie 6 bulan penjara dan langsung bebas karena habis masa potongan.

3 Desember

- ❖ Gubernur Papua Dr. JP. Solossa M.Si mengatakan meski Bupati Jayawijaya Drs. Davi A. Hubi telah ditahan oleh Polda Papua terkait kasus dugaan korupsi di Kabupaten Jayawijaya, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum dinonaktifkan.
- ❖ Wakil Bupati, Adrianus Agus Kafiari SE, yang juga Ketua Harian KPAD Biak Numfor mengatakan perpindahan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Biak Numfor disinyalir sebagai salah satu penyebab peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Biak Numfor.
- ❖ Adanya isu-isu yang menyebutkan Ibu Kota Provinsi Irian Jaya Barat akan dipindahkan dari kota Manokwari ke tempat lain. Pjt.Gubernur IJB, Timbul Pujiyanto menegaskan, bahwa Pemerintah Pusat, Pemprov, DPRD sudah final bahwa Ibu Kota Provinsi IJB berada di Manokwari. Hal ini sesuai dengan dengan pernyataan sekretaris Menkopolkam Joko Sumaryanto.
- ❖ Terdakwa, Marthen Willem Maryen, Kepala Administrator Pelabuhan (Adpel) Merauke dan terdakwa, Baso, Kepala Seksi Kelautan Adpel Merauke yang menjadi terdakwa atas musibah tenggelamnya KMP Digoel 8 Juli 2005, akhirnya diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke.

5 Desember

- ❖ Direktur Eksekutif ICS Papua, Budi Setiyanto SH, mengungkapkan, “Kalau mau *fair* mestinya jabatan gubernur tidak diperpanjang. Sebab di dalam UU no.32 dikatakan bahwa kalau tidak ada Gubernur, maka bisa jabatan itu dipegang oleh Sekda.” Inikan sebenarnya cara politis, kalau mau *fair* dalam pelaksanaan Pilkada ini, mestinya ada Caretaker yang bukan dari kandidat”.
- ❖ Wakil Gubernur Papua Drh. Costan Karma mengaku merasa kaget karena sampai tanggal 23 November lalu belum juga ada pejabat Caretaker, yang ada justru Radiogram Mendagri tentang perintah perpanjangan masa jabatan dirinya bersama Gubernur JP Solossa. Sesuai dengan aturan dan mekanisme yang harus mengeluarkan SK adalah Presiden. “Hingga saat ini belum ada penunjukkan pejabat Gubernur di Provinsi Papua sebagai pelaksana tugas sementara penyelenggara roda pemerintahan daerah, kita di daerah secara pribadi tidak bisa memaksakan kehendak”.

- ❖ 48 prajurit TNI yang bertugas di lingkungan Kodam XVII / Trikora dilaporkan terinfeksi HIV/AIDS, dimana 12 diantaranya telah meninggal dunia. Hal ini dibenarkan Kapendam XVII/Trikora Mayor Caj G.T Situmorang.
- ❖ 14 mantan Anggota DPRD Jayawijaya periode 1999-2004 menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan Korupsi dana APBD Kabupaten Jayawijaya 2003-2004. Hal ini dibenarkan Kapolres Jayawijaya AKBP Robert Djoenso.
- ❖ Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Yapen terpilih Ir. Daud Soleman Betawi dengan Drs. Decky Nenepat secara resmi dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua, Dr. JP Solossa M.Si atas nama Menteri Dalam Negeri. Pelantikan itu dilakukan dalam bentuk sidang Paripurna Istimewa DPRD Yapen dipimpin langsung Ketua Dewan, Amon Wanggai.
- ❖ Puluhan wartawan yang tergabung dalam solidaritas wartawan Papua (SWP) menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Dok II. Aksi demo itu dilakukan terkait pengusiran seorang wartawan Defrianti dari Tabloid Suara Perempuan Papua (TSPP) oleh Kepala Kesbang Provinsi Papua, Wempi Wola di kantornya kompleks kantor Gubernur Dok II, Selasa (29/11)
- ❖ Karena tidak memiliki dokumen yang lengkap dalam hal ini Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dua truk yang mengangkut kayu olahan diamankan di Polsek Sentani Timur. Adapun kayu olahan tersebut yaitu ukuran 5x10 meter sebanyak 100 batang dan ukuran 3x25x7 sebanyak 9 batang. Hal ini dibenarkan Kapolres Jayapura AKBP Jacob Kalembang BA.
- ❖ Ketua DPRD Kabupaten Supiori Otto Albert Msen meminta agar Pemerintah Kabupaten Supiori pada masa kepemimpinan Bupati, Jules F Warikar dan Wakil Bupati Julianus Mnusefer lebih mensejajarkan pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Sebab dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Supiori, menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang mengakibatkan pelayanan pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat Supiori belum optimal.
- ❖ Pangdam XVII Trikora Mayor Jenderal TNI George Toisutta menegaskan, proses hukum terhadap pelaku penembakan di Asiki yang menyebabkan korban meninggal Liborius Oga (33) tidak akan dilakukan secara tertutup. "Karena negara ini adalah negara hukum. Kalau ada yang salah akan kita proses secara hukum".
- ❖ Kantor Subdin Dinas Kesehatan Kota Jayapura dipalang sejumlah staf kantor Subdin Dinkes Kota Jayapura, terkait pelantikan Drg Suyono Angkasa MPH.

6 Desember

- ❖ Berdasarkan Surat Keputusan DPRD, nomor: 20/DPRP/2005 tentang lima bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua masa bakti 2005 – 2010, maka calon yang ditetapkan adalah :

1. Dr. JP. Salossa, M.Si dan Paskalis Kossy, S.Pd.M.Si dari Partai Golkar
2. Drh. Costan Karma dan Donatus Mote, SE, MM dari koalisi Papua Bersatu
3. Lukas Enembe, S.Ip dan H.Arobi A.Aituarauw, SE, MM dari Koalisi Lintas Nusantar.
4. Dick H. Wabiser dan Ir.Simon P.Inaury, M.Si dari Koalisi Papua Sejahtera
5. Barnabas Suebu, SH dan Alex Hasegem dan Koalisi Papua Baru

- ❖ Aktivis ICS Papua Bambang Sugiono menilai Pemda Kota Jayapura belum mempunyai komitmen yang jelas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik

- ❖ Sebagai bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap komitmen yang tinggi dan upaya yang sungguh-sungguh dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura Habel M Suwae, S.Sos, MM sesuai SK Menteri Pertanian no.402/Kpts/KP.450/11/2005 ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Tahun 2005.
- ❖ Sidang kasus dugaan korupsi senilai Rp 1,2 M lebih yakni penyalahgunaan dana Peningkatan Upaya Kesehatan (PUK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dengan terdakwa Hamzah (Pimpro) dan Cristina Tarukpono (Benpro), kembali digelar dipengadilan Negeri (PN) Wamena.

7 Desember

- ❖ Pleno penetapan nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2005 – 2010 di KPUD Provinsi Papua batal. Pasalnya, pleno yang ikut dihadiri Parpol pendukung pasangan calon tersebut berlangsung ricuh.
- ❖ Ketua KPUD Provinsi Papua, Ferry Kareth, sangat kecewa dengan peristiwa yang terjadi di KPUD dalam penetapan nomor, karena persoalan yang seharusnya dibawa ke DPRD dilimpahkan ke KPUD, “Saya sangat menyayangkan ini, karena KPUD sudah kerja setengah mati padahal persoalannya dari tempat lain tetapi di bawah ke KPUD. Ini bukan kewenangan kami”.
- ❖ Ferry Kareth mengatakan, “Saya melihat sendiri secara lembaga anggota DPRD sudah setuju secara mayoritas melalui voting meski ada dua orang yang tidak setuju. Keputusan itu kemudian dibawa ke KPUD”.
- ❖ Calon Gubernur Provinsi Papua periode 2005-2010 Drh. Constan Karma mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Provinsi Papua.
- ❖ LMA Jayawijaya mendesak Polda Papua agar penahanan Bupati Hubi ditanggguhkan sambil proses hukumnya berjalan, dan bilamana penahanan Bupati Drs.David Hubi tidak ditanggguhkan Polda Papua, masyarakat Jayawijaya pendukung Drs. David Hubi akan melakukan boikot Pilkada Provinsi Papua. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua yang diketuai Agus N Hubi (Ketua Rayon I), Dauke Mabel (Ketua Rayon II) dan Naligi Kurisi (Ketua Rayon III) dan ditandatangani oleh 184 orang perwakilan elemen masyarakat Jayawijaya.
- ❖ Komitmen Tim Polda Papua untuk tidak menanggguhkan penahanan terhadap tersangka Bupati Jayawijaya Drs.David A. Hubi, tetap dipegang. “ David A.Hubi masih tetap ditahan dan kondisi kesehatannya juga tidak ada masalah”, ungkap Kabid Humas Polda Papua AKBP Drs. Kartono Wangsadsastra.
- ❖ Peranan perempuan baik sebagai ibu rumah tangga atau sebagai warga negara merupakan sumber daya insani pembangunan yang perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menangani berbagai persoalan sosial dan ekonomi, yang diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu diungkapkan Walikota Jayapura, Drs.MR. Kambu M.Si pada perayaan HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) kota Jayapura ke – 16.
- ❖ Sekitar 100-an tenaga guru bantu di Kabupaten Biak Numfor mendatangi kantor Bupati Biak Numfor. Mereka mempertanyakan masalah honor yang jumlahnya di bawah UMP yaitu Rp.460.000 perbulan dan pembayaran yang kurang lancar dan juga menanyakan tentang peluang mereka untuk direkrut menjadi pegawai negeri sipil.
- ❖ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Biak Numfor menarik 500-an kartu kompensasi BBM (KKBBM) yang direncanakan di alokasikan di lokasi Kabupaten Biak Numfor. Alasan penarikan tersebut menurut Kepala BPS Kabupaten Biak

Numfor Abdul Muin Arif S.Sos karena, selain alamat pemegang kartu yang tidak jelas, KKBBM itu diterima oleh warga yang tidak berhak seperti PNS dan pensiun.

- ❖ Persidangan dengan terdakwa Bartholomeus Butan, SE selaku staf administrasi pada PT.Biru Hijau Jaya, Abdul Kadir selaku Mandor lapangan PT.Biru Hijau Jaya dan Yoris Luis Wetebessy sebagai Ketua Kopermas Samaray dalam kasus Ilegal Logging kembali digelar di pengadilan Negeri Manokwari yang dipimpin Hakim I Gede Putu Hariadi,SH dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edi S utomo,SH.

8 Desember

- ❖ Terkait terjadinya keributan di kantor KPUD Kamis (7/12) saat pleno penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur / Wagub Provinsi Papua periode 2005-2010, di sayangkan Gubernur Papua DR.JP.Solossa M.Si. menurut Gubernur, soal caretaker yang saat itu menjadi biang keributan sesungguhnya bukanlah suatu yang sulit. Ia justru merasa aneh adanya kalimat yang seolah-olah menyuruh menindak pihak-pihak yang melakukan rekayasa . “ Rekayasa apa, tidak ada orang yang melakukan rekayasa disini, ini pertimbangan pemerintah pusat,”.
- ❖ Menyusul dibatalkannya penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur karena ricuh di KPUD, langsung disingkapi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Untuk menghindari semakin molornya jadwal pelaksanaan pilkada di Provinsi Papua, Tim yang dibentuk DPRP telah berangkat menuju Jakarta guna membicarakan persoalan penunjukan caretaker dengan pemerintah pusat.
- ❖ Anggota Pokja Papua, Frans Maniagasi, menilai keributan yang terjadi di KPUD Provinsi Papua, sebagai proses pembelajaran politik yang kurang baik kepada masyarakat. Dikatakan, kalau dilihat, setiap 5 tahun sekali dalam ajang pemilihan Gubernur, baik yang dipih oleh DPRD atau secara langsung oleh masyarakat, selalu ada konflik di antara sesama orang Papua. “Konflik itu sengaja diciptakan oleh Jakarta untuk mempertahankan politik *divide et impera* (politik adu domba) di antara orang Papua sendiri”.
- ❖ Tiga Pejabat Pemda Kabupaten Jayawijaya resmi tersangka kasus korupsi, antara lain, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya yang berinisial HAK, Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Jayawijaya yang berinisial DM dan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya yang berinisial ARJ. “Ketiga orang ini resmi menjadi tersangka, namun mereka belum ditahan,” menurut Kabid Humas Polda Papua AKBP Drs. Kartono Wangsadisastra.
- ❖ Berbagai persoalan yang menimpa Puskesmas Pembantu (Pustu) di daerah terpencil, mulai dari tenaga medis, fasilitasnya baik dari kondisi gedung, serta peralatan lainnya, yang mana sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Menyingkapi itu Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura, Icmwanul Muslimin meminta Dinas Kesehatan Kota agar perlu memikirkan penanganan terhadap sejumlah Pustu yang bermasalah.
- ❖ Ketua Harian Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Jayapura, H. Sudjarwo, BE mengatakan, berbagai komponen yang terdapat di Kota Jayapura yang bergerak dalam bidang penanganan HIV/AIDS, hendaknya jangan bersifat seremonial saja.
- ❖ Kepala Balai Sertifikasi Produksi Hasil Hutan (BSPHH) wilayah Papua Ir. Hendrik Ruamba menyatakan, bahwa terkait dengan masalah *illegal logging*, maka kini pengeluaran izin pengangkutan kayu jika di atas 6000 M3/Tahun, ijinnya dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan; sedangkan di bawah 6000 M3/Tahun, ijinnya dikeluarkan oleh Gubernur Papua. Dengan demikian segala persoalan yang terjadi akan lebih mudah dikontrol dan bisa diketahui siapa yang harus bertanggungjawab, dan juga tidak akan lagi saling bertentangan satu dengan lain.

- ❖ Meski secara blak-blakan Kodam XVII/Trikora mengungkapkan kepada publik melalui media massa tentang 48 prajurit Kodam VXII/Trikora yang dinyatakan positif terinfeksi virus HIV/AIDS, namun sampai saat ini wilayah Korem 173/PVB yang meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Yapen Waropen, Nabire, Paniai dan Puncak Jaya belum ditemukan adanya anggota TNI AD yang positif terinfeksi virus HIV/AIDS. Hal ini ditegaskan Komandan Korem 173/PVB, Kolonel Inf. Erfi Triassunu.
- ❖ Jumlah penderita TB Paru di Kabupaten Biak Numfor yang berhasil dideteksi Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sampai dengan triwulan kedua tahun 2005 atau periode Januari – Juni 2005 berjumlah 104 orang. Jumlah tersebut diperkirakan masih jauh lebih besar, sebab disinyalir masih banyak penderita TB Paru yang belum terdeteksi.
- ❖ Kejaksaan Negeri Merauke menetapkan 5 mantan anggota DPRD Merauke periode 1999 – 2004 yaitu Masana Taringan, Chairullah, H.Motto, Adrianus Terin dan Sitor Simbolon sebagai tersangka baru dalam kasus penyalahgunaan keuangan di DPRD Merauke tahun anggaran 2002.
- ❖ Di Asmat, baru 27 % anak usia sekolah menikmati pendidikan dasar. Hal ini dingkapkan Bupati Asmat, Yuvensius Alfonsius Biakai, BA.

10 Desember

- ❖ Menkokesra, Aburizal Bakrie menegaskan, berita tentang terjadinya kelaparan di sejumlah desa di Kabupaten Yahukimo, tidak benar adanya. Dari hasil pemantauan di sejumlah desa bersama Menteri Pertanian, Anton Supriantono, tidak melihat suatu keadaan seburuk yang digembar-gemborkan dalam berita bahwa di Yahukimo telah terjadi suatu peristiwa kelaparan dan mengakibatkan korban berjatuh hingga 55 orang.
- ❖ Gubernur Papua Dr. JP. Solossa juga membantah, dugaan kasus kelaparan secara massal yang dikabarkan menimpa masyarakat di 7 Distrik Kabupaten Yahukimo.
- ❖ Tiga Pejabat Pemda Kabupaten Jayawijaya masing-masing: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Drs. Hasan Abdul Kadir dan kabag. Pengolahan Barang Daerah, Drs. Daniel Mandowen dan Mantan Kepala Bappeda Abdul Rahim Jumati, ketiganya resmi ditahan Polda Papua dari kasus pengembangan korupsi Bupati Hubi.
- ❖ Di Manokwari *illegal Logging* mulai marak, sedangkan pelakunya adalah masyarakat yang bermukim di sekitar areal hutan, dengan alasan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Manokwari, AKBP Drs. Pietrus Waine, SH. Hanya masih berskala kecil, aparat baru sebatas memantau”.

12 Desember

- ❖ Kepala Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua, CH.Rumbino, MM mengungkapkan, titik rawan pangan yang sementara ini terjadi di Kabupaten Yahukimo adalah warga yang tinggal di lereng-lereng gunung dan ketinggian sekitar 1500 kaki.
- ❖ Sementara itu Mantan Wakil Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, S.IP mengatakan peristiwa kelaparan yang membuat 55 orang meninggal dunia di 7 Distrik di Kabupaten Yahukimo, sebenarnya bukan peristiwa yang baru di wilayah Pegunungan Tengah, namun untuk kesekian kalinya. Hanya saja korbannya tidak sebanyak itu dan tidak diinformasikan.
- ❖ Ketua DPRD Provinsi Irian Jaya Barat, Jimmy Demianus Ijie kurang setuju dengan adanya tim dari Provinsi IJB yang akan mengawal penyusunan Draf Perpu sebagai payung hukum bagi Provinsi Irian Jaya Barat.

13 Desember

- ❖ Departemen Dalam Negeri meminta Bupati/Walikota untuk wajib melapor kepada Gubernur jika hendak pergi keluar daerah. Hal itu didengungkan, setelah terjadi bencana kelaparan yang menewaskan 55 warga Yahukimo.
- ❖ Pengamat Politik Universitas Cenderawasih Drs. Beatus Tambaip, MA mengatakan, antisipasi yang dilakukan pihak TNI terkait dengan sinyalemen menguatnya OPM tersebut adalah wajar-wajar saja, sebab itu sudah merupakan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara. Ia juga sependapat jika dikatakan OPM yang berjuang melalui jalur diplomasi lebih berbahaya daripada gerakan bersenjata.
- ❖ Komisi A DPRD Provinsi Papua dari Dapil Yahukimo Arnold Walilo, S.Pd mengatakan, sangat disayangkan sekali meskipun sudah ada puluhan orang jadi korban akibat bencana kelaparan yang melanda Kabupaten Yahukimo, namun masih saja dibantah Menkokesra Aburizal Bakrie, termasuk Gubernur Provinsi Papua Dr. JP. Solossa M.Si yang menyatakan jika kasus kelaparan massal itu terlalu dibesar-besarkan media. Karena musibah kelaparan di Yahukimo bukan hal baru.
- ❖ Ketua KPU Provinsi Papua Ferry Kareth mengaku pihaknya belum bisa menyatakan jadwal pasti pelaksanaan Pilkada di Papua.
- ❖ Anggota Komisi D DPRD Kota Jayapura H. Tamsul Makawaru minta agar guru yang minta pindah tugas dikenakan denda Rp 5 juta, khususnya guru-guru mata pelajaran spesifik seperti IPA dan matematika. "Guru yang memegang mata pelajaran spesifik jika minta pindah akan dikenakan denda 5 juta, hal ini dilakukan agar guru tidak semauanya pindah tugas," ujarnya.
- ❖ Gubernur Papua DR JP Solossa M.Si dalam kunjungannya ke Distrik Kelila, kabupaten Jayawijaya mendapat penghargaan dari masyarakat melalui 8 perwakilan kepala suku di wilayah Bogo Kabupaten Jayawijaya sebagai Tokoh pembangunan Papua.
- ❖ Ketua MRP Provinsi Papua Drs. Agus Alua Alue mengatakan landasan payung hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) diperkirakan akan rampung akhir Januari 2006.
- ❖ Menyusul dikeluarkannya Nomor register perkara yang diajukan ke MA dengan Nomor 1970/XII/MU/2000, serta penyerahan berkas laporan ke Komnas HAM Pusat, terkait gugatan dari mantan bakal calon (Balon) Wakil Gubernur Papua Drs. Mohammad Musa'ad terhadap hasil keputusan MRP. Anggota Panwas Pilkada Provinsi Papua Muslim, SH, M. Hum menegaskan, Panwas tidak mengetahui apa tujuan dan target yang ingin dicapai Koalisi Lintas Nusantara dengan melaporkan perkara ini sampai ke Komnas HAM.

14 Desember

- ❖ Tahun 2006, dana Otonomi Khusus akan naik 100% . Kalau di tahun 2005 ini hanya berkisar Rp 1,7 triliun, maka di tahun 2006 mendatang akan naik menjadi Rp 2,5 triliun, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp. 400 M menjadi Rp. 810 M. hal ini diungkapkan Gubernur Papua DR.JP Solossa M.Si.
- ❖ Pihak Kepolisian Merauke berhasil menyita ribuan botol minuman keras yang diseludupkan/dikirim ke Kapi ibukota Kabupaten Mappi tanpa dilengkapi dokumen. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Merauke AKBP Drs. Wirawibawa, SH.
- ❖ Anggota Pokja Papua di Jakarta Frans Maniagasi mengatakan Pemerintah Pusat jangan paksakan penyelesaian masalah Irian Jaya Barat untuk diselesaikan dalam bulan ini, masyarakat Papua sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan, baik situasi politik yang panas menjelang Pilkada, kasus kelaparan di Yahukimo, dan

terutama kesiapan batin masyarakat Papua yang mayoritas kristen dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru.

15 Desember

- ❖ Naiknya dana Otsus pada tahun 2006 yang diperkirakan akan mencapai 100 persen (Dari Rp. 1,7 Triliun menjadi Rp. 2,5 Triliun) diharapkan punya dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua. Bahkan lebih dari itu, dampak positifnya harus dirasakan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Institut Penguatan Masyarakat Sipil (ICS) Papua, Bambang Sugiyono SH,MH.
- ❖ Ir. Marthen Kayoi yang didakwa dengan kasus *illegal logging* dituntut 6 tahun penjara potong masa tahanan, serta membayar denda sebesar Rp 1 Miliar subsider 6 bulan kurungan.
- ❖ Diduga korupsi sebesar Rp 61.520.000, seorang staf Dinas Perhubungan Kota Jayapura bernama Abas Iba (45), dituntut satu tahun enam bulan penjara potong masa tahanan. Dalam tuntutan JPU, Marthen Tandi,SH terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan korupsi sesuai pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999.
- ❖ Puluhan aparat desa di Biak Numfor mendatangi kantor Bupati. Kedatangan para Kepala Desa beserta aparat desa lainnya dengan maksud mempertanyakan keterlambatan pembayaran tunjangan aparat desa triwulan keempat 2005.
- ❖ Di Desa Duber Distrik Supiori Timur, 30 Balita terserang batuk dan sesak nafas akibat cuaca dingin, hal ini dilaporkan Sekretaris Desa Duber Yunus Marian. Menurut Yunus, para balita tersebut sulit mendapat pengobatan di desanya, karena hanya ada Pustu (Puskesmas pembantu) tetapi tenaga medisnya tidak ada. Akibatnya ada sebagian Balita yang orang tuannya larikan ke kota.
- ❖ Puluhan warga yang berasal dari Keluarga besar Rumberar atau marga Rumberar, melakukan aksi demo ke kantor DPRD Biak Numfor. Kedatangan mereka untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi yaitu pelepasan tanah adat seluas 93,652 m² di Tanjung Barari Distrik Baik Timur yang saat ini sedang dilakukan pembangunan radar milik TNI-AU. Sementara itu Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosek Hanundnas) IV Marsekal Pertama TNI Rodi Suprasodjo S.IP, mengatakan “Berdasarkan dokumen yang ada, masalah lokasi pembangunan Radar TNI-AU di Tanjung Barari Distrik Biak Timur sudah tidak mempunyai masalah”.
- ❖ Seorang aktivis perempuan Papua Golda Aronggear SH, pukul 16.30 WIT menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Dok II Jayapura karena sakit.

16 Desember

- ❖ Setelah menjalani penahanan di Polda Papua kurang lebih 3 minggu (sejak 30 November), tersangka kasus korupsi dana APBD Kabupaten Jayawijaya 2003-2004, Drs. David A. Hubi dikirim ke Wamena untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Hal ini dibenarkan Kajati Papua, Kadir Sitanggung SH”.
- ❖ Ketika mendengar dan melihat Hubi berada di Kantor Kejaksaan Negeri Wamena, maka ratusan massa pendukung Hubi langsung mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Wamena untuk meminta penjelasan Kajari terkait dengan proses penahanan Hubi.
- ❖ Adanya isu yang beredar di masyarakat bahwa Kapolres Jayawijaya, Robert Djoenso berambisi menjadi caretaker Bupati atau Wakil Bupati, secara tegas dibantah olehnya, “Saya bukan orang politik dan tidak suka berpolitik, keberadaan

saya di Jayawijaya hanya menjalankan perintah Kapolri dalam hal penegakan hukum,” tegasnya.

- ❖ Komisi IV DPR-RI kelak akan mengusulkan agar dibuat suatu *grand design* tentang bagaimana membangun sisten ketahanan pangan di Papua, supaya peristiwa kelaparan seperti yang terjadi di Kabupaten Yahukimo kelak tidak terulang lagi.
- ❖ Puluhan guru bantu se-Kabupaten Biak Numfor, melakukan aksi demo ke kantor DPRD Biak Numfor. Kedatangan para guru bantu yang tergabung dalam Persatuan Guru Bantu Kabupaten Biak Numfor diterima langsung Wakil Ketua I DPRD, Jan D. Kabarek. Dalam kesempatan tersebut, para guru bantu menyampaikan 3 tiga aspirasi yaitu pertama masalah insentif bagi guru bantu untuk 2005 yang belum diberikan termasuk honor yang masih di bawah UMP. Kedua peluang pengangkatan menjadi CPNS bagi para guru bantu. Ketiga masalah nasib guru bantu yang diangkat 2003 yang akan mengakhiri kontraknya 31 Desember 2005.

19 Desember

- ❖ Papua berduka, Pukul 21.40 WIT Gubernur Provinsi Papua DR.JP.Salossa.M.Si meninggal dunia di RSUD Dok II Jayapura, karena diduga mengalami serangan jantung.
- ❖ BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Drs. David A. Hubi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wamena. Brkas perkara tersebut diserahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Wamena diwakili Kasipidum, Andre Kurniawan SH dan diterima oleh salah seorang staf bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, Budiman.
- ❖ Sedikitnya 35 orang warga Wamena mendatangi kantor Gubernur di Dok II Jayapura. Mereka meminta agar Gubernur segera mengeluarkan SK pemberhentian/ penonaktifan Drs. David A. Hubi dari jabatannya sebagai Bupati Jayawijaya dan Wakil Bupati Jayawijaya Jigibalom, S.Sos.
- ❖ Kepala kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayapura, Dra.Maria Bano mengungkapkan kasus kekerasan rumah tangga terutama pada perempuan dan anak di Kabupaten Jayapura harus ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, Tim Pengelola Pemberdayaan Perempuan (TP4) akan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA).
- ❖ Wakil Bupati Jayapura, Ir. Tunggul TH Simbolon, MA mengungkapkan bahwa program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang merupakan salah satu program prioritas Otsus, banyak dilaksanakan dalam bentuk pelatihan maupun bentuk paket usaha. Namun “Jangan sekedar kegiatan yang sifatnya proyek, perlu pendampingan yang jelas di tengah masyarakat supaya bisa terus berlanjut dan berkembang” ungkap Wabup.
- ❖ Puluhan tenaga medis dan dokter yang bekerja di Puskesmas-Puskesmas serta RSUD Nabire yang dipimpin oleh Ketua Persatuan Perawat Indonesia (PPI) Kabupaten Nabire M Nur Kasut,M Kes, melakukan aksi demo ke DPRD Kabupaten Nabire. Aksi demo ini dipicu oleh rasa ketidakpuasan tenaga medis terkait adanya kesenjangan sosial menyangkut besarnya insentif yang diberikan kepada para tenaga medis.
- ❖ Sekitar 581 ekor ikan kaloso (arwana) yang akan diseludupkan lewat udara oleh seorang penumpang berinisial AL, dari bandara Mopah Merauke, digagalkan oleh petugas Karantina Ikan Klas II Merauke. Hal ini dibenarkan Kepala Karantina Ikan Klas II Merauke, Muji Dwi Saptono,A.Pi.
- ❖ 4 warga kampung Tabonji dan Suam, Distrik Kimaam, sebelah selatan Kabupaten Merauke dilaporkan meninggal dunia akibat terserang diare, sementara puluhan warga lainnya menjalani perawatan. Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menyebutkan, 4 orang meninggal dunia dan 92 warga masih

menjalani perawatan. 92 warga yang masih dirawat tersebut terdiri dari laki-laki 46 orang dan perempuan 46 orang. Sedangkan yang terserang diare pada semua umur mulai dari 1 tahun tahun sampai 60 tahun ke atas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke Drg. Josef Rinta R.M.Kes mengatakan, mereka yang meninggal itu karena tidak dapat tertangani lagi akibat mengalami dehidrasi yang cukup besar.

- ❖ Faktor kurangnya dana, sarana dan tenaga medis menjadi penyebab utama terbelenggelainya pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Kabupaten Jayawijaya yang yang diikuti 64 orang peserta di Jayawijaya.
- ❖ Filep Karma mencoba untuk bunuh diri dengan melompat dari atap LP setinggi 10 meter.
- ❖ Di halaman Mapolda Papua dilakukan upacara resmi serahterima pataka (bendera lambang kesatuan Polda Papua), dari pejabat lama Irjen Pol. Drs. Doddy Sumantyan HS, SH kepada pejabat baru Brigjen Pol Drs. Tommy Trider Jacobus sebagai kapolda Papua.
- ❖ Ratusan massa yang menamakan dirinya Solidaritas Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Kepala Burung, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Dok II Jayapura. Mereka menuntut meninggalnya Gubernur JP Salossa diusut tuntas, dalam melakukan aksi unjuk rasa ini mereka juga sempat melakukan aksi perusakan kompleks kantor Gubernur.
- ❖ Terdakwa Praka Zukarnaen Lubis anggota Satgas Yonif 643/VWS di dakwa pasal primer 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan pasal subsider 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menghilangkan nyawa orang lain. Dakwaan ini dibacakan oditur Militer Mayor Sus Budiharto SH dalam sidang pengadilan militer kasus penembakan warga sipil Liborius Oka (32), karyawan PT. Korindo di BTN Korindo Asiki Distrik Jair Boven Digoel.

20 Desember

- ❖ Molornya pelaksanaan Pilkada Provinsi Papua dalam rangka memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2005-2010 dengan batas yang belum ditentukan, jadi keprihatinan tersendiri bagi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua, J.Wimpie Wola. Apalagi akhir-akhir ini suhu politik di Papua menghadapi Pilkada sudah mulai memanas. Ia menilai, jika Pilkada ditunda-tunda terus, bisa menimbulkan resiko berat. Sebagai contoh bisa dipolitisir, sehingga situasi akan semakin tidak menentu dan pasti akan mengganggu jalannya pembangunan di Papua.
- ❖ Terkait dengan belum berhasilnya para utusan DPRP yang menemui Presiden RI dalam rangka menanyakan Careteker Gubernur, menurut John Ibo bahwa gagalnya para utusan ini karena tingkat kesibukan presiden yang cukup tinggi. Disamping itu, keputusan ini merupakan wewenang Presiden, jadi tidak bisa dilakukan Mendagri sebelum ada keputusan dari Presiden.
- ❖ Bupati Jayapura Habel M Suwae,S.Sos,MM mengungkapkan bahwa belajar pengalaman adanya ancaman kelaparan di Yahukimo, yang memang merupakan tanggung jawab dari kepala daerah. Bupati mengharapkan ada kewenangan dari Pemerintah provinsi dan Pusat bagi Kabupaten Jayapura untuk membangun akses jalan menuju daerah terisolir, meskipun melewati daerah hutan lindung.
- ❖ Pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Supiori tampaknya semakin memprihatinkan. Pasalnya, dari 4 Puskesmas di sana, saat ini tak ada satupun dokter yang bertugas di Kabupaten tersebut. Akibatnya, harus menggunakan tenaga Dokter dari Biak Numfor. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori Gerald Wonsiwor.

21 Desember

- ❖ Jenazah almarhum DR JP Solossa Msi (Gubernur Papua) dimakamkan di TPU Kristen Tanah Hitam Abepura, Kota Jayapura. Sebelum berangkat ke pemakaman, terlebih dahulu dilaksanakan ibadah pelepasan jenazah di aula gedung negara. Upacara pemakaman jenazah dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
- ❖ Menteri Dalam Negeri Muhammad Maa'ruf menunjuk Sekda Drs. Andi Basso Basaleng, sementara mengisi kekosongan kepemimpinan sebagai Povinsi Papua sampai ada pelantikan Careteker Gubernur.
- ❖ Ratusan aparat kampung dari 377 kampung yang ada di Kabupaten Jayawijaya melakukan aksi demo damai di halaman kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya. Mereka menuntut Pemkab Jayawijaya segera membayarkan honor triwulan IV/2005.
- ❖ Setelah 4 orang meninggal dan puluhan warga lainnya terserang diare, maka saat ini 3 warga dilaporkan terserang demam berdarah, dua diantaranya merupakan anak-anak dan satunya orang dewasa dan saat ini dirawat di RSUD Merauke. Dengan kasus ini Dinas Kesehatan Merauke menetapkan sebagai kejadian luar biasa. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Merauke Drg. Josef Rinta, M.Kes
- ❖ Akibat menunggak pembayaran rekening listrik selama 6 bulan, aliran listrik di gedung DPRD kabupaten Jayawijaya terpaksa diputus oleh pihak PT. PLN Wamena cabang Papua. Akibat pemutusan ini, gedung rakyat itu gelap gulita.

22 Desember

- ❖ DPD Golkar resmi mendaftarkan Drs. John Ibo MM ke Pansus Pilkada, sebagai calon Gubernur Papua mendampingi Paskalis Kosay sebagai Wakil Gubernur Papua periode 2005-2010.
- ❖ Sementara itu pengamat politik Universitas Cenderawasih, Drs Beatus Tambaip, MA dan Drs. HB Bleskadit M.Si mengatakan sikap resmi Partai Golkar yang menetapkan Drs. John Ibo MM menggantikan almarhum DR JP Salossa sebagai calon Gubernur Provinsi Papua periode 2005-2010 adalah pilihan yang tepat. Dikatakan tepat, sebab selain kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Ibo juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang dikenal cukup baik oleh masyarakat dan mempunyai kharisma kepemimpinan.
- ❖ Kasus korupsi 3 tersangka pejabat Pemkab Jayawijaya masing-masing Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Drs. Hasan Abdur Kadir, Kabag Pengolahan Barang Daerah Drs Daniel Mandowen dan Mantan Kepala Bappeda Abdul Rahim Jumati, berkasnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Ungkap Kabid Humas Polda Papua AKBP Drs. Kartono Wangsadasastra.

23 Desember

- ❖ Akibat rumah mereka terendam banjir, puluhan warga Perumahan Organda demo ke DPRD Kota Jayapura.
- ❖ 3 pejabat tersangka kasus korupsi di Pemkab Jayawijaya masing – masing Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Drs. Hasan Abdur Kadir, Kabag Pengolahan Barang Daerah Drs Daniel Mandowen dan Mantan Kepala Bappeda Abdul Rahim Jumati, tiba di Wamena langsung di cebloskan ke Rutan kelas II B Wamena.
- ❖ Ratusan PNS demo ke kantor Bupati Jayawijaya, tuntutan Pemda Jayawijaya segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Natal dan Tahun Baru.

26 Desember

- ❖ Proses administrasi Drs. John Ibo,MM di Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dinyatakan lengkap dan langsung diverifikasi. Ungkap Sekretaris Pansus DPRP Drs.Dadang Jaya.
- ❖ Ketua MRP Drs. Agus Alua mengatakan, seharusnya pergantian calon gubernur untuk menggantikan Alm. JP. Salossa harus menunggu setelah masa berkabung tujuh hari. Karena itu, tidak heran jika saat ini masyarakat mempunyai penilaian seakan-akan mereka itu sedang menari-nari diatas kedukaan orang lain.
- ❖ Banjir yang terus menerus melanda pasar Youtefa Kotaraja, dikeluhkan sejumlah para pedagang. Pasalnya, mereka tidak bisa berjualan karena losnya tergenang air. Karena itu, para pedagang akan kembali berdagang di eks pasar lama Abepura.
- ❖ Ketua Panwas Merauke Antonio MA,SH memperingatkan tim sukses 5 pasangan Cagub, berkaitan adanya laporan di terima oleh pihak Panwas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah tim sukses dalam meraih simpatisan dengan cara membagi-bagi barang yang dikemas dalam bentuk kado Natal.

27 Desember

- ❖ Adanya ancaman dari pedagang Pasar Youtefa Kotaraja untuk kembali berjualan di lokasi eks pasar Abepura ditanggapi serius Walikota Jayapura Drs. MR Kambu,M.Si. “Pemkot tidak segan-segan mengusir jika ada yang mencoba membuat kios di sana, Pemkot saat ini sedang memikirkan dan merencanakan penanganan yang lebih baik pasar Youtefa”, ungkapny.

28 Desember

- ❖ Pilkada Gubernur / Wagub dipastikan 16 Februari 2005, kepastian ini dituangkan dalam surat keputusan (SK) Nomor 21 tahun 2005 tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pilkada melalui pleno di KPUD.
- ❖ Bupati Jayawijaya Drs. David A Hubi mulai diadili dalam sidang di Pengadilan Negeri Wamena. Persidangan Hubi dipimpin Majelis Hakim Purwadi,SH,M.Hum dibantu dua hakim anggota masing-masing Cristian Kolibu, SH dan Naftali Aiboy,SH.
- ❖ Majelis Rakyat Papua (MRP) menetapkan/merekomendasikan Drs.John Ibo sebagai orang asli Papua dan dapat ikut dalam calon Gubernur / wagub Provinsi Papua periode 2005-2010.
- ❖ Tingkat konsumtif masyarakat Papua terhadap beras sangat tinggi, dibandingkan dengan pangan lokal, seperti sagu dan ubi-ubian. Hal ini dikhawatirkan, akan menjadi bencana bagi masyarakat Papua pada masa yang akan datang. Demikian dikatakan Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Drs. Wim CH Rumbino MM.
- ❖ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Biak Numfor sampai dengan akhir 2005 telah menerima laporan 7049 kepala keluarga yang mengaku belum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga miskin. Hal ini dikatakan Kepala BPS Kabupaten Biak Numfor, Abdul Muin Arif, S.Sos.
- ❖ Kendati sudah jelas-jelas diatur dalam aturan dan undang-undang yang berlaku, namun ternyata masih juga ada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ikut terlibat dalam tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal tersebut diungkapkan anggota Panwas Provinsi Papua Muslim,SH.M.Hum.

29 Desember

- ❖ Sebuah pabrik minuman keras (miras) lokal di Doyo Transat, Sentani Barat sekitar pukul 09.00 digrebek oleh anggota Polsek Sentani di *back-up* Polres Jayapura, dalam penggrebekan ini berhasil disita 5 Drum miras lokal. Pelakunya HT langsung

digelandang ke Polres Jayapura. Hal ini dibenarkan Kapolsek Sentani Barat, Iptu Ali Sadikin.

30 Desember

- ❖ Untuk kedua kalinya, penentuan/ pengundian nomor urut calon Gubernur/ Wagub Papua periode 2005-2010, batal dilaksanakan. Jika pada tanggal 7 Desember lalu batal dilaksanakan karena diprotes oleh beberapa Parpol dan calon gubernur, maka pembatalan kemarin akibat diprotes oleh Partai Golkar Provinsi Papua.
- ❖ Terkait banyaknya keluhan dan rencana tuntutan hukum terhadap Pemkot (Pemerintah Kota) Jayapura, akibat terjadinya banjir pada akhir-akhir ini, Walikota Jayapura, Drs. MR Kambu Msi, meminta agar masyarakat secara umum melihat persoalan tersebut secara rasional dan menyeluruh.
- ❖ Kejaksaan Tinggi Papua, Kadir Sitanggung SH telah merencanakan akan membongkar atau melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus penyalahgunaan Dana Otsus yang terjadi di wilayah Papua. "Mulai Januari, 2006 besok. Kita akan melakukan penyidikan terkait kasus dugaan penyalahgunaan Dana Otsus di Kabupaten Waropen dan Dinas Pariwisata Provinsi Papua".
- ❖ Seiring dengan disidangnya Bupati Jayawijaya Drs. David A. Hubi yang kini sudah berstatus terdakwa, maka Wakil Bupati Jayawijaya Nicolas Jigibalom, S.Sos ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian Bupati berdasarkan Radiogram Mendagri No.131.81/3243/SJ tanggal 20 Desember 2005.
- ❖ Anggota Komisi D DPRD Longginus Sanggur, S.Sos mengungkapkan, "Masalah sampah di kota Jayapura dapat diatasi dengan baik jika penanganannya ditunjang dengan fasilitas yang memadai, termasuk kesejahteraan para buruh angkut sampah itu sendiri, mengingat selama ini pemerintah belum memperhatikan kesejahteraan para buruh ini mulai dari gaji yang rendah, alat keselamatan kerja seperti masker, sarung tangan, sepatu dan peralatan lainnya".
- ❖ Dari data yang dikeluarkan Kepolisian Resort Merauke, sepanjang tahun 2005 telah terjadi 117 kasus penganiayaan yakni penganiayaan biasa sebanyak 57 kasus, penganiayaan ringan sebanyak 47 kasus dan penganiayaan berat sebanyak 17 kasus. "Jadi sepanjang tahun 2005 sampai 30 Desember, didominasi kasus kriminal dan sebagian besar dipicu akibat minuman keras", ungkap Kapolres Merauke AKBP Drs.Wirawibawa,SH.

31 Desember

- ❖ Sepanjang tahun 2005 kasus kriminal yang dilaporkan ke Polres Biak Numfor didominasi kasus penganiayaan. Menurut data yang diperoleh dari Polres Biak Numfor, dari 383 kasus yang dilaporkan sepanjang periode Januari sampai dengan November 2005, kasus penganiayaan yang dilaporkan berjumlah 99 kasus, kasus pencurian 90 kasus dan kasus pengeroyokan sebanyak 46 kasus.
- ❖ Jadwal terbentuknya payung hukum pembentukan IJB (Irian Jaya Barat) diundur. Padahal, jadwal awal sesuai kesepakatan bulan November 2005 lalu, payung hukum provinsi tersebut dijadwalkan harus rampung pada akhir Desember 2005.
- ❖ *Caretaker* Gubernur Papua akan dilantik tanggal 9 Januari 2006. Hal ini diungkapkan Plt Gubernur Provinsi Papua, Drs. H. Andi Baso Basaleng. Pejabatnya adalah DR Sojuangan Situmorang yang saat ini tengah menjabat sebagai Dirjen Pemerintah Umum di Departemen Dalam Negeri.

Bagian II

Analisis Peristiwa

Berdasarkan pada catatan peristiwa di atas, kita dapat menarik unsur-unsur utama yang memainkan peran penting dalam triwulan terakhir pada tahun 2005 ini. Secara umum, catatan harian ini mencakup hal-hal penting yang terjadi di dalam masyarakat, yang memang berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat—saat ini dan untuk masa mendatang. Cakupan ini akan dibuat dalam beberapa rangkuman besar, yaitu: [1] situasi saling percaya masyarakat, [2] Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menjadi wahana utama dalam kehidupan masyarakat Papua dalam Otonomi Khusus, [3] pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang terus menjadi sumber konflik di Papua, [4] konflik-konflik laten yang belum ditangani, dan [5] beberapa catatan soal kesejahteraan. Secara analitis Unsur pertama hingga keempat ditempatkan dalam kerangka hak-hak sipil dan politik; sementara unsur kelima disoroti dari sudut pandang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Analisis ini tidak dapat tidak memunculkan banyak catatan negatif karena memang itulah adanya. Tetapi lebih jauh dari itu, analisis ini dibuat sebagai upaya untuk melihat titik-titik mana saja dalam masyarakat yang harus mendapat respon segera dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari analisis, terus dimunculkan persoalan terbesar di Papua sekarang ini, yaitu pertanggungjawaban tugas dan peran pemimpin masyarakat dan pejabat publik. Persoalan ini berusaha dijawab dengan berbagai tindakan tokoh masyarakat; namun perbedaan tindakan antara satu tokoh dengan tokoh lain secara tajam membuat dampaknya kurang dirasakan masyarakat.

1. Merosotnya Rasa Saling-Percaya: masyarakat terhadap aparat, antar aparat dan antar-lembaga negara

Dalam kurun waktu Oktober-Desember 2005, berbagai kejadian penting menunjukkan bahwa unsur saling percaya makin luntur. Sebaliknya unsur saling tidak percaya antara masyarakat dengan aparat dan lembaga negara, dan juga ketidakpercayaan antar aparat dan lembaga negara di Papua menjadi makin tinggi. Situasi ini dapat dicermati dalam berbagai kejadian yang kami catat berikut ini.

a. Dinamika Pilkada Bupati

Situasi Pilkada yang mendekat membuat para calon yang berpartisipasi dalam Pilkada mempunyai kecurigaan yang tinggi terhadap pesaing-pesaingnya. Mengingat para calon ini bukan hanya tokoh masyarakat, melainkan juga pejabat publik, maka aparat pemerintah juga terseret dalam kecurigaan ini. Contoh misalnya kasus isu Robert Djoenso (Kapolres Jayawijaya) diisukan menjadi *caretaker* bupati atau wakil bupati Jayawijaya (Desember 2005). Entah isu ini benar atau tidak, sengaja ditiupkan atau tidak, jelas bahwa aparat tidak luput dari pergunjungan dalam soal Pilkada atau semua yang menyangkut jabatan publik.

Pilkada juga menjadi wahana untuk semakin membuat situasi saling curiga semakin tajam. Saling tuduh secara terbuka di media, adanya selebaran beredar di masyarakat, dan ditambah dengan reaksi dari aparat keamanan yang mengaitkan situasi yang

berkembang sebagai plot dari OPM. Berbagai pihak dalam masyarakat terseret dalam situasi itu, dan tidak dapat menyumbang secara positif untuk setidaknya membuat situasi masyarakat lebih nyaman dan jauh dari intimidasi publik –seperti misalnya yang terjadi situasi menjelang Pilkada Kabupaten Manokwari.

Ketika ada calon yang kalah, pertarungan itu berpindah ke pengadilan untuk menuntut KPUD. Akibatnya, aturan yang ada menjadi semakin diragukan. Pengadilan menjadi pihak yang gantungan bagi calon yang kalah untuk semakin meragukan aturan dan prosedur. Kasus Kabupaten Raja Ampat (11 Oktober 2005) memperlihatkan bagaimana calon yang kalah bertarung di pengadilan melawan KPUD, dan kemudian pengadilan memenangkan KPUD. Meskipun pengadilan dapat membuat putusan yang relatif dapat memecahkan masalah, namun ketidakpercayaan dan konflik terbuka menjadi perhatian masyarakat luas. Kasus serupa terjadi juga di Fak-fak (7 Oktober 2005) saat dua pasangan calon bupati menggugat KPUD atas perhitungan suara saat Pilkada Bupati Fak-fak. Sementara itu di Supiori, pasangan yang kalah menuduh DPRD telah melakukan pembohongan publik karena dianggap tidak menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran saat pemilu (11 Oktober 2005).

Dari catatan sejarah ini, ternyata usia struktur kabupaten tidak banyak berpengaruh pada kematangan politik suatu daerah. Kabupaten Fak-fak adalah kabupaten tua yang sudah ada sejak Papua masih bernama Irian Jaya dan bahkan Irian Barat; sementara Kabupaten Raja Ampat dan Supiori adalah dua kabupaten baru yang masuk dalam paket UU No. 45/1999 tentang pemekaran provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Timur. Meski usia amat berbeda tetapi dinamika politik relatif sama seperti diuraikan di atas. Pertanyaannya adalah apakah konflik semata-mata karena pasangan calon yang tidak puas dan adanya pelanggaran hukum atau lebih karena struktur dan budaya politik demokratis tidak terbangun secara kokoh? Konflik ini tidak bersifat unik atau hanya terjadi di bagian Kepala Burung karena sebenarnya telah terjadi di bagian lain di Tanah Papua ini seperti kami catat dalam seri Papua Aktual sebelumnya¹. Karenanya, pertanyaan kita justru makin menggugat: apakah proses Pilkada Bupati/ Walikota di Papua ini harus menjalani proses sedemikian semata-mata karena hal ini barang baru? Mengapa proses pemenuhan hak partisipasi politik rakyat Papua justru harus diwarnai konflik?

b. Penanganan *illegal logging*

Seperti telah dicatat dalam Seri Papua Aktual No. 3, kasus yang melibatkan kegiatan ekonomi tertutup, terutama di wilayah yang tidak banyak dijangkau media dan mata publik karena jarak dan kondisi yang jauh dan sulit. Misalnya kasus *illegal logging*. Di satu pihak ada pelaku yang mempunyai posisi yang kuat; di lain pihak, aparat resmi tidak berani dan tidak mampu untuk segera mengambil langkah yang perlu. Misalnya, di Manokwari, di bulan Desember, Kapolres Manokwari, AKBP Drs. Pietrus Waine S.H. menyatakan bahwa ia mengetahui hal ini tetapi menganggapnya belum mencapai skala besar, sehingga tidak bisa langsung diambil tindakan.

Tidak adanya tindakan ini sebenarnya tidak sesuai dengan adanya fakta bahwa BSPHH (Balai Sertifikasi Produksi Hasil Hutan) wilayah Papua, Ir. HenDrik Ruamba menjelaskan soal pengaturan izin perusahaan kayu (di atas 6000 m³/tahun di bawah Menteri Kehutanan, di bawah 6000 m³/tahun di bawah Gubernur Papua). Kepolisian adalah

¹ Lihat *Seri Papua Aktual No. 3* (Juli-September 2005) yang berjudul “Pilkada: Pembawa Berkat atau Bencana?” dalam www.hampapua.org/skp/indexf.html

penegak hukum yang menjalankan pengaturan itu. Jika tidak ada tindakan, kantor dinas dan lembaga gubernur harus mengambil tindakan. Tidak adanya tindakan juga merupakan indikasi bahwa antar aparat dan pengambil kebijakan tidak mau mengambil inisiatif.

Dari catatan kami dalam triwulan terakhir tahun 2005 ini, jelaslah bahwa hanya sejumlah pengusaha diajukan ke muka hukum dan dituntut dengan ancaman hukuman yang tidak lebih dari satu tahun. Fakta ini dan fakta-fakta lain makin mengukuhkan kecurigaan rakyat bahwa Operasi Hutan Lestari tidak tuntas dan belum sampai menjawab akar masalah apalagi menyelamatkan alam sebagai tempat hidup masyarakat Papua.

c. Wabah KKN

Dalam kasus yang melibatkan pemangku jabatan yang dianggap menyalahgunakan jabatan, tidak juga menjadi jelas bagaimana membuktikan tindakan aparat itu memang berdasarkan bukti yang kuat. Di lain pihak jika pemangku jabatan itu hendak ditangkap maka faktor masyarakat yang menjadi pendukung tidak begitu saja melihatnya sebagai upaya yang memang tulus –kalau bapak yang satu ini ditahan, kenapa bapak yang lain tidak ditahan, meski kasusnya sama. Contohnya adalah LMA Jayawijaya yang mendesak Polda Papua untuk menanggukhan penahanan Bupati Hubi. Meski sudah keluar izin penahanan terhadap Bupati Hubi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, proses hukumnya tidak langsung menjadi jelas, dan dengan dibiarkannya proses yang menggantung tersebut, ketidakpercayaan antar aparat juga terus meningkat.

Secara khusus penting untuk digarisbawahi kedudukan kasus pengadilan Bupati Jayawijaya. Kasus ini penting untuk dicermati karena kabupaten ini merupakan kabupaten yang termiskin di Indonesia menurut Laporan Indeks Pembangunan Manusia² oleh UNDP tahun 2004. Wilayah Jayawijaya-dengan ibukota Wamena-senyatanya merosot dari kemampuan mengembangkan daya hidup manusia di wilayah tersebut dilihat dari IPMnya. Selama 1,5 tahun berbagai sektor layanan publik macet: kesehatan, pendidikan, layanan pemerintahan, dan pembangunan infra-struktur. Kemacetan ini diwujudkan dalam demo menuntut pembayaran gaji pegawai, kemacetan aktivitas harian kantor-kantor pemerintah, dan ketersediaan sembako dan BBM yang harganya makin mencekik leher.

Yang mengejutkan adalah bahwa Bupati dan pejabat pemda lainnya yang diperiksa dan diadili hanya atas satu tuduhan yakni pembelian pesawat fiktif. Sementara itu, keterbengkalaiannya pemerintahan tidak diperkarakan dan kebocoran dana yang parah. Apakah ini soal jerat hukum yang belum mampu menjangkau kompleksitas masalah? Atau ini soal aparat penegak hukum yang tidak mampu menangani atau ada masalah lain yang mengatasi soal hukum?

Selain Jayawijaya, kasus-kasus korupsi yang dilaporkan terjadi di berbagai tempat di Papua juga menjadi rangkaian fakta dimana aparat yang satu mengejar aparat yang lain. Misalnya, KPUD Jayawijaya mempertahankan pengurus yang sedang berkasus, kepolisian dan kejaksaan mengejar dan berusaha menahan pejabat yang terkait dengan kasus korupsi; termasuk di dalamnya adalah kasus yang menyangkut kantor dinas kesehatan. Semua pejabat, termasuk kantor dinas, terseret dalam kasus-kasus korupsi.

² UNDP et al., 2004, *Indonesia Human Development Report 2004*, Jakarta: BPS, Bappenas dan UNDP Indonesia, hlm. 11.

Ini menjadi lebih menyulitkan karena juga mengenai beberapa layanan publik yang memang sedang dibutuhkan masyarakat.

d. Konflik IJB vs Papua yang berkepanjangan

Keputusan mendua hati dari Mahkamah Konstitusi mengenai keberadaan IJB berdampak luas dan mendalam hingga hari ini. Keputusan hukum tersebut telah membawa ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan politis bahkan sebuah konflik yang berkepanjangan. Konflik tersebut amat berpengaruh pada suasana yang saling curiga dan tidak percaya baik antara birokrat IJB dan Papua, IJB dengan MRP, Birokrat Papua dengan Jakarta, dan MRP dengan Jakarta. Dalam suasana konflik inilah macam-macam isu muncul, khususnya Pilkada dan pengucuran dana Otsus, proses pemilihan MRP.

Lapisan lain dari perdebatan mengenai Otonomi khusus adalah citra proyek dan pengucuran dana yang tetap melekat. Dana otsus yang naik dari 1,7 triliun menjadi 2,5 triliun dibayangi oleh banyak kegagalan penggunaan dana otsus, terutama tidak membaiknya layanan publik. Fakta-fakta ini memperkeruh citra Otsus di mata rakyat Papua yang telah beranggapan bahwa Otsus hanya mengenyangkan kelompok Papua pejabat dan mereka yang memiliki akses kepada modal dan kekuasaan. Sejumlah contoh kecil seperti pemutusan listrik di kantor pemerintah di Wamena, membuat kerja layanan publik berhenti, dan tentu ada pertanyaan besar dari masyarakat mengapa dana yang besar tidak juga dapat membayar tunggakan listrik Pemkab. Jayawijaya. Terlebih ketika pemutusan hubungan listrik juga dilakukan pada asrama mahasiswa seperti Asrama Nayak, Asrama Anjungan Wamena, Perwakilan Jayawijaya di Sentani, asrama di jalan Buper Waena. Kenyataan sehari-hari ini lebih lanjut menjadi pertanyaan bagaimana komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan. Lebih lanjut, unsur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga makin luntur.

2. Majelis Rakyat Papua: penting tapi terombang-ambing

Setelah ditunggu hampir selama 4 tahun sejak diundangkannya Otsus pada November 2001, Majelis Rakyat Papua (MRP) akhirnya dapat dibentuk dan dilantik pada 31 Oktober 2005 berdasarkan PP No. 54 tahun 2004 tentang MRP. MRP terdiri dari 42 orang ini merupakan perwakilan dari tiga golongan yang ada dalam komunitas asli Papua: adat, agama, dan perempuan. Namun demikian, dinamika pembentukan MRP tetap mencerminkan betapa unsur ketidakpercayaan dan kecurigaan hingga manuver politik untuk menghalangi main peran. Kita bersama akan coba melihat unsur-unsur tersebut berikut ini.

a. Sikap politik Jakarta: setengah hati

Legitimasi Undang-Undang Otonomi Khusus dalam soal MRP ternyata dibayangi oleh ketidakpastian politik yang makin mengakar di Papua. Di antaranya adalah keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) yang didesakkan oleh Pemerintah Pusat, dan menimbulkan keterbelahan masyarakat. Orang-orang yang menjadi calon anggota MRP tidak terelakkan lagi terseret dalam perdebatan ini karena pertanyaan tegas yang diangkat oleh politisi IJB adalah apa dasarnya sehingga MRP juga mencakup wilayah IJB.

Sikap politik Jakarta dengan lantang disuarakan oleh Mendagri yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan publik seperti 'Pilkada IJB dan Papua jalan terus meski MRP belum terbentuk; MRP adalah lembaga kultural sehingga tidak boleh campur di urusan politik; MRP adalah lembaga kultural yang berasal dari UU Otsus sehingga DAP tidak

ada tempat'³. Selain mendagri ternyata Kepala Kesbang Papua sangat aktif ambil peran dalam proses pembentukan IJB dengan segala pernyataan dan tindakannya.

Selain pernyataan publik, sesaat terbentuk Jakarta memaksa baru yang baru lahir ini untuk menghadapi elit politik IJB yang tidak mengakui keberadaan MRP dan terus berkeras dengan keabsahan IJB. MRP turun tangan dengan mengadakan konsultasi publik mengenai pendapat masyarakat tentang IJB dengan hasil mayoritas menolak IJB. Akan tetapi, hasil ini seolah-olah tidak ada arti karena tidak berdampak pada penyelesaian pertentangan hukum dan politik IJB dan Papua. Karena itu patut menjadi pertanyaan kita bersama, 'mengapa Mendagri dan Kepala Kesbang Papua' mengeluarkan pernyataan yang terkesan merongrong kewibawaan MRP sebagai salah satu lembaga negara? Mengapa usaha-usaha yang dibuat oleh MRP toh tidak mendapat tindak lanjut di tataran politik dan hukum? Apa sebenarnya maksud dari segala pernyataan publik dan desakan Jakarta tersebut?

b. Bayangan isu separatisme

Bayangan yang lain adalah soal isu separatisme. Meski sudah ditegaskan bahwa semua calon akan berada dalam garis pertanggungjawaban pada UU Otsus, tetap saja isu-isu separatisme ditiupkan. Sejumlah calon yang ada kaitan dengan Panel atau anggota Presidium Dewan Papua (PDP) seperti Agus Alua disoroti. Dampaknya adalah bahwa MRP sejak dini sudah dipertanyakan dan diberi cap miring bahkan bernada 'separatis', meski belum ada anggotanya. Maka tak heran bahwa calon-calon anggota MRP dipaksa untuk terseret pada perdebatan soal separatisme. Perdebatan soal kesejahteraan menjadi tidak populer.

c. Tanggapan kalangan agama, adat, perempuan, dan mahasiswa

Dalam menentukan calon, berbagai kriteria mengenai calon menjadi maju-mundur. Persekutuan Gereja-gereja di Papua yang mencakup semua denominasi Kristen dan setingkat sinode dan Katolik menyatakan tidak mengirimkan wakilnya dalam kapasitas lembaga karena agama harus berdiri di atas segalanya. Karena itu baik wakil gereja-gereja Protestan maupun Katolik masuk ke dalam MRP untuk mewakili umat pemeluk agama tersebut dan bukan mewakili lembaga gerejanya. Langkah ini mendatangkan tantangan yang tidak dipandang enteng oleh pemerintah karena berkali-kali terjadi perundingan dan pendekatan agar keputusan ini diubah.

Kedudukan MRP Pasal 36 PP 54/2004

MRP mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRD;
- b. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur;
- c. memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Papua, khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
- d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/ Kota serta Bupati/ Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

³ Lihat pasal 36 PP 54/2004 yang mengatur wewenang MRP.

Yang menarik adalah bahwa sejumlah pemimpin gereja yang bukan dari pimpinan tingkat sinode justru dengan gigih memperjuangkan kuota. Hal serupa terjadi dengan MUI. Fenomena ini menjadi penanda bahwa tidak semua komponen dalam lembaga gereja dan MUI sepakat untuk ambil jarak dari politik praktis alias politik kekuasaan. Sebaliknya, mereka bertekad untuk ambil bagian secara penuh dalam sistem yang ada.

Senada dengan kalangan gereja-gereja, kalangan DAP menentang dan menyatakan tidak ikut dalam proses pemilihan MRP. Berbeda dengan kalangan agama yang dipilih melalui proses perwakilan di tingkat provinsi (pasal 12 ayat 3 PP 54/2004), perwakilan adat dipilih melalui pemilu tingkat distrik dan kabupaten (pasal 12 ayat 2 PP 54/2004). Karena itu terjadi dinamika politik di tingkat akar rumput yang kembali membuat orang Papua terbelah dan tak jarang menjadi saling bermusuhan. Di sejumlah daerah pemilihan, proses berjalan lancar dan terhormat karena calon yang maju diterima dan dihargai oleh masyarakat adat yang bersangkutan; tetapi di sejumlah tempat, calon ini ditolak oleh masyarakatnya sendiri dan toh tetap lolos.

Kelompok perempuan kiranya menjadi kelompok yang lebih siap daripada dua kelompok lain sehingga proses pemilihan juga berjalan lebih teratur dan terpercaya. Kuota perempuan merupakan terobosan dalam sistem ketatanegaraan karena hal ini baru terjadi dalam rangka UU No. 21/2001 tentang Otsus.

Sementara itu, kelompok mahasiswa (30 September, 7, 14, 28 Oktober) melakukan demo untuk memprotes pembentukan lembaga ini karena dinilai sebagai upaya kooptasi Jakarta terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang telah mengembalikan Otsus pada demo yang diorganisir oleh Dewan Adat Papua tgl. 14 Agustus 2005. Aksi demo damai ini berlangsung empat kali di Jayapura dan menunjukkan kepada publik bahwa proses ini tidak bebas kritik.

d. Politik uang

Total dana 76 miliar menjadi taruhan besar, karena jika gagal dilaksanakan pemilihan MRP maka isu korupsi dapat menjadi isu lanjut yang diperdebatkan. Namun, pengawasan ketat ini diikuti oleh sikap dan kebijakan KESBANG yang dirasakan sebagai seperti tekanan. Entah disengaja atau tidak, isu anggaran menjadi isu yang diindikasikan juga untuk 'mengikat' para tokoh oleh pihak perwakilan pemerintah pusat. Situasi ini nampak dari komentar publik oleh gereja, dan juga nampak dari upaya untuk 'klarifikasi ulang'.

Proses pencalonan, kampanye, pemilihan, dan dilantiknya MRP secara keseluruhan dibayangi oleh sikap resistensi terhadap otonomi khusus. Isu penyelewengan dana Otsus, isu tidak bekerjanya pejabat publik, ditemukannya kasus-kasus dimana layanan publik tidak berjalan, ditemukannya banyak kasus kelaparan, kasus-kasus kekerasan yang tidak pernah diselesaikan secara baik, isu Irian Jaya Barat, dan informasi yang sama sekali tidak berimbang, semuanya membuat MRP menjadi pertanyaan masyarakat juga, bersama dengan pertanyaan masyarakat terhadap Otonomi Khusus.

3. Pilkada Gubernur Papua: pengalaman demokrasi atau konflik terbuka?

Pilkada Gubernur Papua secara langsung dengan kerangka UU Otsus terjadi pertama kalinya di akhir tahun 2005 ini. Peristiwa politik ini menjadi pertanda partisipasi masyarakat dalam penentuan kepemimpinan publik dan sekaligus menjadi suatu pengalaman baru bagi masyarakat Papua. Pilkada, dimana calon akan dipilih secara

langsung, menjadi suatu situasi dimana setiap orang diharapkan untuk mengenal dan akhirnya memilih secara bebas orang yang akan menjadi pemimpin mereka. Pengalaman baru ini tentu saja berharga tetapi senyatanya tidak selalu dapat dilalui tanpa gejala.

a. Proses pencalonan

Prosedur pemilihan umum yang memang membutuhkan banyak hal membuat proses pengakuan calon, dan pengawasan dalam proses tersebut. Aturan yang ditetapkan mempunyai kerangka aturan, tetapi dalam pelaksanaan ada berbagai pelanggaran yang itu dimanfaatkan untuk, misalnya, mengulur waktu, tidak menjelaskan suatu status hukum, tugas pengawasan yang terkendala oleh kasus pengurus atau pejabat publik.

Dalam kerangka Otsus, Pilkada Gubernur Papua mensyaratkan keterlibatan MRP sebagai badan konsultatif untuk melihat apakah pasangan calon gubernur dan wakilnya adalah orang asli Papua (pasal 37 ayat 2 PP 54/2004). Posisi ini menjadikan badan yang baru lahir ini terseret dalam pertarungan kekuasaan saat proses pembentukannya hingga kelahirannya. Dapat dilihat dalam bagian kronik bagaimana pendapat Mendagri Ma'ruf yang dengan enteng menegaskan bahwa Pilkada Gubernur tetap dijalankan meski MRP belum terbentuk.

Tidak hanya itu, dalam proses seleksi pasangan calon gubernur-wagub MRP kembali ditantang dengan amat keras oleh sejumlah pasangan saat keputusannya menyatakan pasangan Lukas Enembe dan pasangan Bas Suebu 'tidak asli Papua'. Pendukung Enembe sempat melakukan aksi protes guna memaksa MRP mengubah keputusannya dan protes ini disertai dengan perusakan kantor KPUD Papua (19 November). Dengan demikian tahap pencalonan ini tidak dapat tidak telah mengobarkan kembali bara konflik yang tercipta akibat pilkada bupati/ walikota sebelumnya.

Situasi menjadi lebih rumit ketika pada saat bersamaan terjadi juga proses pencalonan gubernur dan wakilnya di Provinsi IJB. Proses ini sudah tertunda beberapa kali dan menjelang akhir tahun 2005 ini, proses ini toh dilaksanakan berdasarkan keputusan Mendagri No. 120-82-1009 tanggal 18 November 2005. Keputusan ini makin memperkeruh komunikasi politik antara Jakarta dan Jayapura maupun Jayapura dan Manokwari.

b. Reaksi elit politik lokal

Pejabat publik, dalam hal ini kepala desa, juga mengambil langkah publik di dalam situasi yang diwarnai dukung-mendukung. Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Biak-Numfor, tercatat pada 31 Oktober, misalnya, membicarakan persoalan calon gubernur/wakil gubernur dalam Pilkada Provinsi Papua –dengan dibayangi tuduhan bahwa ini bagian dari upaya politisasi birokrasi dalam proses menuju Pilkada. Tetapi, FKKD Biak-Numfor juga meminta kejelasan soal pesangon sekitar 85 kepala desa yang akan mengakhiri jabatannya.

Tokoh adat gagap dalam mengambil sikap–sikap apa yang sepatutnya diambil dalam situasi dukung-mendukung tersebut. Ketua Dewan Adat Papua (DAP) mengambil posisi untuk secara terbuka bertentangan dengan gubernur yang sedang menjabat (*incumbent*), DR. JP Salossa. Dilontarkan pernyataan bahwa MRP menjadi wahana bagi Dr. JP Salossa untuk meloloskan dirinya untuk kembali terpilih menjadi gubernur.

KPUD sebagai lembaga yang mengatur pilkada juga mengambil langkah yang gagap dengan tidak membuat jelas tindakan sebagai KPUD, dan kasus-kasus menyangkut personil dari KPUD. KPUD Jayawijaya, misalnya, mengancam akan memboikot pelaksanaan Pilkada Provinsi Papua karena ketua dan pengurus KPUD. Unsur pengawasan tidak ditemukan dalam tindakan akan memboikot ini, di lain pihak, kasus yang menyangkut Ketua dan pengurus teras KPUD juga tidak dijelaskan secara baik dengan informasi yang memadai.

Dalam hiruk pikuk ini, tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan kematian Gubernur Solossa secara mendadak akibat serangan jantung. Kejadian mengejutkan ini memicu berbagai spekulasi dan sekaligus kemarahan para pendukungnya.

c. Masyarakat terombang-ambing

Dalam situasi yang masih belum lepas dari perasaan takut dan was-was, masyarakat Papua melihat bagaimana calon yang satu dengan tim suksesnya berusaha sekuat tenaga mengungguli orang yang lain, dan seringkali melalui cara-cara yang amat mencolok mata. Media cetak dan media televisi menampilkan itu semua setiap hari, terutama bagi mereka yang setiap hari dapat mengakses media tersebut.

Perasaan masyarakat secara umum bercampur aduk. Gembira karena dapat secara terbuka melihat dan terlibat proses pemilihan, tetapi juga amat tidak terbiasa melihat bagaimana kata-kata yang seringkali kasar terpampang begitu saja di media. Seringkali jika penggambaran di media menjadi semakin tajam, masyarakat semakin sulit untuk dapat mengambil jarak karena ada perasaan yang terkait dengan kesamaan suku dan marga, karena informasi yang dapat dipercaya sulit didapat, dan karena sikap pemimpin sendiri yang juga semakin terseret dalam persaingan terbuka.

Masyarakat yang bersemangat untuk ikut mendukung salah satu kandidat dalam pilkada menyambutnya, antara lain, dengan mendirikan posko-posko. Posko ini dimaksudkan sebagai Posko ini didirikan meski calon belum secara resmi ditetapkan (Oktober 2005). Namun, ini juga menjadi situasi yang sulit untuk ditanggapi oleh Panwaslu yang pada waktu itu juga berusaha untuk meresponnya. Semangat untuk mendukung calon dikhawatirkan dapat berubah menjadi pemicu aksi kekerasan horisontal baru. Situasi inipun tidak berusaha dicegah oleh bakal-calon yang didukung. Kebutuhan untuk sedini mungkin mendapatkan dukungan menjadi prioritas.

4. Konflik laten

Di tengah hiruk pikuk Pilkada dan pemilihan MRP, sejarah mencatat bahwa konflik laten di Papua belum ditangani secara memadai. Aksi protes kelompok Kristen terhadap rencana pembangunan *Islamic Centre* di Manokwari (17 November 2005) menjadi pengungkapan apa yang ada di hati banyak orang bahwa di wilayah dimana hubungan Islam-Kristen dibayangi ketakutan. Meski konflik terbuka apalagi bersenjata tidak pernah tercatat dalam sejarah Papua, unsur tabrakan seperti ini bukan tidak mungkin akan mengarah ke konflik yang lebih keras. Dilihat dari tuntutan pendemo yang berjumlah ribuan, rakyat Papua meminta kerangka hukum yang melindungi keberadaan dan identitas mereka. Perasaan tidak aman bahkan terancam ini makin mengemuka di kalangan rakyat Papua dan tersalurkan dalam berbagai isu seperti transmigrasi, agama, kepegawaian, HIV/AIDS, miras, kekerasan militer dan polisi, dsb. Jika demikian, patutlah kita bertanya sebenarnya masyarakat ini mau katakan apa? Apakah mereka tidak lagi

punya benteng perlindungan sehingga hal-hal ini tidak dapat disalurkan dalam jalur hukum dan politik yang ada?

Unsur yang tidak banyak terekam tetapi terus berkecambah adalah aspirasi M(erdeka). Aspirasi politik masyarakat ini memang tidak leluasa dan massal diungkapkan tetapi sesekali diangkat oleh kalangan aktivis mahasiswa seperti Front Pepera saat memprotes pembentukan MRP di Jayapura. Kelompok aktivis mahasiswa ini dengan gigih terus menolak pembentukan MRP dan menyerukan dialog nasional antara Papua dan Jakarta. Ini berarti dalam pandangan kelompok muda ini pembentukan MRP tidak jauh dari rekayasa pemerintah Jakarta. Akan tetapi, kesulitannya adalah kelompok ini belum mampu menawarkan konsep utuh dan inklusif untuk sebuah perundingan yang disebut 'dialog' tersebut.

Pada saat yang sama, citra konflik politik ini justru terus dipelihara dengan laporan penangkapan mereka yang dicap sebagai kelompok separatis oleh pihak TNI (7 November 2005). Yang menarik dari kurun waktu ini adalah pemunculan istilah 'Gerakan Separatis Papua' di media sehingga menambah daftar istilah yang ada seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka), TPN (Tentara Pembebasan Nasional), GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), GPL (Gerakan Pengacau Liar). Unsur lain yang menarik perhatian kita adalah lokasi penangkapan kembali terjadi di wilayah Distrik Pantai Barat dan Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Di wilayah ini hampir setiap tahun ada sejumlah orang yang dilaporkan anggota OPM menyerahkan diri dan senjata mereka. Menjadi pertanyaan kita sebenarnya berapa banyak kelompok gerilyawan bersenjata di wilayah itu dan darimana datangnya mereka? Jika mereka menyerahkan diri tahap demi tahap, sampai berapa tahap akhirnya kelompok ini habis? Pertanyaan semacam ini terus mengisi ingatan penderitaan publik Papua dan tidak mendapatkan jawaban memuaskan.

5. Kesejahteraan masyarakat: siapa peduli?

Harus diakui, kesejahteraan sebenarnya menjadi indikator penting bagaimana masyarakat menerima pemimpinnya, terutama dimana Otonomi Khusus yang terus diusahakan oleh banyak pihak, baik di Papua maupun oleh Pemerintah Pusat. Adanya dana Otonomi Khusus yang besar (1,7 triliun) yang bahkan akan ditingkatkan, membuat semua perhatian diarahkan pada bagaimana Otonomi Khusus ini dapat mencapai masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Tindak-tanduk pejabat publik, aparat, dan pegawai negeri turut diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan masyarakat. Harapan masyarakat amat tinggi dengan adanya Otonomi Khusus, tetapi beberapa kejadian penting menunjukkan adanya arus yang berbalik.

a. Kelaparan di Yahukimo

Kelaparan di wilayah Kabupaten Yahukimo menjadi kasus yang paling menonjol karena menjadi sorotan media di tingkat nasional yang membuat pejabat-pejabat nasional bereaksi. Ada perdebatan soal angka antara satu pejabat dengan pejabat yang lain. Ada perdebatan soal bencana atau keadaan biasa. Namun, tidak dapat dipungkiri bagaimana kelaparan ini memakan korban yang tidak sedikit. Menurut salah satu pejabat pemerintah, mereka yang meninggal akibat kelaparan sebanyak 55 orang. Yahukimo yang terletak di ketinggian 1500 meter menjadi penegasan bahwa daerah ini tidak terlayani oleh Otonomi Khusus, dan diperparah dengan iklim yang keras, yang membuat kesulitan masyarakat setempat semakin berlipat. Pernyataan gubernur Salossa waktu itu yang menyatakan bahwa kejadian ini bukan kali pertama, justru

menegaskan bahwa tidak ada tindakan antisipasi dari pemerintah. Lebih parah lagi, bencana Yahukimo menjadi polemik yang berkepanjangan dan tak jarang menjadi dalih politik untuk menjatuhkan lawan politik apalagi dalam suasana pilkada Gubernur. Potret bencana Yahukimo merupakan contoh bagaimana halangan geografis bukan menjadi dasar bagi pemda setempat untuk bertindak tetapi justru menjadi dalih untuk berkelit dari tanggung jawab negara.

b. Penyakit-penyakit klasik merajalela

Yahukimo bukanlah cerita unik dan terjadi sekali saja. Jumlah mereka yang menderita penyakit, mulai dari ISPA, TBC, HIV/AIDS, gizi buruk, situasi rawan polio dan dengan situasi tidak secara cepat tersedia bahan pengobatan atau pencegahan (vaksin diantaranya) yang perlu bagi masyarakat membuat masyarakat tidak segera mendapatkan perawatan yang semestinya. Kondisi, terutama puskesmas (pustu) tidak banyak mendapat perhatian –fasilitas tidak mendapat perhatian, tenaga medis tidak ada, dan kondisi gedung yang sudah parah. Fakta ini dengan mudah dibayangkan bila kita ikuti proses pendataan keluarga miskin di berbagai kabupaten pemekaran seperti Boven Digul, Mappi dan Asmat (1 Oktober), Tolikara dan Yahukimo (12 Oktober) yang telah didata oleh BPS dalam rangka pemberian Bantuan Tunai Langsung. Dengan gambaran ini menjadi nyata bahwa masyarakat Papua diserang oleh penyakit dasar hingga penyakit global tanpa obat dan harus bertahan dengan kemampuan dana dan sumber daya sendiri. Pemerintah ada dimana? Mana implementasi Otsus untuk kesehatan?

c. Pembodohan atau pendidikan?

Kondisi pendidikan juga tidak mengalami perbaikan. Di Asmat, baru 27% dari anak usia sekolah yang menikmati pendidikan. Guru-pun terbengkalai nasibnya. Sekitar 100-an guru bantu di Biak-Numfor terpaksa berdemo karena honor yang tidak lancar disalurkan. Status mereka di masa mendatang juga tidak jelas. Tindakan semacam ini makin biasa disaksikan di berbagai tempat di Tanah Papua ini sehingga muncul pertanyaan apa rencana dan strategi pemerintah untuk mencerdaskan rakyat Papua, khususnya yang tinggal di pedalaman?

Catatan penutup

Kurun waktu Oktober-Desember 2005 memberikan gambaran bagaimana sulitnya untuk kembali menjawab rasa was-was dan keprihatinan masyarakat. Suasana makin tidak percaya makin tajam. Adanya pilkada di berbagai tingkat, pembentukan MRP, hiruk pikuk dana Otsus, senyatanya tokoh masyarakat belum mampu secara cepat menjawab kondisi masyarakat yang demikian. Situasi yang simpang siur dengan berbagai aspirasi terhadap Otonomi Khusus juga membuat jawaban itu tidak segera didapat. Namun, tetap ada ruang untuk kembali memperhatikan masyarakat, terutama dengan posisi MRP yang sebenarnya mempunyai banyak peluang untuk membangkitkan harapan masyarakat dan mengkampanyekan agenda masyarakat. ■